BADAN POM

kata BPOM

SETARA BERDAYA BADAN POM

BERANI JUJUR! HEBAT!

NO Gratifikasi

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN II TAHUN 2026



Jalan A. Yani No. 24, Sokanegara

0811-2602-011

banyumas.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai POM di Banyumas dapat menjalankan amanah pengawasan Obat dan Makanan dengan baik pada Triwulan II Tahun 2026. Triwulan II Tahun 2026 menjadi fase penting bagi Balai POM di Banyumas dalam memperkuat peran pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja kami. Di tengah dinamika kebijakan dan tantangan lapangan, kami terus berupaya memastikan setiap langkah pengawasan berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Laporan Kinerja Interim ini kami hadirkan sebagai cerminan komitmen terhadap akuntabilitas publik. Melalui laporan ini, kami ingin berbagi capaian, pembelajaran, dan arah penguatan yang kami tempuh di empat kabupaten — Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Setiap data dan narasi di dalamnya merefleksikan kerja bersama seluruh jajaran Balai POM, mitra pemerintah daerah, serta masyarakat yang turut menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar.

Pengawasan Obat dan Makanan bukan sekadar tugas administratif, melainkan bagian dari upaya besar menjaga kesehatan bangsa. Karena itu, kami terus menumbuhkan semangat kolaborasi lintas sektor, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mengembangkan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.

Kami menyampaikan terima kasih secara tulus kepada seluruh mitra kerja, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Semoga laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi kinerja, tetapi juga inspirasi untuk terus berinovasi dan bersinergi demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Banyumas, 17 Juli 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Banyumas,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI BANYUMAS

Gidion, S.Si, M.Sc.
NIP. 19810717 200604 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

DAFTAR GAMBAR VIII

HIGHLIGHT KINERJA XIV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Organisasi 2

1.3. Struktur Organisasi 11

1.4. Isu Strategis 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

2.1. Uraian Singkat Renstra 17

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 17

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 18

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 22

2.5. Metode Pengukuran 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 31

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 158

3.3. Realisasi Anggaran 176

BAB IV PENUTUP 190

4.1 Kesimpulan 190

4.2 Saran 190

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 22
Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2026 26
Tabel 2. 3 Predikat Berdasarkan Kriteria NKO 29
Tabel 2. 4 Tingkat Efisiensi 30
Tabel 3. 1 Capaian NKO 35
Tabel 3. 2 Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026 36
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 39
Tabel 3. 4 Capaian IKSS 1 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 39
Tabel 3. 5 Perbandingan IKSS 1 dengan Target Tahunan 2026 40
Tabel 3. 6 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 1 41
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja KTD/ESO Triwulan II Tahun 2026 43
Tabel 3. 8 Capaian IKSS 2 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 43
Tabel 3. 9 Perbandingan IKSS 2 dengan Target Tahunan 2026 44
Tabel 3. 10 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 2 45
Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sampel Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 47
Tabel 3. 12 Capaian IKSS 3 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 47
Tabel 3. 13 Perbandingan IKSS 3 dengan Target Tahunan 2026 48
Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 3 49
Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja KLB Triwulan II Tahun 2026 50
Tabel 3. 16 Capaian IKSS 4 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 51
Tabel 3. 17 Perbandingan IKSS 4 dengan Target Tahunan 2026 51
Tabel 3. 18 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 4 53
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sampel PIRT Triwulan II Tahun 2026 54
Tabel 3. 20 Capaian IKSS 5 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 54
Tabel 3. 21 Perbandingan IKSS 5 dengan Target Tahunan 2026 55
Tabel 3. 22 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 5 56
Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 57
Tabel 3. 24 Capaian IKSS 6 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 58

Tabel 3. 25 Perbandingan IKSS 6 dengan Target Tahunan 2026 59
Tabel 3. 26 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 6 60
Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi Triwulan II Tahun 2026 62
Tabel 3. 28 Capaian IKSS 7 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 62
Tabel 3. 29 Perbandingan IKSS 7 dengan Target Tahunan 2026 63
Tabel 3. 30 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 7 65
Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 66
Tabel 3. 32 Capaian IKSS 8 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 67
Tabel 3. 33 Perbandingan IKSS 8 dengan Target Tahunan 2026 67
Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 8 69
Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Triwulan II Tahun 2026 71
Tabel 3. 36 Capaian IKSS 9 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 71
Tabel 3. 37 Perbandingan IKSS 9 dengan Target Tahunan 2026 72
Tabel 3. 38 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 9 73
Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sarana Distribusi Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026 74
Tabel 3. 40 Capaian IKSS 10 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 75
Tabel 3. 41 Perbandingan IKSS 10 dengan Target Tahunan 2026 76
Tabel 3. 42 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 10 77
Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Iklan Triwulan II Tahun 2026 78
Tabel 3. 44 Capaian IKSS 11 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 78
Tabel 3. 45 Perbandingan IKSS 11 dengan Target Tahunan 2026 79
Tabel 3. 46 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 11 80
Tabel 3. 47 Capaian Indikator Kinerja Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik Triwulan II Tahun 2026 81
Tabel 3. 48 Capaian IKSS 12 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 82
Tabel 3. 49 Perbandingan IKSS 12 dengan Target Tahunan 2026 83
Tabel 3. 50 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 12 84
Tabel 3. 51 Capaian Indikator Kinerja Pengendalian AMR Triwulan II Tahun 2026 85
Tabel 3. 52 Capaian IKSS 13 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 86
Tabel 3. 53 Perbandingan IKSS 13 dengan Target Tahunan 2026 87

Tabel 3. 54 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 13 88
Tabel 3. 55 Capaian Indikator Kinerja Laboratorium Pengujian Triwulan II Tahun 2026 89
Tabel 3. 56 Capaian IKSS 14 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 90
Tabel 3. 57 Perbandingan IKSS 14 dengan Target Tahunan 2026 90
Tabel 3. 58 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 14 93
Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 95
Tabel 3. 60 Capaian IKSS 15 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 95
Tabel 3. 61 Perbandingan IKSS 15 dengan Target Tahunan 2026 96
Tabel 3. 62 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 15 98
Tabel 3. 63 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 100
Tabel 3. 64 Capaian IKSS 16 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 101
Tabel 3. 65 Perbandingan IKSS 16 dengan Target Tahunan 2026 102
Tabel 3. 66 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 16 103
Tabel 3. 67 Capaian Indikator Kinerja KIE Triwulan II Tahun 2026 105
Tabel 3. 68 Capaian IKSS 17 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 106
Tabel 3. 69 Perbandingan IKSS 17 dengan Target Tahunan 2026 107
Tabel 3. 70 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 17 108
Tabel 3. 71 Capaian Indikator Kinerja Sekolah Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2026 109
Tabel 3. 72 Capaian IKSS 18 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 110
Tabel 3. 73 Perbandingan IKSS 18 dengan Target Tahunan 2026 110
Tabel 3. 74 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 18 112
Tabel 3. 75 Capaian Indikator Kinerja Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026 113
Tabel 3. 76 Capaian IKSS 19 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 114
Tabel 3. 77 Perbandingan IKSS 19 dengan Target Tahunan 2026 115
Tabel 3. 78 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 19 116
Tabel 3. 79 Capaian Indikator Kinerja Pasar Aman Triwulan II Tahun 2026 118
Tabel 3. 80 Capaian IKSS 20 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 118
Tabel 3. 81 Perbandingan IKSS 20 dengan Target Tahunan 2026 119
Tabel 3. 82 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 20 120
Tabel 3. 83 Capaian Indikator Kinerja UMKM yang Didampingi Triwulan II Tahun 2026 124

Tabel 3. 84 Capaian IKSS 21 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 124
Tabel 3. 85 Perbandingan IKSS 21 dengan Target Tahunan 2026 125
Tabel 3. 86 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 21 127
Tabel 3. 87 Capaian Indikator Kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Triwulan II Tahun 2026 129
Tabel 3. 88 Capaian IKSS 22 TW I Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan IV 2025 130
Tabel 3. 89 Perbandingan IKSS 22 dengan Target Tahunan 2026 130
Tabel 3. 90 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 22 132
Tabel 3. 91 Capaian Indikator Kinerja Laporan Analisis Kejahatan yang Didampingi Triwulan II Tahun 2026 134
Tabel 3. 92 Capaian IKSS 23 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 135
Tabel 3. 93 Perbandingan IKSS 23 dengan Target Tahunan 2026 135
Tabel 3. 94 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 23 136
Tabel 3. 95 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2026 139
Tabel 3. 96 Capaian IKSS 24 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 139
Tabel 3. 97 Perbandingan IKSS 24 dengan Target Tahunan 2026 140
Tabel 3. 98 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 24 141
Tabel 3. 99 Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2026 144
Tabel 3. 100 Capaian IKSS 25 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 145
Tabel 3. 101 Perbandingan IKSS 25 dengan Target Tahunan 2026 145
Tabel 3. 102 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 25 147
Tabel 3. 103 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2026 148
Tabel 3. 104 Capaian IKSS 26 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 148
Tabel 3. 105 Perbandingan IKSS 26 dengan Target Tahunan 2026 149
Tabel 3. 106 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 26 150
Tabel 3. 107 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2026 151
Tabel 3. 108 Capaian IKSS 27 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 152
Tabel 3. 109 Perbandingan IKSS 27 dengan Target Tahunan 2026 152
Tabel 3. 110 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 27 154
Tabel 3. 111 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2026 155
Tabel 3. 112 Capaian IKSS 28 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 155
Tabel 3. 113 Perbandingan IKSS 28 dengan Target Tahunan 2026 156
Tabel 3. 114 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 28 157

Tabel 3. 115 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Tiap Indikator Kinerja 175

Tabel 3. 124 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas 180

Tabel 3. 125 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas 187

Tabel 3. 126 Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK 6

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Banyumas 11

Gambar 1. 3 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12

Gambar 1. 4 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Gender 13

Gambar 1. 5 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Usia 13

Gambar 1. 6 Peta Provinsi Jawa Tengah 14

Gambar 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT 37

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Sasaran Strategis 1 38

Gambar 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Banyumas 99

Gambar 3. 4 Grafik Capaian Sasaran Strategis 2 99

Gambar 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT 104

Gambar 3. 6 Grafik Capaian Sasaran Strategis 3 104

Gambar 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu 122

Gambar 3. 8 Grafik Capaian Sasaran Strategis 4 123

Gambar 3. 9 Capaian Sasaran Strategis 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 133

Gambar 3. 10 Grafik Capaian Sasaran Strategis 6 133

Gambar 3. 11 Capaian Sasaran Strategis 7: Layanan Publik Balai POM di Banyumas yang Prima 138

Gambar 3. 12 Capaian Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal 143

RINGKASAN EKSKLUSIF

Berdasarkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas kemajuan pencapaian target kinerja. Laporan ini memuat hasil evaluasi internal per triwulan, termasuk kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang disiapkan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya sekaligus sebagai penyempurna bagi perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Banyumas Tahun 2026 ini menjadi modal evaluasi atas pencapaian kinerja dan anggaran selama Semester 1 Tahun 2026 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 dengan total sebanyak 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh capaian program terangkum dalam 8 Sasaran Strategis yang menjadi arah utama pelaksanaan tugas. Setiap program yang dijalankan juga berlandaskan pada Rencana Strategis Balai POM di Banyumas untuk periode lima tahun, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Melalui Evaluasi Kinerja yang dilakukan dari 8 Sasaran Kegiatan, berikut dapat terlihat capaian setiap sasaran strategis yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas pada Semester 1 Tahun 2026:

Sasaran Strategis		**% Capaian terhadap Target Triwulan II Tahun 2026**	**Kriteria**
Capaian Sasaran Strategis 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,07	SANGAT BAIK

Sasaran Strategis		% Capaian terhadap Target Triwulan II Tahun 2026	Kriteria
Capaian Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,30	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,66	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	KURANG
Capaian Sasaran Strategis 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 7	Layanan Publik UPT yang Prima	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
Capaian Sasaran Strategis 8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Banyumas		**85,005**	

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 1** sebesar 103,07% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal tersebut mencerminkan bahwa Balai POM di Banyumas telah berhasil dalam

meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan II 2026.

2. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 2** sebesar 100% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah meningkatkan efektifitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.

3. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 3** sebesar 100,30% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di wilayah kerjanya yakni Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap.

4. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 4** sebesar 106,66% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas sudah meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu pada Triwulan II Tahun 2026.

5. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 5** sebesar 0% dengan kriteria KURANG. Capaian tidak bisa memenuhi target karena situasi geokriminal atau rawan kasus di wilayah Cilacap belum kondusif untuk dilakukan penindakan karena pelaku usaha jamu BKO untuk sementara ini menghentikan kegiatan produksinya.

6. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 6** sebesar 100% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.

7. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 7** sebesar 0% atau tidak ada capaian pada Triwulan II 2026. Indeks Pelayanan Publik ini akan dicapai pada akhir periode tahun 2026.

8. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 8** sebesar 0% atau capaian akan didapatkan pada akhir periode tahun 2026. Namun, kegiatan akan tetap berjalan atau ber-*progress* setiap bulannya. Sasaran strategis ini mencakup tata kelola pemerintahan Balai POM di Banyumas yang mencakup nilai pembangunan ZI, nilai AKIP, nilai kinerja anggaran, dan indeks daripada manajemen risiko yang telah terimplementasikan.

Rata-rata dari capaian sasaran strategis Balai POM di Banyumas yang dapat terhitung pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu **85,005** dengan kategori "**Baik**". Pada Triwulan II Tahun 2026 ini terhadap 6 (enam) sasaran strategis dari 8 (delapan) sasaran strategis yang dapat dihitung. Secara keseluruhan, Balai POM di Banyumas tidak menemukan kendala yang berarti dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan lingkup tanggung

jawabnya. Dengan kata lain, Balai POM di Banyumas menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja berjalan lancar dan efektif, didukung oleh kerja sama yang solid antara tim internal dan mitra kerja terkait. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen Balai POM di Banyumas dalam menjaga kualitas pengawasan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Namun, perlu diakui bahwa pada Triwulan II Tahun 2026 ini terdapat satu sasaran strategis yang masuk ke dalam kategori kurang yakni “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”. Sasaran ini belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, sehingga menjadi perhatian khusus dalam evaluasi kinerja periode ini. Faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan menjadi pengaruh besar dalam ketidakcapaian sasaran tersebut. Ke depannya, evaluasi atas capaian ini diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih terarah, sehingga efektivitas penindakan dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya. Balai POM di Banyumas akan senantiasa berupaya untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga kualitas maupun kuantitas pelayanan kepada masyarakat tetap dapat ditingkatkan. Upaya ini mencerminkan komitmen yang kuat dari Balai POM di Banyumas untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga mutu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga dalam melindungi kesehatan publik.

Program pengawasan obat dan makanan dan dukungan manajemen Balai POM di Banyumas Tahun 2026 di catchment area pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) kabupaten yang telah dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 7.763.760.000,-. Target realisasi anggaran per Juni atau Triwulan II Tahun 2026 adalah Rp 2.755,317.284,- dan capaian anggaran yang terserap adalah Rp 2.698.940.268,- atau dengan kata lain telah menyerap anggaran 97,95% dari target yang direncanakan. Kini, anggaran yang tersisa sebesar Rp 5.064.819.732,- atau 65,24% dari total anggaran dan akan terus dioptimalkan demi mencapai tujuan instansi Balai POM di Banyumas.

Apabila didasarkan pada perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Banyumas menunjukkan capaian yang bervariasi sesuai perspektif pengukuran. Dari sisi capaian kegiatan, tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,33 dengan kategori Efisien, mencerminkan penggunaan anggaran yang relatif optimal meskipun terdapat kendala penyerapan belanja modal sebesar Rp 3,5 M yang ditahan sesuai kebijakan pusat. Revisi DIPA sebesar Rp 970 juta telah diajukan untuk renovasi gedung pinjam pakai, sementara Rp 2,5 M masih belum dapat digunakan. Dari sisi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat efisiensi mencapai 0,79 dengan kategori Efisien (90%),

menunjukkan konsistensi pelaksanaan program meskipun belum mencapai 100% karena adanya indikator tahunan dan satu IKU yang belum memenuhi target, yaitu persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan akibat kondisi geokriminal di wilayah Cilacap. Sementara itu, dari sisi capaian sasaran strategis, tingkat efisiensi masih berada pada kategori Tidak Efisien (75%) karena terdapat satu sasaran strategis yang belum tercapai serta dua sasaran strategis yang sifatnya tahunan. Secara keseluruhan, capaian efisiensi anggaran Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan konsistensi pelaksanaan program kerja, namun masih menghadapi tantangan pada aspek penyerapan belanja modal dan pencapaian sasaran strategis tertentu. Dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi lintas sektor, Balai POM di Banyumas memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pada triwulan berikutnya dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih optimal.

.

HIGHLIGHT KINERJA

1. **Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Banyumas Teken MoU Dengan STIKES Seruling Mas Cilacap**



Pengawasan Obat dan Makanan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk didalamnya unsur akademisi. Guna memperluas jejaring dalam rangka efektifitas pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Banyumas melakukan penandatanganan kerjasama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan STIKES Seruling Mas Cilacap. Penandatanagan dilakukan oleh Kepala Balai POM di Banyumas Gideon, S.Si., M.Sc bersama dengan Yenni Kristiana, NS, M.Kep selaku Ketua STIKES Seruling Mas Cilacap.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu; dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi yang berdampak pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama mahasiswa yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

2. Tingkatkan Literasi BKO Pada Jamu, Balai POM di Banyumas Edukasi Masyarakat Purwokerto Pada Peringatan Hari Jamu Nasional



Memperingati Hari Jamu Nasional yang diperingati setiap 27 Mei, Balai POM di Banyumas menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat Banyumas yang melaksanakan kegiatan olah raga di GOR Satria Purwokerto. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 Juni 2026 menitikberatkan pada KIE Bahaya Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) pada jamu. Bagaimana dampak bahaya konsumsi jamu yang mengandung BKO, cara mengenali jamu yang mengandung BKO dan minum jamu bersama.

Dampak dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait BKO pada jamu, mengenalkan budaya minum jamu serta menjaga tradisi luhur bangsa. Sehingga tradisi luhur bangsa yang telah diakui UNESCO sebagai budaya tak benda asli Indonesia jamu akan terus dijaga eksistensinya dan memberikan manfaat bagi konsumen.

3. BPOM Banyumas Edukasi Remaja di Banyumas tentang Kosmetik Aman



Berkolaborasi dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Balai POM di Banyumas mengadakan KIE Kosmetik Aman Bagi Remaja di SMK Negeri 1 dan SMK Kalibagor Kabupaten Banyumas. Kegiatan diikuti oleh 30 siswa SMKN 1 Kalibagor membahas Dampak Kosmetik Mengandung Merkuri; Kenali Skincare dengan Cek BPOM; dan Peran Anggota Pramuka Dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan KIE Kosmetik Aman Bagi Remaja merupkan bentuk nyata kolaborasi Balai POM di Banyumas dengan Akademisi guna meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. KIE menyasar anak remaja / Siswa SMK untuk sedari dini membekali pengetahuan tentang kosmetik, meliputi bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya; mengecek kosmetik yang digunakan dan memilih kosmetik yang aman. Hal ini diperlukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang dampaknya dapat merugikan masa depan.

4. **Sinergi Pemkab Banyumas dan Balai POM Perkuat GERMAS SAPA, Tetapkan Lokus Program Keamanan Pangan 2026**



Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) di Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas pada 8 April 2026 untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan sistem keamanan pangan yang berkelanjutan. Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, ini menetapkan Desa Langgongsari, SD Negeri 2 Sokaraja Kulon, dan Pasar Banyumas sebagai lokus Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan PJAS Aman, serta menghasilkan komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program dalam membangun budaya pangan aman di Kabupaten Banyumas.

5. BPOM Banyumas Perkuat Peran Kader Desa Lewat Bimtek Keamanan Pangan



Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Desa (KPD) di Aula Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (20/5/2026), sebagai bagian dari Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) untuk meningkatkan kapasitas kader dalam mewujudkan kemandirian masyarakat menuju desa pangan aman. Kegiatan yang diikuti 25 peserta dari Tim Keamanan Pangan Desa dan kader Desa Langgongsari, Desa Kalisari, dan Desa Melung serta melibatkan pemerintah desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, dan Puskesmas Cilongok 2 ini menghadirkan materi tentang pedoman desa pangan aman, lima kunci keamanan pangan, pencegahan keracunan pangan, pencegahan stunting, serta praktik uji cepat bahan berbahaya pada pangan. Ketua Tim GKPD Balai POM di Banyumas, Rahmat Hidayat, yang mewakili Kepala Balai POM di Banyumas, menegaskan bahwa program tersebut dilaksanakan untuk membangun budaya sadar pangan aman dengan memperkuat peran kader sebagai edukator dan mitra pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan mulai dari rumah tangga hingga lingkungan masyarakat, sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya desa mandiri pangan aman dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas.

6. **Balai POM di Banyumas Dorong Budaya Keamanan Pangan melalui Bimtek Komunitas Desa di Langgongsari**



Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Bimbingan Teknis Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Program Desa Pangan Aman di Aula Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (17/6), yang diikuti 25 peserta dari komunitas keluarga, remaja, pelaku usaha ritel, IRTP, dan usaha pangan siap saji. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan keamanan pangan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif. Kepala Desa Langgongsari, M. Zaenurohman, mengapresiasi pendampingan Balai POM, sementara petugas Balai POM di Banyumas, Rahmat Hidayat, S.Farm., Apt., menegaskan pentingnya peran masyarakat sebagai agen edukasi untuk membangun budaya keamanan pangan dan mewujudkan Desa Langgongsari sebagai desa pangan aman.

7. Pengawalan *Food Security* pada Kunjungan Kerja Presiden RI



Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda kenegaraan, Balai POM di Banyumas memastikan keamanan pangan konsumsi Kepala Negara selama Kunjungan Kerja Presiden RI di Kabupaten Banyumas pada 28 s.d. 29 April 2026. Melalui protokol food security, seluruh sajian menjalani proses pengujian sesuai standar keamanan VVIP sebelum disajikan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi intensif bersama Paspampres, Denkesyah, dan unsur pengamanan terkait untuk memastikan keamanan pangan pada setiap tahapan kegiatan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran Kunjungan Kerja Presiden RI, serta mencerminkan komitmen Balai POM di Banyumas dalam memberikan jaminan keamanan pangan pada penyelenggaraan kegiatan kenegaraan.

8. Balai POM Banyumas Genjot Kompetensi Farmakovigilans Tenaga Kesehatan



Balai POM di Banyumas menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans secara hybrid pada Kamis (21/5/2026) di ruang rapat kantor Balai POM di Banyumas. Kegiatan ini diikuti 45 perwakilan tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian, meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik di wilayah Banyumas Raya

Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai POM di Banyumas, Gidion, S.Si.,M.Sc, dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penerapan farmakovigilans merupakan upaya penting dalam mengawal keamanan obat beredar di masyarakat. Farmakovigilans bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi bentuk perlindungan kepada masyarakat agar penggunaan obat tetap aman, rasional, dan tepat guna Peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam mendeteksi dan melaporkan efek samping obat.

Selama kegiatan KIE PV berlangsung, peserta mendapatkan paparan materi dari Miyanto, S.Farm, Apt (Ketua Tim Kerja PV dan AMR) terkait penerapan farmakovigilans di fasilitas pelayanan kesehatan dan Tata cara pelaporan efek samping obat melalui aplikasi E-MESO 2.0. Selain itu, untuk memperkuat dan mempertajam pemahaman, seluruh peserta melakukan simulasi studi kasus pelaporan KTD/ESO melalui aplikasi E-MESO 2.0. Setelah mendapatkan pelatihan ini, Balai POM Banyumas berharap pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan dalam penerapan farmakovigilans semakin meningkat, khususnya dalam pelaporan KTD/ESO melalui aplikasi E-MESO 2.0.

9. Balai POM di Banyumas Kawal Pemusnahan Produk Pangan



Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Banyumas menghadiri dan menyaksikan pemusnahan produk formula bayi impor hasil penarikan dari peredaran

pada 28 April 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penjelasan publik Badan POM terkait Penarikan Produk Formula Bayi Impor karena potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku arachidonic acid (ARA) oil yang digunakan dalam proses produksi susu formula bayi.

Sebanyak 1.492,2 kg produk susu hasil penarikan sukarela yang dihimpun oleh PT Nestlé Indonesia Distribution Center Gempol dimusnahkan di fasilitas pengolahan milik PT Solusi Bangun Indonesia di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum dimusnahkan, dilakukan penimbangan, pemeriksaan keutuhan segel, serta verifikasi jumlah untuk memastikan kesesuaian dengan data penarikan.

Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin shredder hingga produk menjadi serpihan, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai Refuse-Derived Fuel (RDF) dalam proses produksi semen. Metode ini diterapkan untuk memastikan produk tidak dapat digunakan kembali atau disalahgunakan. Selain petugas Balai POM di Banyumas, pemusnahan juga disaksikan oleh perwakilan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, pelaku usaha dan pengelola fasilitas pemusnahan.

10. Balai POM Banyumas Dorong Perkuatan Sistem Pemantauan Keamanan Obat di Banjarnegara dan Purbalingga



Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas melaksanakan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan obat dan makanan, khususnya pada aspek Farmakovigilans, pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), dan *Antimicrobial Resistance* (AMR).

Koordinasi diterima oleh fungsi Farmasi, Makanan dan Minuman di masing-masing Dinas Kesehatan. Pertemuan membahas program strategis yang dapat disinergikan antara kedua belah pihak. Program strategis yang disepakati mencakup perkuatan sistem pemantauan keamanan obat, penanganan kasus KIPI serta peningkatkan kewaspadaan terhadap resistensi antimikroba.

Selain itu, Balai POM di Banyumas diusulkan dapat terlibat dalam pengkajian dan penanggulangan kasus KIPI melalui keikutsertaan dalam Surat Keputusan KOMDA PP KIPI, fungsi ini sejalan dengan peran Badan POM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Dengan kolaborasi yang sinergi, diharapkan sistem pemantauan keamanan obat menjadi lebih efektif dan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah Banyumas Raya semakin optimal.

11. Tingkatkan Sinergisitas Kearsipan Balai POM di Banyuams Berkoordinasi dengan Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas Terkait Penyerahan Arsip Statis



Senin, 20 April 2026 - Balai POM Banyumas telah melaksanakan kegiatan koordinasi penyerahan arsip statis bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tertib arsip dan pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi ini melibatkan Kepala Subbagian Tata Usaha, Raden Satriya Pinandhita, S.E., beserta jajaran pengelola kearsipan Balai POM di Banyumas, bersama Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, Sinung Nugroho, S.Sos. Dalam pertemuan tersebut dibahas secara teknis proses identifikasi, penilaian, serta

mekanisme penyerahan arsip statis yang telah melewati masa retensi dan ditetapkan memiliki nilai guna kesejarahan.

12. Dukung Keamanan Pangan di Sekolah, BPOM Banyumas lakukan Sosialisasi Program PJAS Aman



Purwokerto – Dalam upaya meningkatkan budaya keamanan pangan di lingkungan pendidikan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Banyumas menyelenggarakan Sosialisasi Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman secara daring pada Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah ibtidaiyah (MI), dan madrasah tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian Program SAPA SEKOLAH (Sadar Pangan Aman Sekolah) yang dilaksanakan Balai POM di Banyumas pada lokus tahun 2026 di Kabupaten Banyumas. Sosialisasi diikuti oleh 16 satuan pendidikan, terdiri atas 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 5 Sekolah Dasar (SD), dan 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Program ini bertujuan membangun kesadaran serta memperkuat implementasi keamanan pangan di lingkungan sekolah dan madrasah guna melindungi kesehatan peserta didik.

Dalam sesi materi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai aspek penting keamanan pangan, antara lain identifikasi bahaya pada pangan, 5 Kunci Keamanan Pangan, tips konsumsi pangan dengan prinsip ING (Izin Edar dan Nomor Registrasi) serta Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), hingga implementasi program keamanan pangan di sekolah. Materi juga mencakup pengenalan

prinsip-prinsip pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman untuk mendukung kesehatan dan keselamatan peserta didik.

13. **Wujudkan Keamanan Pangan Sekolah, Balai POM di Banyumas Gelar Bimtek Kader PJAS Aman**



Banyumas (17/06/2026) – Komitmen Balai POM di Banyumas dalam mewujudkan keamanan pangan jajanan anak sekolah kembali ditunjukkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kader Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Kegiatan ini merupakan rangkaian Program PJAS Aman di Kabupaten Banyumas.

Acara ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik SD Negeri 2 Sokaraja Kulon, perwakilan pedagang kantin, perwakilan wali murid, komite sekolah, serta perwakilan Sanitarian Puskesmas 1 Sokaraja. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Drs. H. Suhartono, M.MPd. selaku Koordinator Korwilcam Dindik Sokaraja. Suhartono menyampaikan apresiasi kepada Balai POM di Banyumas atas komitmen dalam mewujudkan keamanan pangan. Dukungan penuh juga disampaikan oleh Kepala Sekolah, Esti Anas Wahyuni, S.Pd.SD., yang menyatakan bahwa program ini berjalan sinergis dengan program internal sekolah mereka yaitu HIJRAH (Hijaukan Lingkungan, Jaga Kesehatan, Rasakan Hangatnya Kelas Nyaman).

14. Bimtek Komunitas Pasar untuk Wujudkan Pasar Pangan Aman



Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Kantor Pasar Banyumas pada 12 Mei 2026. Kegiatan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas pengelola Pasar Banyumas, perwakilan pedagang pangan, pengelola Pasar Sokaraja dan Pasar Buntu, serta perwakilan DKUKMP dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Bimtek dibuka oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur dan Kepala DKUKMP Kabupaten Banyumas sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung penguatan keamanan pangan di pasar tradisional.

Materi yang disampaikan meliputi pengenalan Program PPABK, pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile dan Cek KLIK, keamanan pangan, identifikasi pangan yang mengandung bahan berbahaya, serta penerapan higiene dan sanitasi di pasar. Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas pengelola pasar dan pedagang dalam menerapkan praktik keamanan pangan semakin meningkat sehingga mendukung terwujudnya pasar tradisional yang mandiri, aman, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya.

15. Balai POM Banyumas Dorong Kemandirian Pasar melalui Sosialisasi Keamanan Pangan Berbasis Komunitas



Balai POM di Banyumas menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Pangan Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) pada 23 Juni 2026. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri atas Kader Keamanan Pangan Pasar Banyumas, pedagang pasar, serta perwakilan pengelola Pasar Banyumas, Pasar Sokaraja, dan Pasar Buntu. Sosialisasi merupakan tindak lanjut bimbingan teknis kader keamanan pangan dengan materi Cek KLIK, lima kunci keamanan pangan, pengenalan bahan berbahaya pada pangan, serta pengambilan sampel pangan untuk pengujian formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.

Hasil pengujian terhadap 8 sampel pangan menunjukkan 1 sampel kerupuk karak pink positif mengandung Rhodamin B. Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas memberikan edukasi kepada pedagang agar hanya menjual pangan yang memenuhi ketentuan serta melakukan pendampingan penyusunan program keamanan pangan di Pasar Banyumas. Melalui kegiatan ini, diharapkan pasar semakin mandiri dalam menerapkan program keamanan pangan berbasis komunitas sehingga mampu mewujudkan pasar yang aman, sehat, dan melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko.

16. Pemusnahan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di RSU Hidayah Purwokerto



Sebagai wujud nyata pengawasan tata kelola obat di fasilitas pelayanan kesehatan, petugas hadir dan menyaksikan secara langsung kegiatan pemusnahan obat rusak dan kedaluwarsa yang dilaksanakan oleh RSU Hidayah Purwokerto pada Kamis, 25 Juni 2026. Rangkaian kegiatan pengawasan ini diawali dengan proses pendataan, verifikasi, hingga tahap predestruksi berupa perusakan bentuk fisik obat agar tidak dapat digunakan kembali. Sediaan farmasi yang dimusnahkan terdiri atas berbagai jenis, termasuk obat keras serta obat golongan narkotika dan psikotropika, yang selanjutnya dihancurkan melalui pihak ketiga berizin pengelola limbah B3 guna memastikan pengelolaan obat berjalan tepat ketentuan dan mencegah risiko penyalahgunaan.

17. Pemusnahan Obat Bahan Alam (OBA) Ilegal Mengandung BKO



Komitmen dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk berbahaya kembali ditunjukkan melalui pemusnahan massal barang bukti hasil intensifikasi pengawasan

Triwulan I tahun 2026 pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan yang berlokasi di TPA Gunung Tugel, Kabupaten Banyumas ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai POM di Banyumas serta disaksikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Dalam penindakan ini, petugas memusnahkan sebanyak 26.290 pieces produk OBA ilegal Tanpa Izin Edar (TIE) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), seperti *Super Kecetit*, *Plus Kulit Manggis*, *Jalak Bali*, dan *Madu Klanceng*, serta 24 rol kemasan siap pakai dan tiga unit alat pengemasan dengan total nilai keekonomian mencapai Rp 65.000.000,-.

18. Narasumber Pertemuan Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Kepatuhan RKO Kabupaten Banyumas



Bertempat di Ballroom Hotel Aston Purwokerto, petugas Fungsi Inspeksi, hadir sebagai narasumber dalam Pertemuan Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Kepatuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) (22/04/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 60 Apoteker penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian se-Kabupaten Banyumas untuk membedah aspek pengelolaan sediaan farmasi sesuai PerBPOM Nomor 5 Tahun 2026. Melalui materi yang disampaikan, peserta kegiatan diedukasi terkait bagaimana mengelola sediaan farmasi mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, mutasi hingga pengembalian dan pemusnahan obat.

19. Narasumber Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi Kabupaten Banyumas



Bentuk dukungan Balai POM di Banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas program imunisasi di Kabupaten Banyumas, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Evaluasi Pengelolaan Vaksin dan Logistik Program Imunisasi yang diselenggarakan pada 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan KB yang dihadiri oleh koordinator dan pengelola logistik imunisasi di Puskesmas se-Kabupaten Banyumas. Keberhasilan program imunisasi tidak hanya ditentukan oleh cakupan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan vaksin dan logistik imunisasi. Dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaktepatan perencanaan kebutuhan, mutasi stok, pencatatan yang belum optimal, serta pengelolaan cold chain product (CCP) yang belum sesuai standar. Pemaparan materi dengan topik “Pengelolaan Cold Chain dalam Mendukung Program Imunisasi” oleh BPOM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas dan meningkatkan kualitas pengelolaan CCP program imunisasi di Kabupaten Banyumas menjadi lebih berkualitas.

20. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kab. Cilacap bersama Plt. Bupati Cilacap



Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Wakil Bupati Kabupaten Cilacap guna membahas evaluasi keamanan pangan dan perizinan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Pertemuan yang dibuka oleh Plt. Bupati Cilacap ini secara khusus mengevaluasi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Pondok Pesantren Al Mansyuroh yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri E. coli pada menu makanan dari SPPG, akibat praktik higiene sanitasi dan sistem penyimpanan bahan pangan yang belum optimal. Berdasarkan hasil pemaparan DPMPTSP Kabupaten Cilacap, tercatat bahwa dari 206 dapur SPPG yang beroperasi, baru 114 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 29 dapur memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan 3 dapur yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sebagai rencana tindak lanjut yang komprehensif, disepakati adanya komitmen lintas sektor untuk memperketat pengawasan mutu pangan, meningkatkan standardisasi higiene sanitasi bagi pengelola SPPG dan penjamah makanan, serta penguatan sistem surveilans dan respons cepat penanganan KLB guna menjamin kelayakan serta keamanan program MBG ke depan di Kabupaten Cilacap.

21. Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) 2026 di Kabupaten Cilacap



Perwakilan dari BPOM Banyumas hadir sebagai narsum dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten / Kota Pangan Aman tahun 2026, di gedung Sumekar Pemkab Cilacap pada 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan dibuka oleh PJ Sekda Cilacap Anisa Febriana. Beliau menegaskan bahwa lomba Kabupaten/Kota Pangan Aman bertujuan untuk mensinergikan peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan pangan aman, guna menghilangkan kebiasaan bekerja secara parsial. Oleh karena itu, seluruh pihak dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai bidangnya demi mewujudkan target Cilacap sebagai kabupaten aman pangan yang bebas dari kasus keracunan makanan. Diharapkan, melalui advokasi Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Balai POM Banyumas, dapat meningkatkan pemahaman pihak Pemerintah Daerah Kab. Cilacap dalam membaca dan menyiapkan data pendukung dengan lebih lengkap dan sesuai syarat.

22. Pembinaan DAK Non-Fisik dan Advokasi Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Kabupaten Banyumas



Akselerasi akuntabilitas program daerah dikawal ketat melalui pelaksanaan monitoring kinerja DAK Non-Fisik Triwulan I dan asistensi mandiri KKPA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada Senin, 27/07/2026. Agenda pengawasan terpadu ini meninjau progres realisasi fisik DAK yang telah dialokasikan untuk sampling produk, inspeksi sarana apotek serta IRTP, serta pemenuhan komitmen keamanan pangan pelaku usaha. Tim pembina merekomendasikan langkah perencanaan kembali agar serapan fisik mampu mencapai target di akhir Triwulan II, sekaligus memberikan apresiasi atas capaian prestisius Kabupaten Banyumas yang berhasil meraih predikat KKPA kategori Level Sangat Baik pada penilaian sebelumnya. Kolaborasi dinamis ini diproyeksikan mampu memperkuat pembaruan SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPOM) guna membangun pondasi keamanan pangan yang kokoh dalam menyukseskan program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta intervensi penurunan *stunting*.

23. Pembinaan DAK Non-Fisik dan Advokasi Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Kabupaten Purbalingga



Langkah strategis dalam memperkuat fondasi keamanan pangan di wilayah kerja dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi advokasi dan monitoring terpadu bersama jajaran Dinas Kesehatan serta Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga pada Selasa, 21 April 2026. Pertemuan lintas sektor ini memfokuskan agenda pada optimalisasi penyerapan anggaran DAK Non-Fisik serta asistensi teknis persiapan pengisian instrumen penilaian KKPA. Guna mengatasi kendala operasional pada triwulan pertama, disepakati rumusan taktis berupa pemanfaatan alokasi DAK untuk perluasan parameter uji sampling komoditi lokal serta penajaman kegiatan penyuluhan. Selain itu, forum yang dihadiri langsung oleh Kepala Balai POM di Banyumas ini menjadi momentum penting untuk menyusun peta perbaikan kualitas data dukung KKPA pasca-evaluasi raihan kategori Level Sedang pada tahun lalu, dengan memaksimalkan integrasi capaian penghargaan Kabupaten Sehat dan pembaruan regulasi kelembagaan TKPPOM. Sinergitas ini diharapkan mampu mendorong kemandirian pengawasan yang berdampak nyata pada keberhasilan program prioritas nasional seperti intervensi stunting dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

24. *Desk* Registrasi Pangan Olahan



Guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta menjamin keamanan pangan masyarakat, Balai POM di Banyumas berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Desk Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan pada 28-29 April 2026. Bertempat di D'Garden Banyumas, program ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di wilayah Banyumas dan sekitarnya, terutama dalam mendampingi proses pengajuan izin edar mulai dari pendaftaran akun perusahaan hingga registrasi produk.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 28 pelaku usaha yang terbagi dalam sesi pagi dan siang untuk menjaga efektivitas pendampingan. Setiap pelaku usaha diberikan keleluasaan untuk mengonsultasikan lebih dari satu pengajuan produk dalam satu kesempatan. Sinergi antara ketekunan pelaku usaha dan bimbingan intensif dari evaluator membuahkan hasil positif dengan terbitnya 23 Nomor Izin Edar (NIE) baru, yang terdiri dari 22 produk risiko tinggi dan satu produk risiko menengah rendah, serta verifikasi bagi tiga akun perusahaan baru.

25. Forum Kolaborasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)



Balai POM di Banyumas terus memperkuat pengawasan peredaran obat dengan hadir sebagai narasumber dalam Forum Kolaborasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada Kamis (23/04/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Paguyuban Pedagang Besar Farmasi (PBF) Banyumas Raya ini turut menggandeng Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (PC IAI) Kabupaten Banyumas. Ketua Paguyuban PBF Banyumas Raya, Noor Khodhi Aminah, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara PBF selaku distributor dengan sarana pelayanan kefarmasian sebagai pelanggan agar seluruh proses penyaluran obat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Forum ini diisi dengan penyampaian materi terkait penyaluran obat dari petugas Balai POM di Banyumas yang dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta sekaligus dijadikan kesempatan untuk menyelesaikan kendala di lapangan yang membutuhkan koordinasi dan komitmen antara pihak PBF dan sarana pelayanan kefarmasian. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen oleh pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab PBF. Komitmen ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyaluran obat, mulai dari verifikasi legalitas pelanggan, analisis kewajaran pesanan, pembinaan sumber daya manusia, hingga pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan.

26. Sosialisasi CABLAKA sebagai Upaya Pembentukan ZI menuju WBK/WBBM



Sebagai salah satu upaya pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), petugas Balai POM di Banyumas selalu melakukan sosialisasi CABLAKA (Catat Aduan Berbasis Lapor Kepala Balai) di setiap kesempatan atau forum yang melibatkan lintas sektor. CABLAKA merupakan layanan aduan langsung ke Whatsapp Kepala Balai POM di Banyumas yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mengetahui adanya pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi oleh petugas Balai POM di Banyumas.

27. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas menyelenggarakan kegiatan Penggalangan Lintas Sektor bertema Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu pada Senin, 25 Mei 2026



Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas menyelenggarakan kegiatan Penggalangan Lintas Sektor bertema pada Senin, 25 Mei 2026. Kegiatan yang bertajuk "Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT)" ini merupakan bagian dari gerakan masif yang dilaksanakan oleh Badan POM sepanjang Mei 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat pencegahan dan penanganan penyalahgunaan OOT di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya ketergantungan obat. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 50 orang tamu undangan ini dibuka dan dihadiri langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur lintas sektor se-Banyumas Raya, mulai dari jajaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas atau instansi terkait, akademisi, institusi pendidikan, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Perusahaan Besar Farmasi (PBF), hingga perwakilan pelajar dan Gerakan Pramuka. Dalam sambutannya, Bupati Banyumas yang juga terlibat dalam pengelolaan pondok pesantren rehabilitasi narkoba di Kabupaten Sleman, DIY, menegaskan pentingnya peran keluarga.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut sebagai BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang dimaksud dengan obat dan makanan dalam peraturan tersebut mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pimpinan tertinggi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat menentukan pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan memiliki karakteristik khusus karena kebijakan ditetapkan secara terpusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Balai di seluruh Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, sebab tindakan yang diambil harus konsisten dan selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengawasan menjadi efektif dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPOM perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital dan basis data terintegrasi, menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, BPOM dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan obat serta makanan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Perencanaan Jangka Panjang (PJP) POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.BPOM utamanya mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang keempat yakni “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Badan POM memiliki 83 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, dan 20 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan jaringan UPT ini menjadi tulang punggung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara nasional, sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan produk dapat dijaga hingga ke tingkat daerah. Dengan dukungan organisasi yang luas dan terintegrasi, Balai POM di Banyumas juga berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah kerjanya.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. **Kedudukan**

   Balai POM di Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Banyumas memiliki lingkup pengawasan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap.

2. **Tugas Pokok dan Fungsi**

   Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut:

   a) **Tugas**

      Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   b) **Fungsi**

      Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi berikut:

      - Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
      - Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
      - Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
      - Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
      - Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
      - Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
      - Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.

- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Visi dan Misi Badan POM Tahun 2025-2029

- Dalam penyusunan visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu, Visi yang diusung oleh BPOM 2025-2029 adalah “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

- Misi:
  1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
  2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
  3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan BPOM Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima.

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti Ber-AKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah. Berikut penjelasan secara ringkas mengenai nilai Ber-AKHLAK itu sendiri.

BerAKHLAK

Berorientasi pelayanan **A**kuntabel **K**ompeten **H**armonis
Loyal **A**daptif **K**olaboratif



Gambar 1.1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK

Kegiatan Utama

Arah Kebijakan Utama BPOM 2025-2029

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Banyumas menetapkan program dan kegiatan dalam menjalankan perannya, yaitu:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia:
    1) Sertifikasi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
    2) Perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu Obat dan Makanan;
    3) Pengawasan sarana distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian;
    4) Pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
    5) Pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
    6) Pengawasan sarana produksi Pangan Olahan;
    7) Pengawasan peredaran Pangan Olahan dan KLB KP;
    8) Pengawasan *post market* iklan dan penandaan Obat dan Makanan;
    9) Pelaksanaan desk registrasi bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Direktorat Registrasi Kosmetik.
    10) Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha;
    11) Sosialisasi dan desk registrasi Pangan Olahan;
    12) Audit surveilans penerapan SMKPO;
    13) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Pangan Olahan;
    14) Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan;
    15) Intelijen Obat dan Makanan;
    16) Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
    17) Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;
    18) Pengujian Obat dan Makanan.
b. Kegiatan strategis program dukungan manajemen:
    1. Koordinasi implementasi peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana ditambahkan dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta reformasi birokrasi;

2. Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan hubungan masyarakat Balai POM di Banyumas;
3. Koordinasi perumusan renstra dan rencana tahunan, penyusunan dokumen anggaran, keuangan serta pengelolaan kinerja dan pelaporan;
4. Pengelolaan sumber daya manusia;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai POM di Banyumas;
6. Pengembangan SDM Aparatur Balai POM di Banyumas;
7. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan informasi Obat dan Makanan;
8. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

Kegiatan Prioritas

Strategi BPOM Tahun 2025-2029

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Balai POM di Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Balai POM di Banyumas. Berikut beberapa strategi Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 diantaranya.

1) Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan pelayanan publik yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan standar. Dengan berubahnya status Loka POM menjadi Balai POM, Balai POM di Banyumas akan meningkatkan kapabilitas salah satunya dalam hal laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi terkini.

2) Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit. Sebagaimana yang diamanatkan pada Reformasi Birokrasi yang memfokuskan pada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pengelolaan berbasis merit. Kompetensi teknis yang unggul dan adaptif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pengawasan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengoptimalan kompetensi melalui sistem merit juga dapat meningkatkan transparansi lingkungan kerja dan meningkatkan daya saing antar pegawai agar mengikuti perkembangan zaman melalui peningkatan kapabilitas. Kapabilitas pegawai yang terus meningkat akan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas balai dalam menjawab tantangan publik.

3) Kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif dengan dukungan teknologi informasi yang optimal. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membangun

kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan.

4) Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu di tingkat nasional maupun internasional.

5) Sistem layanan perizinan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Sistem perizinan akan dikembangkan agar lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Hal ini mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan ramah pengguna.

6) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai POM Banyumas dalam rangka peningkatan laboratorium dan infrastruktur pelayanan yang optimal sesuai standar. Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini mencakup peralatan, ruang kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang efektivitas operasional.

7) Memperkuat pengawasan obat dan makanan lintas sektor dalam mendukung Reformasi birokrasi dan pengawasan internal secara kuat dan terukur untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan kelembagaan. Pengawasan yang terintegrasi antar sektor dan penguatan pengawasan internal akan dilakukan secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur organisasi dan kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan.

8) Pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis didukung dengan kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif. Pengawasan akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. SDM pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

9) Mengatasi Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif dengan adanya kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif, keterbatasan jumlah dan distribusi

PFM akan diatasi secara inklusif. Pendekatan ini memastikan pengawasan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah kerja.

10) Risiko serangan siber dan kebocoran data diatasi dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Pemanfaatan teknologi dan inovasi akan difokuskan pada penguatan sistem keamanan informasi. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan SPBE BPOM yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

11) Pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk mendukung kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis. Selain kompetensi teknis, pengembangan kapasitas manajerial dan pemahaman sosiokultural menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang tangguh dan berdaya saing. Strategi ini mendukung pengawasan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

1.3. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 (lima) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Banyumas, Loka POM di Kabupaten Tegal, dan Loka POM di Kabupaten Grobogan.

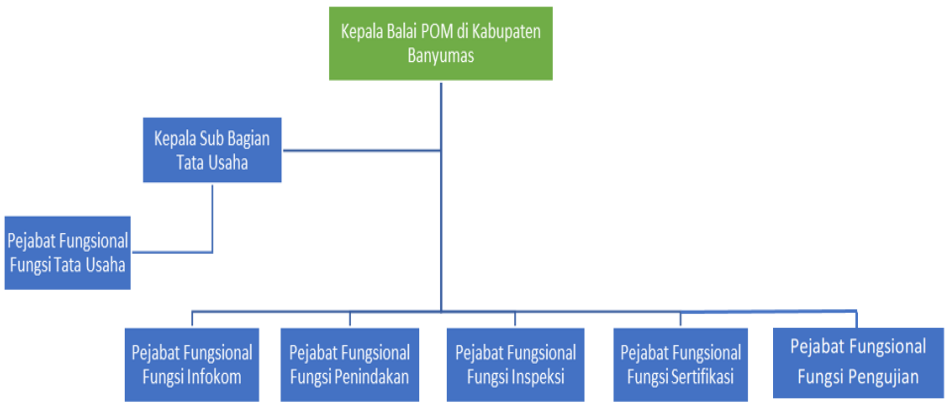

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Banyumas

Analisis Lingkungan Strategis

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Banyumas sampai dengan Juni Tahun 2026 adalah sebanyak 48 orang, terdiri dari 39 orang ASN (dengan rincian 35 PNS dan 4 PPPK) serta 9 orang outsourcing yang terdiri dari 3 orang satpam, 3 office boy, 2 orang driver dan 1 orang sekretaris.

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja, pemenuhan SDM masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu sejumlah 48 pegawai, sedangkan jumlah ASN existing baru dipenuhi 39 pegawai. Sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas belum didukung dengan SDM yang memadai baik dalam hal jumlah maupun proporsi jabatan fungsional, dimana secara keseluruhan masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 9 orang. SDM Balai POM di Banyumas sampai dengan Juni Tahun 2026, Apoteker dan S2 lain 12 orang, S1 19 orang, D3 8 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 49% dan S2 31% yang paling banyak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Banyumas melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat diselesaikan oleh tenaga yang ada. Berikut data yang menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan, gender dan usia Tahun 2026.

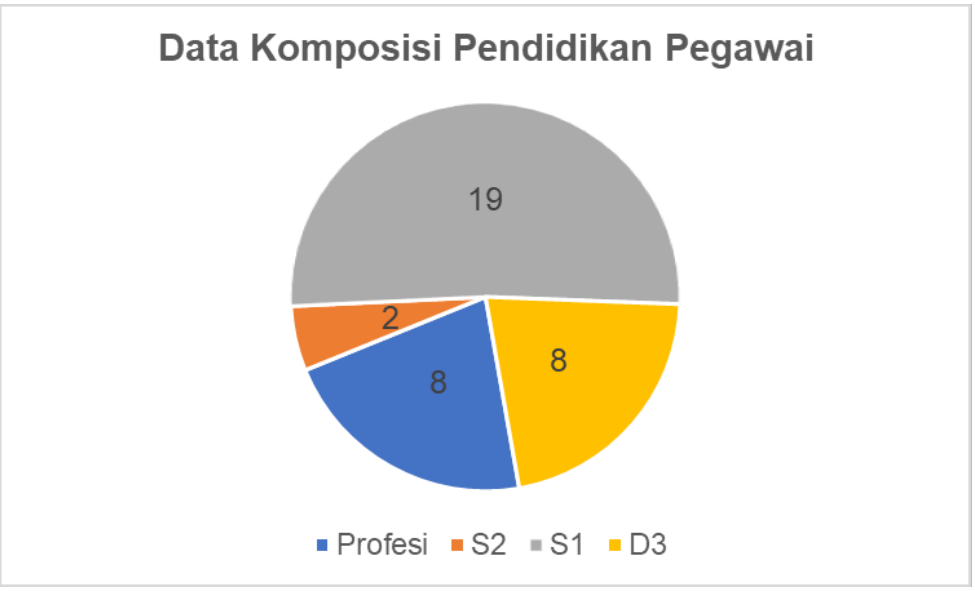

Gambar 1. 3 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

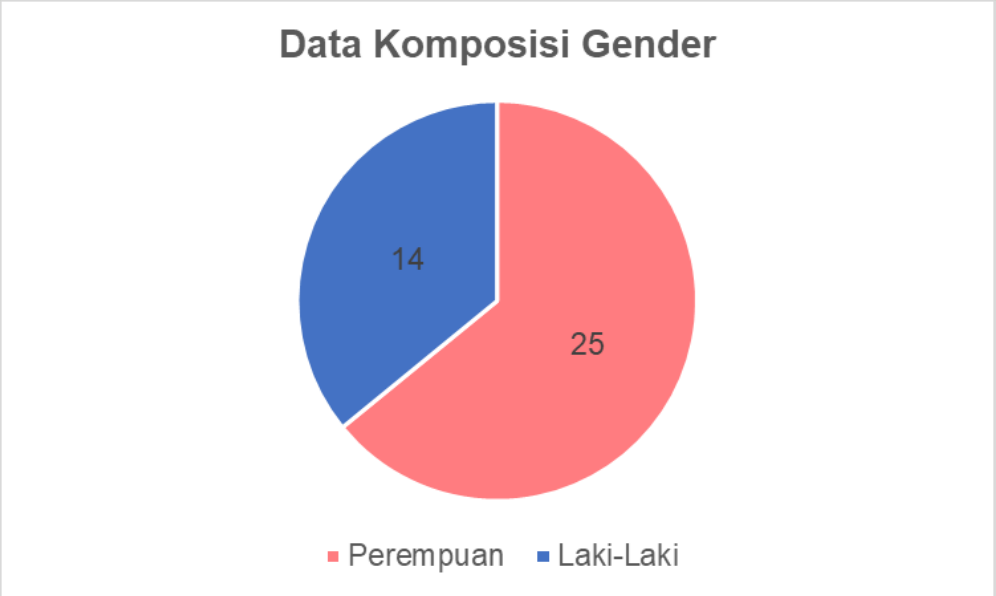

Gambar 1. 4 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Gender

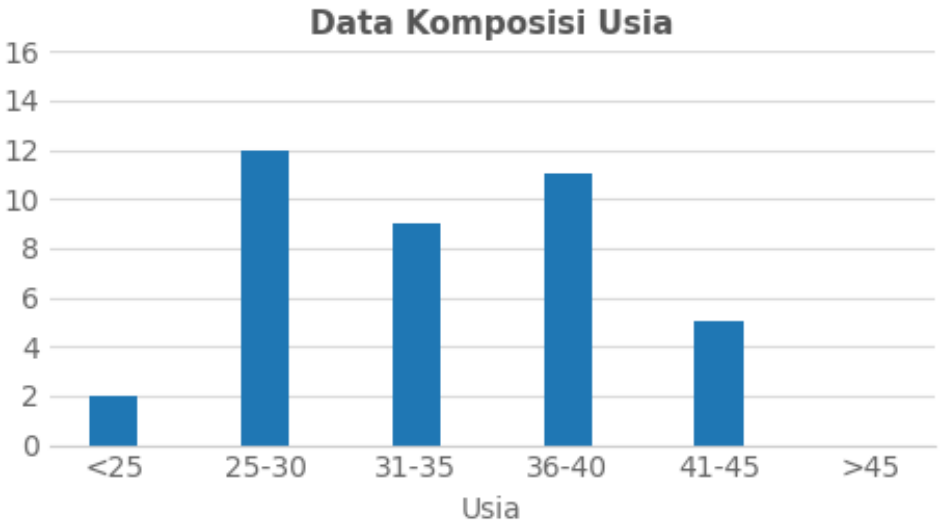

Gambar 1. 5 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Usia

b. Sumber Daya Lain (Tim BMN)

Kantor Balai POM di Banyumas saat ini berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 24, Karangjengkol, Keluruhan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115 dengan bangunan gedung seluas 1.000 meter persegi berstatus sewa. Mulai ditempati dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas sejak 5 Januari 2026. Kantor ini menjadi kantor baru Balai POM di Banyumas yang sebelumnya beralamat di Jalan Gunung Singgalang Nomor 14, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53121. Pada kantor saat ini ditempati, seluruh operasional Balai POM di Banyumas dilaksanakan, meliputi fungsi perkantoran,

fungsi pemeriksaan, fungsi penyidikan serta pelayanan publik. Adapun fungsi pengujian laboratorium masih dilaksanakan dengan menginduk pada Balai Besar POM di Semarang. Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas organisasi, sejak akhir Tahun 2025 hingga Tahun 2026 Balai POM di Banyumas terus mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium agar memenuhi standar kapasitas laboratorium pada unit kerja setingkat Balai. Sumber tenaga Listrik yang digunakan Gedung Balai POM di Banyumas berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya terpasang sebesar 23.000 VA, yang didukung oleh generator set (genset) berkapasitas 250 kVA sebagai sumber listrik cadangan.

Sumber air yang digunakan di Balai POM di Banyumas pada saat ini dipenuhi melalui air sumur sebagai sumber utama penyediaan air. Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai POM di Banyumas memiliki 6 unit kendaraan, yang terdiri dari:

- 2 (dua) unit motor operasional kantor;
- 1 (satu) unit mobil operasional kantor;
- 1 (satu) unit mobil fungsional laboratorium keliling;
- 1 (satu) unit mobil fungsional KIE berstatus sewa;
- 1 (satu) unit mobil Dinas Jabatan berstatus sewa.

c. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten

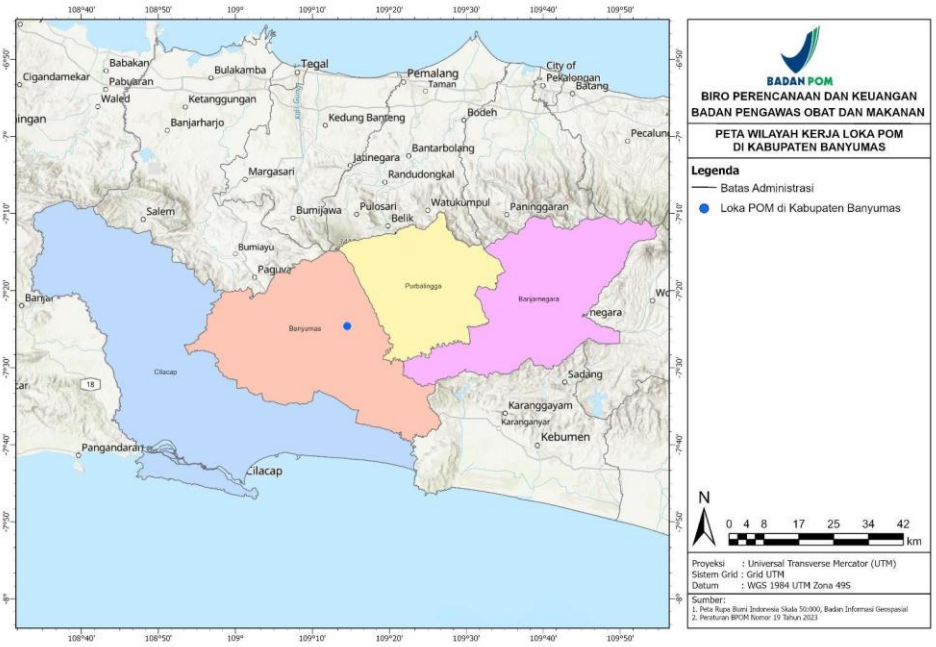

Wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km^2,

Kabupaten Cilacap 2.252 km^2, Kabupaten Purbalingga 777,6 km^2, dan kabupaten Banjarnegara 1.070 km^2, yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km^2 atau sekitar 16,55% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah Kabupaten / Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Banyumas dengan 4 (empat) Kabupaten tersebut, diantaranya:

1) Kabupaten Banyumas, dengan ibukota terletak di Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten ini memiliki 27 Kecamatan, 30 Kelurahan, dan 301 Desa.
2) Kabupaten Cilacap dengan ibukota terletak di Kecamatan Cilacap Tengah. Kabupaten ini memiliki 24 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 269 Desa.
3) Kabupaten Purbalingga dengan ibukota terletak di Kecamatan Purbalingga. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 224 Desa.
4) Kabupaten Banjarnegara dengan ibukota terletak di Kecamatan Banjarnegara. Kabupaten ini memiliki 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 266 Desa.

Peraturan Badan POM No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan POM menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Balai POM di Banyumas.

1.4. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

INTERNAL

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Balai POM di Banyumas, yang secara rutin di *update* satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu baik internal di Balai POM di Banyumas:

1. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis;
2. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural;
3. Kelembagaan dan susunan organisasi Balai POM di Banyumas yang belum optimal;

4. Penyelesaian proses perizinan melalui *Online Single Submission* BPOM – (OSS BPOM) belum sepenuhnya optimal;
5. BPOM Banyumas belum memiliki ruangan laboratorium yang sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL);
6. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (*early warning system*) belum terintegrasi;
7. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki;
8. Sistem TI belum terintegrasi secara optimal.

EKSTERNAL

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, yang secara rutin di *update* satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu eksternal di Balai POM di Banyumas:

1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan;
2. Koordinasi antar lembaga belum sinergis;
3. Keterbatasan dan dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif;
4. Dinamika pasar yang cepat;
5. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan;
6. Krisis kesehatan global;
7. Isu lingkungan dan keberlanjutan;
8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi;
9. Perubahan demografi dan epidemiologi;
10. Ancaman bioteriosme;
11. Akselerasi perkembangan teknologi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 pada 7 Oktober 2025. Dokumen Renstra ini menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Renstra BPOM dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mengantisipasi dinamika masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM tetap relevan dan efektif dalam menjalankan mandat pengawasan, mengingat pesatnya inovasi dan perubahan di sektor tersebut.

Arah kebijakan dan strategi Badan POM Tahun 2026 ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden yang terpilih. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan Balai POM di Banyumas 2026 telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala Renstra Balai POM di Banyumas mengacu merujuk pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Renstra BPOM 2025–2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi nasional dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra Balai POM di Banyumas 2025–2029 akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian strategis selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 ini tertuang di dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Nomor HK.02.02.24B.12.25.68 Tahun 2025.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Banyumas melaksanakan program kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di

Banyumas dan Kepala Badan POM. Perjanjian ini menjadi landasan utama dalam memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan sasaran strategis, tujuan organisasi, serta arah kebijakan nasional. Melalui mekanisme tersebut, setiap program dan kegiatan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, dan kontribusi nyata terhadap perlindungan masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Balai POM di Banyumas memiliki 8 Sasaran Strategis yang diukur melalui 28 Indikator Kegiatan Utama (IKU) yang secara nyata akan dijalankan tahun 2026 dan 1 Indikator tentatif karena belum terdapat arahan pasti yakni indikator mengenai sampel pangan MBG yang menjadi kegiatan prioritas Presiden. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Balai POM di Banyumas. Anggaran awal untuk Balai POM di Banyumas pada program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp 4.492.663.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp 3.590.835.000 dengan total pagu sebesar Rp 8.083.498.000,-. Namun, perlu diperhatikan bahwa dokumen RKT ini merupakan perencanaan awal yang nantinya dapat berubah disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi, kapabilitas, dan ketersediaan anggaran. Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara akuntabel dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Balai POM di Banyumas sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi.

Secara rinci, target Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko	87,41	%	30.143.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				TARGET 2026	ANGGARAN
	pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	%		4.239.000
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	%		36.988.140
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	%		536.060
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	%		4.288.480
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	%		7.200.000
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	%		12.542.500
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	83	%		30.252.500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
			ketentuan			
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	%	66.303.750
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33	%	51.416.000
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	%	1.780.000
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36	%	13.387.000
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	%	5.815.250
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,5	Nilai	83.534.000
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	%	11.793.320

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63	%	3.620.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	Nilai	21.526.000
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	Jumlah sekolah	14.480.000
		03	Jumlah desa pangan aman	1	Jumlah desa	22.701.000
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Jumlah pasar	19.569.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37,25	%	7.986.000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	%	124.648.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	91	%	4.125.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
7	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,22	Indeks	5.000.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	Nilai	4.079.550.000
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	78,96	%	1.115.699.000
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Indeks	2.281.306.000
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	Indeks	23.069.000

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Dokumen ini tidak sekadar berisi daftar target, melainkan sebuah janji kinerja yang mencerminkan arah strategis lembaga. Di dalamnya termuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pencapaian per triwulan, program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang dirancang secara terkoordinasi.

Melalui Rencana Aksi ini, setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan berbagai kegiatan secara terukur dan konsisten. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga memberikan outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, memperkuat efektivitas pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41	87,41	87,41	87,41
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	27
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	77	77	77
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	96,03	96,03	96,03
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	91,67	91,67	91,67
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	96,09	96,09	96,09	96,09

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
			sesuai ketentuan				
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33	77,33	77,33	77,33
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	94,38	94,38	94,38
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36	87,36	87,36	87,36
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6,5	7	7,5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	50
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12,5	37,5	37,5	63
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	89,25	89,25	89,25	89,25

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
	wilayah kerja UPT		kerja UPT				
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20%	70%	70%	1
		03	Jumlah desa pangan aman	15%	72%	74%	1
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10%	70%	80%	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20%	50%	75%	37,25
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	10	55	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	91
7	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	4,22
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	75
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	78,96

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
	yang optimal	03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	5
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	2,8

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2026

Tabel Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang disajikan merupakan target yang telah mengalami penyesuaian seiring adanya perubahan alokasi anggaran. Revisi terhadap target RAPK tersebut ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2026, sehingga seluruh sasaran, indikator, dan alokasi anggaran yang tercantum di dalamnya mencerminkan kondisi terkini. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian outcome. Dengan adanya revisi ini, Balai POM di Banyumas memiliki pedoman yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

2.5. Metode Pengukuran

Pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur kinerja melibatkan seluruh anggota unit kerja di Balai POM Banyumas. Setiap tim bertanggung jawab menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang akurat dan valid, yang kemudian diintegrasikan menjadi laporan kinerja menyeluruh. Data yang terkumpul mencakup indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan strategis Balai POM Banyumas.

Pengukuran kinerja mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2. 1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM ini memiliki dua jenis, yakni NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Kemudian, untuk NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Matriks NKO dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Gambar 2. 2 Matriks NKO Tahunan

Keterangan:

a. Normalisasi Capaian PK mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
   - Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%;
   - Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi Inspektorat Utama. Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja.

Predikat AKIP	**Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi**
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Gambar 2. 3 Koreksi Capaian PK Berdasarkan Capaian AKIP

c. Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin a) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin b), dikalikan 100.

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan Predikat Nilai Kinerja Organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Predikat Nilai Kinerja Organisasi mengacu tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Tabel 2. 3 Predikat Berdasarkan Kriteria NKO

Selain itu, juga dilakukan perhitungan atas Efisiensi Kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianinput} IE = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 2. 4 Tingkat Efisiensi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi merupakan bagian penting dari proses manajemen yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat dilihat melalui pencapaian indikator yang telah ditetapkan, atau yang dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sendiri merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara periodik melalui sistem yang terstruktur, sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dievaluasi secara transparan.

Pada Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Balai POM di Banyumas terus berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini. Berikut adalah nilai kinerja organisasi Balai POM di Banyumas per Triwulan II Tahun 2026, yang menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41	93,38	106,83	106,83%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	-	-
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	77	78,75	102,27	102,27%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,50	106,32	106,32%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	96,25	100,23	100,23%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	93,33	101,81	101,81%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	84,13	101,36	101,36%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	100	104,07	104,07%
		Persentase sarana distribusi Pangan	77,33	80	103,45	131,45%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
		Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	94,42	100,04	100,04%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36	94,44	108,10	108,10%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,5	6,65	102,31	102,31%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	-	-
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,5	37,5	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
	Fortifikasi					
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25	90,33	101,21	101,21%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70%	70%	100	100%
		Jumlah desa pangan aman	72%	72%	100	100%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70%	70%	100	100%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	53,33	106,66	106,66%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	-	-
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	-	-

Tabel 3. 1 Capaian NKO

Berdasarkan nilai kinerja organisasi atau dapat disebut sebagai NKO selama Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Banyumas mendapatkan capaian sebesar 85,005%. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, NKO 80% < x ≤ 100% masuk ke dalam kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah berjalan sesuai target, bahkan beberapa di antaranya melampaui capaian yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan hasil, seperti pelaporan KTD/ESO, pengendalian AMR, pendampingan Kabupaten/Kota pangan aman,

serta indikator layanan publik dan tata kelola organisasi. Selain itu, sasaran strategis mengenai penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan masih belum tercapai. Kondisi ini menjadi perhatian khusus yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penyesuaian strategi pengawasan agar lebih responsif terhadap dinamika lapangan.

Secara keseluruhan, capaian NKO sebesar 85,005% pada Triwulan II Tahun 2026 menegaskan bahwa kinerja Balai POM di Banyumas telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian, memperbaiki indikator yang belum berjalan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan di triwulan berikutnya. Dengan langkah tindak lanjut yang terarah, diharapkan kinerja Balai POM di Banyumas dapat terus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan serta mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM secara nasional.

Berikut dapat terlihat lebih rinci mengenai kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026 atau dapat dikatakan sebagai capaian dalam Semester I Tahun 2026.

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan II 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41%	87,41%			93,38%	106,83	SANGAT BAIK	106,83
		IKSS2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.00%				0	0,00	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW II 2026	
		IKSS3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,00%	77,00%			78,75%	102,27	SANGAT BAIK	102,27
		IKSS4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%			100	100	BAIK	100
		IKSS5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%	87%			92,50%	106,32	SANGAT BAIK	106,32
		IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03%	96,03%			96,25%	100,23	SANGAT BAIK	100,23
		IKSS7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67%	91,67%			93,33%	101,81	SANGAT BAIK	101,81

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan II 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%	83%			84,13%	101,36	SANGAT BAIK	101,36
		IKSS9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09%	96,09%			100%	104,07	SANGAT BAIK	104,07
		IKSS10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33%	77,33%			80%	103,45	SANGAT BAIK	103,45
		IKSS11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38%	94,38%			94,42%	100,04	SANGAT BAIK	100,04
		IKSS12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36%	87,36%			94,44%	108,10	SANGAT BAIK	108,10
		IKSS13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%					0,00	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW II 2026	

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan II 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,5	6,5			6,65	102,31	SANGAT BAIK	102,31
		IKSS15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50%				0	0,00	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW II 2026	
Capaian SS1									103,07	SANGAT BAIK	
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSS16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63,00	37,50			37,50	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS2									100,00	BAIK	
SS3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	89,25			90,33	101,21	SANGAT BAIK	101,21
		IKSS18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	70%			70%	100,00	BAIK	100,00
		IKSS19	Jumlah desa pangan aman	1	72%			72%	100,00	BAIK	100,00

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan II 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70%			10%	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS3									100,30	SANGAT BAIK	
SS4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSS21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37,25	50%			53,33	106,66	SANGAT BAIK	108,35
Capaian SS4									106,66	SANGAT BAIK	
SS5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	10			0	0	KURANG	0
Capaian SS5									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	
SS6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91,00	50,00			50,00	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS6									100,00	BAIK	

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan II 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS7	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSS24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,22				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS7									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSS25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM					0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS26	Nilai AKIP UPT BPOM	78,96				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS8									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	
Total Capaian Sasaran Strategis									**85,005**	**BAIK**	

Tabel 3. 2 Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Banyumas

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan II 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41%	87,41%			93,38%	106,83	SANGAT BAIK	106,83
		IKSS2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.00%				0	0	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW II 2026	
		IKSS3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,00%	77,00%			78,75%	102,27	SANGAT BAIK	102,27
		IKSS4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%			100%	100	BAIK	100
		IKSS5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%	87%			92,50%	106,32	SANGAT BAIK	106,32
		IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03%	96,03%			96,25%	100,23	SANGAT BAIK	100,23
		IKSS7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67%	91,67%			93,33%	101,81	SANGAT BAIK	101,81
		IKSS8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%	83%			84,13%	101,36	SANGAT BAIK	101,36
		IKSS9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09%	96,09%			100%	104,07	SANGAT BAIK	104,07
		IKSS10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33%	77,33%			80,00%	103,45	SANGAT BAIK	103,45
		IKSS11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38%	94,38%			94,42%	100,04	SANGAT BAIK	100,04
		IKSS12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36%	87,36%			94,44%	108,1	SANGAT BAIK	108,1
		IKSS13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%					0	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW II 2026	
		IKSS14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,5	6,5			6,65	102,31	SANGAT BAIK	102,31
		IKSS15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50%				0	0	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW II 2026	
Capaian SS1									103,07	SANGAT BAIK	

Gambar 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 103,07%. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kategori pencapaian pada sasaran strategis ini adalah **SANGAT BAIK**. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengawasan, mulai dari tindak lanjut terhadap sampel berisiko, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, hingga pengawasan iklan dan label produk tembakau serta rokok elektronik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari

konsistensi penerapan standar pengawasan, pemanfaatan laboratorium pengujian sesuai standar kemampuan, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Meskipun capaian indikator pada sasaran strategis ini tergolong sangat baik, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi hasil di triwulan berikutnya. Hal ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan.

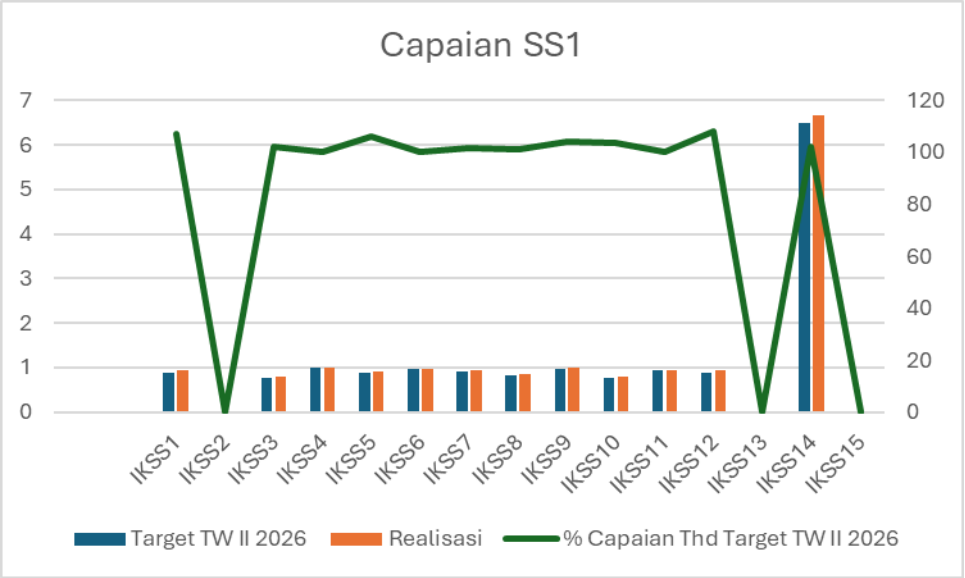

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Sasaran Strategis 1

IKSS 1: Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman *sampling* dan pengujian. Tindak lanjut daripada pengawasan sampel ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah sebesar 93,38%, jika dibandingkan dengan target 87,41 %, maka capaian sampai dengan sebesar 106,83% berada dalam kategori **SANGAT BAIK**. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, serta ketidaksesuaian

pelaporan monitoring penarikan. Capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan sistem pengawasan sediaan farmasi yang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87,41			93,38	106,83 Sangat Baik

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,43	93,38	98,89

Tabel 3. 4 Capaian IKSS 1 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 93,38% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan I sebesar 94,43%, maka capaian terhadap triwulan sebelumnya adalah 98,89%. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian indikator pada Triwulan II tetap berada dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan realisasi sebesar 93,38% (106,83% dari target), angka ini sedikit menurun dibandingkan Triwulan I. Pergerakan

naik turun ini merupakan dinamika yang wajar dalam siklus pengawasan, karena dipengaruhi oleh variasi jumlah dan kompleksitas sampel yang ditindaklanjuti pada setiap periode. Meskipun terjadi sedikit penurunan, capaian tetap menunjukkan efektivitas tindak lanjut sampel sesuai perencanaan strategis. Balai POM di Banyumas senantiasa memaksimalkan kondisi dan kapabilitas yang dimiliki, baik melalui peningkatan akurasi pengujian, konsistensi pelaporan, maupun koordinasi lintas sektor, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan kinerja dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,38	87,41	106,83	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 5 Perbandingan IKSS 1 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi Indeks Kinerja Sasaran Strategis Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 93,38%. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 87,41%, maka capaian terhadap target tahunan mencapai 106,83% dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Hasil ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan perencanaan strategis, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan kegiatan *sampling* sediaan farmasi dalam Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa penyebab keberhasilan IKU ini dalam melebihi targetnya yakni:

- Kegiatan yang dilakukan telah mengikuti pedoman *sampling*, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait, serta pembinaan dan pendampingan

kepada pelaku usaha yang berdampak jumlah sampel komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan, hasil uji laboratorium memenuhi syarat.

- Komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai taggung jawabnya menjadi faktor penting yang memastikan penyelesaian tugas secara tepat waktu.
- Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU turut memperkuat konsistensi pelaksanaan tindak lanjut.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampai dengan Triwulan II ini tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Capaian saat ini telah melebihi target untuk dapat dipertahankan. Di sisi lain perencanaan yang telah di susun akan dikerjakan sesuai dengan *timeline* dengan memperhatikan kapabilitas secara optimal.	Melanjutkan *sampling* sediaan farmasi yang sesuai dengan perencanaan yang disusun hingga akhir periode agar target mampu terus terpenuhi.	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/01	Masih tingginya produk sediaan farmasi yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan

Tabel 3. 6 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 1

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan petugas sampling dan penguji di laboratorium sehingga dapat diantisipasi penolakan sampel karena ada kendala di pengujian.
- Menjalin komunikasi lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium jika terdapat kendala terkait sampling dan pengujian.

- Memastikan kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, dan kesesuaian pelaporan monitoring penarikan serta pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana.

IKSS 2: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO

Target persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2026 ditetapkan dalam rentang periode setahun yaitu 27%. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dibagi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah telah diberikan KIE terkait farmakovigilans. Target tersebut tidak ditetapkan setiap triwulan namun dihitung berdasarkan jumlah kumulatif fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dalam setahun, yaitu 27 % dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO tidak di *break down* secara spesifik setiap triwulan, melainkan capaian kumulatif hingga akhir tahun. Hingga akhir TW II 2026, terdapat 22 (48,89%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah melaporkan KTD/ESO dari 45 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi Farmakovigilans (KIE PV). Persentase capaian target sementara hingga akhir TW II 2026 yaitu 181,1% dari target tahunan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	Target tidak dipecah setiap TW (target tahunan)	22	45	48,89%	Capaian akhir dihitung pada akhir tahun. Capaian sementara hingga TW

						II 2026 adalah 181,1%,

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja KTD/ESO Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	0	0	Tidak dapat dibandingkan karena IKU ini belum bisa terhitung

Tabel 3. 8 Capaian IKSS 2 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO dibagi dengan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans. Karena kegiatan KIE Farmakovigilans baru dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 (TW II), maka capaian TW I 2026 tidak dapat dihitung.

KIE Farmakovigilans dilakukan secara hybrid pada tanggal 21 Mei 2026 dengan mengundang 45 perwakilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. Sampai akhir Juni 2026, terdapat 22 atau (48,49%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah melaporkan KTD/ESO. Capaian ini sudah jauh melampaui target tahunan yang di tetapkan Badan POM yakni 27%.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	48,49%	27%	181,1%	Sudah jauh melampaui target tahunan 

Tabel 3. 9 Perbandingan IKSS 2 dengan Target Tahunan 2026

Kegiatan KIE Farmakovigilans secara hybrid baru terlaksana pada tanggal 21 Mei 2026, mengundang 45 perwakilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. Sampai akhir Juni 2026, terdapat 22 atau (48,49%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Capaian ini sudah jauh melampaui target tahunan yang di tetapkan Badan POM yakni 27%. Persentase capaian target hingga TW II 2026 adalah 181,1% dari target tahunan yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO telah melebihi target tahunan yang ditentukan yaitu 48,89%. Pada bulan Juni 2026 realisasi target tahunan telah mencapai 181,1% dari target yang ditetapakan. Keberhasilan ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

1) Pemberian KIE PV kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Balai POM Banyumas meningkatkan pemahaman saryankes terkait pentingnya Farmakovigilans dan pelaporan KTD/ESO.

2) Meningkatnya kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO, hampir 50% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE PV telah menyampaikan laporan KTD/ESO melalui aplikasi e-meso 2.0.

3) Perubahan paradigma / pola pikir Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait kriteria pelaporan KTD/ESO yang dapat dilaporkan. Banyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan

tidak mengetahui bahwa semua jenis KTD/ESO dapat dilaporkan, tidak hanya kriteria serius saja.

4) Follow up dan penggalian informasi secara intensif secara online dan offline terhadap seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE PV untuk mengidentifikasi dan menggali lebih jauh adanya keluhan KTD/ESO diterima oleh pasien terkait dengan penggunaan obat.

Meskipun realisasi TW II tahun 2026 telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, monitoring dan evaluasi berkala tetap diperlukan, terutama koordinasi linta sektor baik di tingkat pemerintah daerah serta organisasi profesi terkait.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	Meskipun target telah tercapai namun terdapat kendala yaitu peralihan aplikasi lama ke e-meso 2.0 belum berjalan mulus, sehingga menghambat srayankes menyampaikan laporan KTD/ESO	Melakukan follow up dan menyampaikan permasalahan teknis terkait aplikasi e-meso 2.0 ke PV Center dan Pusdatin	Terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum melakukan pelaporan KTD/ESO	Akhir tahun 2026	Y	INS/S/03	Sarana pelayanan kesehatan tidak menyampaikan laporan KTD/ESO sehingga target persentase pelaporan tidak tercapai.

Tabel 3. 10 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 2

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung realisasi target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2026, Balai POM Banyumas akan dilakukan sejumlah kegiatan diantaranya:

1. Pemberian KIE PV kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Balai POM Banyumas meningkatkan pemahaman saryankes terkait pentingnya Farmakovigilans dan pelaporan KTD/ESO.

2. Meningkatnya kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO, hampir 50% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE PV telah menyampaikan laporan KTD/ESO melalui aplikasi aplikasi e-meso 2.0.
3. Perubahan paradigma / pola pikir Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait kriteria pelaporan KTD/ESO yang dapat dilaporkan. Banyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mengetahui bahwa semua jenis KTD/ESO dapat dilaporkan, tidak hanya kriteria serius saja.
4. *Follow up* dan penggalian informasi secara intensif secara *online* dan *offline* terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE PV untuk mengidentifikasi dan menggali lebih jauh adanya keluhan KTD/ESO diterima oleh pasien terkait dengan penggunaan obat.

IKSS 3: Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel Pangan Olahan Berisiko yang dimaksud disini adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Pangan Olahan memiliki definisi dalam Manual Indikator Kinerja yakni makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mencapai 78,75%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 77%, maka capaian terhadap target tahunan adalah 102,27% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesesuaian target sampel dengan prioritas pengawasan, kesesuaian parameter uji dengan pedoman teknis BPOM, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan hasil pengujian, serta ketepatan waktu pelaksanaan sampling dan pelaporan hasil pengujian. Selain itu, tindak lanjut yang dilakukan juga sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan ketentuan lainnya, sehingga hasil pengawasan memiliki validitas ilmiah sekaligus legitimasi regulatif. Kombinasi antara penerapan pedoman teknis, disiplin waktu, serta konsistensi tindak lanjut menjadikan capaian indikator ini berada dalam kategori SANGAT BAIK, sekaligus mencerminkan efektivitas pengawasan pangan olahan berisiko oleh Balai POM di Banyumas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	77			78,75	102,27 Sangat Baik

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sampel Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	82,50	78,75	95,46

Tabel 3. 12 Capaian IKSS 3 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 78,75%, jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I sebesar 82,50%, maka capaian relatif terhadap triwulan sebelumnya adalah 95,46%. Pergerakan turun ini merupakan dinamika yang wajar dalam siklus pengawasan, karena setiap periode dipengaruhi oleh variasi jumlah dan kompleksitas sampel yang ditindaklanjuti. Meskipun terjadi sedikit penurunan, capaian tetap berada dalam kategori SANGAT BAIK dengan pencapaian 102,27% terhadap target tahunan,

yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut sampel pangan olahan telah berjalan efektif dan sesuai perencanaan strategis.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,75	77	102,27	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 13 Perbandingan IKSS 3 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II adalah 78,75 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 77 %, capaian terhadap target tahunan 2026 adalah 102,27 % dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Balai POM di Banyumas senantiasa memaksimalkan kondisi dan kapabilitas yang dimiliki, baik melalui penerapan pedoman teknis, peningkatan akurasi pengujian, maupun koordinasi lintas sektor, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan kinerja dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaan kegiatan sampling pangan olahan berisiko pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang mendukung capaian indikator hingga melampaui target. Pertama, kegiatan sampling telah mengikuti pedoman sampling, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan dalam SOP terkait. Selain itu, dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan sehingga jumlah sampel komoditi pangan yang diuji memenuhi ketentuan, dengan hasil uji laboratorium yang sesuai persyaratan. Kedua, perencanaan sampling yang baik serta komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai rencana kerja (renlak) yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian, memastikan pelaksanaan berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Ketiga, monitoring

rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU turut memperkuat konsistensi pelaksanaan tindak lanjut, sehingga hasil pengawasan pangan olahan berisiko tetap terjaga kualitasnya.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Dalam melaksanakan kegiatan tidak terdapat kendala yang berarti.	Capaian kinerja dan anggaran harus tetap diperhatikan dalam pencapaian. Dengan kapabilitas yang dimiliki dapat melakukan pencapaian target yang optimal.	Melaksanakan kegiatan *sampling* yang telah direncanakan hingga akhir periode nanti.	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/02	Masih tingginya produk sediaan pangan olahan yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan

Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 3

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh sinergi beberapa program teknis yang dijalankan secara konsisten, yakni:

- Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di awal tahun dengan memperhatikan ketersediaan reagen/media serta baku pembanding, kondisi instrumen uji, sehingga memperlancar proses pengujian sampel pangan olahan di laboratorium.
- Terjalin komunikasi intensif lintas substansi dan antarbalai dalam satu regional laboratorium, khususnya dalam perencanaan dan pengiriman sampel pangan olahan yang masuk skema regionalisasi.
- Pelaksanaan pengawasan memastikan kesesuaian sampling, parameter uji, akurasi kesimpulan, serta ketepatan pelaporan hasil sampling dan pengujian, termasuk

tindak lanjut sesuai pedoman dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan pada saat pemeriksaan sarana.

IKSS 4: Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT 100%, jika dibandingkan dengan target 100%, maka capaian pada TW II adalah 100% atau sesuai dengan target Triwulan II Tahun 2026. Terdapat 2 (dua) kejadian KLB KP yang terjadi pada bulan Mei 2026 yaitu 1 (satu) kejadian di Kabupaten Cilacap dan 1 (satu) kejadian di Kabupaten Banyumas, petugas BPOM Banyumas merespon cepat dengan melaksanakan pemeriksaan ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Sampel berupa pangan olahan dalam kemasan dan pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas Kesehatan Kabupaten). Balai POM di Banyumas juga telah melakukan sampling sampel pangan olahan dalam kemasan yaitu susu UHT dan telah mengirimkan sampel dugaan KLB KP tersebut ke Balai Besar POM di Semarang untuk dilakukan pengujian. Sedangkan untuk sampel pangan olahan siap saji telah dilakukan sampling dan dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Laporan akhir KLB KP yang telah disusun dan dilaporkan melalui aplikasi https://spimker.pom.go.id/.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100			100	100 Baik

Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja KLB Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	0	100	100

Tabel 3. 16 Capaian IKSS 4 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi IKSS 4 pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2026 sebesar 0. Pada triwulan I tahun 2026 ini tidak ada sampel KLB yang artinya tidak terhitung sebagai kinerja yang ditandai dengan tidak adanya sampel KLB yang dilakukan pengujian oleh Balai POM di Banyumas dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sedangkan pada triwulan II tahun 2026 terdapat 2 (dua) kasus KLP KP yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Banyumas dan telah dilakukan pemeriksaan ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat serta melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100%	100%	100%	Tercapai

Tabel 3. 17 Perbandingan IKSS 4 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi Triwulan II pada tahun 2026 sebesar 100%. Hingga Triwulan II terdapat 2 (dua) kasus KLB KP di wilayah kerja Balai POM di Banyumas dan terdapat sampel KLB yang diuji baik di laboratorium internal Badan POM maupun di laboratorium eksternal milik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Kinerja ini akan terus berjalan hingga akhir periode 2026. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% merupakan perhitungan sampel KLB yang harus diuji oleh Balai POM di Banyumas. Pembilang dan penyebut dalam penghitungan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) KLB ini merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan tersebut.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2026, pencapaian target pada IKSS 4 didukung oleh penanganan 2 (dua) kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan melalui pengujian sampel yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan hasil penelusuran epidemiologis. Pengujian memperhatikan kesesuaian dengan gejala klinis korban, masa inkubasi agen penyebab, serta keterkaitan antara pasangan bahaya dengan pangan yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaan PODK, pengujian senantiasa mengacu pada standar regulasi terkait pangan serta parameter yang tercantum dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM, sehingga hasil analisis memiliki validitas ilmiah sekaligus legitimasi regulatif. Keberhasilan ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang efektif, penerapan pedoman teknis yang konsisten, serta respons cepat terhadap kasus KLB, yang secara keseluruhan mendukung tercapainya target kinerja dan memperkuat sistem pengawasan pangan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II ini tidak menemui kendala.	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan	Pada TW II terdapat 2 (dua) kejadian KLB KP yang terjadi pada bulan Mei 2026, petugas BPOM Banyumas merespon cepat dengan	Akan melanjutkan kegiatan sesuai dengan ketentuan sampai	Y	INS/R/01	Tidak tercapainya Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh

			tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.	melaksanakan pemeriksaan ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat	Triwulan IV 2026			UPT

Tabel 3. 18 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 4

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian IKSS 4 pada Triwulan II Tahun 2026 tidak terlepas dari pelaksanaan program pengujian sampel yang dilakukan dengan parameter sesuai hasil penelusuran dugaan KLB Keracunan Pangan, meliputi kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, keterkaitan antara pasangan bahaya dengan pangan, serta permintaan uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Program ini menunjukkan penerapan metode analisis berbasis bukti yang konsisten dengan pedoman teknis BPOM. Selain itu, keberhasilan capaian juga ditunjang oleh peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, sehingga pengawasan dan pengujian pangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkualitas. Sinergi ini memungkinkan Balai POM di Banyumas untuk memperoleh pembaruan informasi terkait KLB secara cepat, sekaligus memastikan tindak lanjut pengawasan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, kombinasi antara ketepatan metode pengujian dan efektivitas koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya target kinerja pada IKSS 4.

IKSS 5: Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel PIRT berisiko adalah sampel pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman *sampling*.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 92,5 % jika dibandingkan dengan target 87 %, maka capaian sampai dengan TW II adalah 106,32 dengan kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling, ketepatan waktu pengambilan

sampel, serta ketepatan waktu pelaporan hasil sampling dan pengujian. Selain itu, tindak lanjut terhadap sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (TIE, rusak, kedaluwarsa, maupun TMS hasil pengujian) telah dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan ketentuan lainnya. Kombinasi antara penerapan pedoman teknis, disiplin waktu, serta konsistensi tindak lanjut menjadikan capaian indikator ini tetap berada dalam kategori **SANGAT BAIK**, sekaligus mencerminkan efektivitas pengawasan pangan olahan berisiko di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87			92,50	106,32 Sangat Baik

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sampel PIRT Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	92,50	97,37

Tabel 3. 20 Capaian IKSS 5 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 92,5% jika dibandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebesar 95%, maka capaian terhadap realisasi Triwulan sebelumnya

adalah 97,37%. Meskipun terjadi sedikit penurunan, capaian tetap berada dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan pencapaian 106,32% terhadap target tahunan, yang menunjukkan bahwa tindak lanjut sampel PIRT berisiko telah berjalan efektif serta sesuai dengan perencanaan strategis. Ke depannya, akan diperhatikan kembali capaian pada triwulan berjalan terhadap triwulan sebelumnya agar capaian lebih optimal dan tidak hanya berdasar kepada baseline target pada triwulan dan tahun tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,50	87	106,32	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 21 Perbandingan IKSS 5 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II adalah 92,50 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 87 %, capaian terhadap target tahunan 2026 adalah 106,32 % dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Hasil ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan perencanaan strategis, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor utama.

- Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel, serta ketepatan pelaporan hasil pengujian.
- Tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) dilakuakan

sesuai dengan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya, baik kepada pelaku usaha IRTP maupun lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP sebagai OPD penerbit SPP-IRT. Untuk kasus lintas wilayah, tindak lanjut dilaporkan ke pusat agar penanganan lebih komprehensif.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian Triwulan II Tahun 2026	Perencanaan kinerja dan anggaran untuk dapat diperhatikan secara menyeluruh agar mampu tercapai secara optimal.	Melanjutkan *sampling* PIRT sesuai renlak hingga akhir periode tahun 2026.	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/04	Masih tingginya produk sediaan pangan PIRT yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan

Tabel 3. 22 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 5

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 antara lain pelaksanaan sampling yang sesuai dengan pedoman, baik dari sisi kesesuaian target sampel PIRT, ketepatan waktu pengambilan, maupun ketepatan pelaporan hasil. Selain itu, tindak lanjut terhadap sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (TIE, rusak, kedaluwarsa, maupun TMS hasil pengujian) dilakukan secara sistematis sesuai pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya, sehingga penanganan kasus lebih terarah. Upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan industri rumah tangga juga menjadi bagian penting, khususnya dalam penerapan CPPB-IRT pada saat pemeriksaan sarana. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP sebagai OPD penerbit SPP-IRT senantiasa dilakukan untuk memastikan sinergi kelembagaan dalam mendukung efektivitas pengawasan. Dengan adanya program-program tersebut, pencapaian indikator tetap berada dalam kategori SANGAT BAIK dan mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan yang terintegrasi.

IKSS 6: Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti terdiri dari Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha ataupun *stakeholder*.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada tahun Triwulan II Tahun 2026, realisasi IKSS 6 adalah sebesar 96,25%, jika dibandingkan dengan target 96,03% maka capaiannya yaitu 100,23% dan berada dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini menegaskan bahwa keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, baik berupa pembinaan, peringatan, maupun tindak lanjut kasus, telah ditindaklanjuti secara konsisten oleh pelaku usaha maupun *stakeholder* terkait. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang dilaksanakan, mulai dari pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, hingga pengujian sampel, pengawasan iklan dan label, serta penanganan kasus dan pengaduan konsumen.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	96,03			96,25	100,23 Sangat Baik

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	96,88	96,25	99,35

Tabel 3. 24 Capaian IKSS 6 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026, nilai Indeks Kinerja Sasaran Strategis Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti pada Triwulan II mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa pelaku usaha yang belum menyampaikan perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan. Meskipun demikian, capaian pada Triwulan II tetap mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori SANGAT BAIK, menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tindak lanjut hasil inspeksi tetap berjalan efektif. Penurunan relatif ini bersifat sementara dan lebih disebabkan oleh faktor administratif dalam proses tindak lanjut, bukan karena lemahnya pengawasan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	96,25	96,03	100,23	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 25 Perbandingan IKSS 6 dengan Target Tahunan 2026

Dibandingkan dengan capaian target tahunan sebesar 96,03, nilai IKSS 6 pada TW II ini terdapat kenaikan. TW II Tahun 2026 ini memiliki nilai capaian IKSS adalah 100,23% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Dengan capaian yang melampaui target flat tahunan sesuai ketentuan manual IKU, indikator ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan akuntabilitas pengawasan, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dari ketidaksesuaian penerapan regulasi di bidang obat dan makanan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi maksimalnya capaian dari adalah:

1. Mengingatkan kepada penanggung jawab yang memiliki tugas menyusun surat rekomendasi/ keputusan untuk segera dilaksanakan dandikirimkankepada pelaku usaha / *stakeholder*.
2. Monitoring *feedback* dari rekomendasi yang diberikan agar segeraditindaklanjuti baik oleh pelaku usaha maupun stakeholder.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan.	Untuk selalu dapat berkomunikasi dengan pelaku usaha agar memudahkan proses yang sedang dilaksanakan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	TW IV	Y	INS/R/02	Tidak semua surat rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder seperti DKK dan asosiasi profesi secara tepat waktu.

Tabel 3. 26 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 6

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pemeriksaan sesuai rencana, tetapi juga ditunjang oleh adanya program/kegiatan yang memastikan tindak lanjut berjalan efektif. Salah satu kegiatan utama adalah *monitoring feedback* atas rekomendasi yang diberikan, sehingga pelaku usaha maupun *stakeholder* terdorong untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Program ini memastikan adanya siklus pengawasan yang berkelanjutan, di mana setiap rekomendasi tidak berhenti pada penerbitan keputusan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti hingga menghasilkan perbaikan nyata. Selain itu, keberhasilan juga ditunjang oleh koordinasi kelembagaan antara UPT dengan *stakeholder* terkait, sehingga tindak lanjut keputusan dapat dilakukan secara terintegrasi. Upaya ini diperkuat dengan evaluasi berkala untuk memantau efektivitas tindak lanjut dan mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi pelaku usaha.

IKSS 7: Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen Kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan.
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Kegiatan pemeriksaan dan tindaklanjut melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada tahun 2026, Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditargetkan sebesar 91,67% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas. Angka tersebut merupakan target baru yang diadopsi dari capaian tahun 2026. Sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan Balai POM di Banyumas meliputi Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam, dan produk kosmetik untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Bahan Alam, Industri Kosmetik golongan A dan B, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, dan Usaha Mikro Obat Tradisional. Pada Triwulan II tahun 2026, realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 93,33%, jika dibandingkan dengan target 91,67% maka capaian sampai dengan Triwulan I adalah 101,81% (Kategori **Sangat Baik**).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,67			93,33	101,81 Sangat Baik

Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	93,33	93,33

Tabel 3. 28 Capaian IKSS 7 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan TW II tahun 2026 sebanyak 8 (delapan) sarana yang terdiri dari sarana produksi obat bahan alam (IEBA, UKOT dan UMOT) dan sarana produksi kosmetik (IKOS Gol A dan B). Sarana-sarana tersebut diperiksa sesuai dengan target dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan administratif dan SLA yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti pada TW II memenuhi semua poin variabel pada LKE didapat angka 93,33%, dibandingkan dengan realisasi

TW I tahun 2026 sebesar 100%. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi di TW II sehingga tidak semua variabel penilaian terpenuhi. Namun, dengan angka yang dicapai pada TW II sebesar 93,33% masih lebih besar jika dibandingkan target tahun 2026 yaitu 91,67% dengan kategori **Sangat Baik.**

c. **Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan**

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,33	91,67	101,81	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 29 Perbandingan IKSS 7 dengan Target Tahunan 2026

Kegiatan ini akan terus berjalan hingga akhir periode tahun 2026 dengan target sampai dengan bulan Desember 2026 sebesar 91,67%. Dengan pelaksanaan pemeriksaan inspeksi pada TW II, secara optimis dapat dikawal capaian IKU Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat tercapai sesuai target di tahun 2026.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

- Penetapan target sarana produksi berdasarkan Analisa Risiko dan pembobotan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya setiap bulan;
- Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan;
- Kesesuaian dan ketepatan waktu tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan;

Analisis risiko terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif yang dilakukan:

- Capaian kinerja pada IKSS 7 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek GMP (CPOB, CPOTB, dan CPKB).
- Instruksi khusus dari pusat maupun pelaporan dari masyarakat yang memberikan andil dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi farmasi tidak dilakukan sesuai dengan jadwal dan tim yang telah ditetapkan. Hal tersebut berisiko kualitas tindak lanjut dan pemenuhan SLA tidak optimal.

Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

- Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak revisi dan penjadwalan yang sesuai dengan beban di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
- Melakukan Monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindaklanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemeriksaan sarana bulan Juni tidak sesuai renlak yang disampaikan ke Dit. Was OTSK dikarenakan sarana target tutup sehingga dialihkan ke sarana lain. Pemeriksaan sarana selanjutnya merupakan inspeksi rutin sekaligus untuk menindaklanjuti temuan inspeksi	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	TW IV 2026	Y	INS/O/03	Sarana produksi farmasi yang sudah tidak aktif, tidak melakukan pencabutan izin sarana sehingga akan selalu terdata di sistem BPOM. Pemeriksaan sarana produksi tidak tepat sasaran.

		sebelumnya yang masih berkaitan.						

Tabel 3. 30 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 7

e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja:

- Penanggung Jawab perencanaan anggaran dan kegiatan untuk IKSS 7 melakukan rencana pelaksanaan yang adaptif sehingga apabila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab IKSS 7 membuat renlak revisi dan penjadwalan yang disesuaikan di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun dan mencapai target;
- Melakukan Monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.
- Peningkatan kompetensi SDM petugas inspeksi, pada tahun 2025 terjadi peningkatan personil yang telah mendapatkan sertifikat inspektur CPKB dan CPOTB.

IKSS 8: Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Kegiatan pemeriksaan dan tindaklanjut dilakukan sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut

2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada tahun 2026, Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditargetkan sebesar 83% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas. Angka tersebut merupakan target baru yang diadopsi dari capaian tahun 2025. Sarana produksi pangan olahan yang menjadi target pemeriksaan Balai POM di Banyumas meliputi Sarana yang melakukan pembuatan pangan olahan meliputi sarana produk pangan MD dan PIRT. Pada Triwulan II tahun 2026, realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 84,13%, jika dibandingkan dengan target 83% maka capaian sampai dengan Triwulan I adalah 101,36% (Kategori **Sangat Baik**).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83			84,13	101,36 Sangat Baik

Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,71	84,13	98,16

Tabel 3. 32 Capaian IKSS 8 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan TW II tahun 2026 sebanyak 21 sarana yaitu sarana produksi pangan MD dan PIRT. Sarana tersebut diperiksa sesuai dengan target dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan administratif dan SLA yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti memenuhi semua poin variabel pada LKE didapat angka 84,13% dibandingkan dengan realisasi TW I tahun 2026 sebesar 85,71%. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi di TW II sehingga tidak semua variabel penilaian terpenuhi. Namun, dengan angka yang dicapai pada TW II sebesar 84,13% masih lebih besar jika dibandingkan target tahun 2026 yaitu 83%.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan I 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	84,13	83	101,36	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 33 Perbandingan IKSS 8 dengan Target Tahunan 2026

Kegiatan ini akan terus berjalan hingga akhir periode tahun 2026 dengan target sampai dengan bulan Desember 2026 sebesar 83%. Dengan pelaksanaan pemeriksaan inspeksi pada TW II, secara optimis dapat dikawal capaian IKU Persentase Sarana

Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat tercapai sesuai target di tahun 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

- Penetapan target sarana produksi berdasarkan Analisa Risiko dan pembobotan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya setiap bulan;
- Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan;
- Kesesuaian dan ketepatan waktu tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan;

Analisis risiko terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif yang dilakukan:

- Capaian kinerja pada IKSS 8 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek GMP (CPPOB dan IRTP).
- Instruksi khusus dari pusat maupun pelaporan dari masyarakat yang memberikan andil dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tidak dilakukan sesuai dengan jadwal dan tim yang telah ditetapkan. Hal tersebut berisiko kualitas tindak lanjut dan pemenuhan SLA tidak optimal.

Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

- Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak revisi dan penjadwalan yang sesuai dengan beban di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
- Melakukan Monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindaklanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala yang berarti	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.	Membuat decission tree untuk tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.	TW IV 2026	Y	INS/O/04	Sarana produksi pangan olahan yang sudah tidak aktif, tidak melakukan pencabutan izin sarana sehingga akan selalu terdata di sistem BPOM. Pemeriksaan sarana produksi tidak tepat sasaran.

Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 8

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja:

- Penanggung Jawab perencanaan anggaran dan kegiatan untuk IKSS 7 melakukan rencana pelaksanaan yang adaptif sehingga apabila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab IKSS 7 membuat renlak revisi dan penjadwalan yang disesuaikan di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun dan mencapai target;
- Melakukan Monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.
- Peningkatan kompetensi SDM petugas inspeksi, pada tahun 2025 terjadi peningkatan personil yang telah mendapatkan sertifikat *Food Inspector Junior*.

IKSS 9: Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Fasilitas distribusi farmasi yang dimaksudkan adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target yaitu 96,09%, capaian terhadap IKSS 9 adalah 104,07% dengan kriteria SANGAT BAIK. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sarana distribusi sediaan farmasi telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan capaian yang melampaui target, indikator ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem pengawasan sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Banyumas, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dari potensi risiko distribusi produk yang tidak sesuai standar. Rincian capaian IKSS 9 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa	96,09			100	104,07 Sangat Baik

	dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					

Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100

Tabel 3. 36 Capaian IKSS 9 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi indikator kinerja utama Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 yaitu 100%, maka capaian relatif terhadap realisasi Triwulan sebelumnya adalah 100%, menunjukkan konsistensi pelaksanaan pengawasan. Hasil ini menegaskan bahwa kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi telah berjalan stabil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan pemeriksaan, serta komitmen petugas dalam menjaga kualitas pengawasan, sehingga indikator tetap berada dalam kategori SANGAT BAIK dan memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan masyarakat dari risiko distribusi produk farmasi yang tidak sesuai standar.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	96,09	104,07	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 37 Perbandingan IKSS 9 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 96,09 %, capaian terhadap target tahunan 2026 adalah 104,07 % dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan ditetapkan secara tetap (flat), realisasi triwulan telah mampu melampaui angka tersebut, mencerminkan efektivitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan pemeriksaan, serta ketepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas. Dengan capaian yang melebihi target tahunan, indikator ini memberikan bukti nyata bahwa pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Banyumas berjalan optimal dan berkontribusi langsung terhadap penguatan sistem perlindungan masyarakat dari risiko distribusi produk yang tidak sesuai standar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS 9 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, penetapan target sarana distribusi dilakukan berdasarkan analisis risiko sehingga pelaksanaan pemeriksaan lebih terarah dan sesuai prioritas. Kedua, ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan oleh petugas melalui SIPT memastikan data capaian dapat dimonitor secara akurat dan tepat waktu. Ketiga, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku

dengan ketepatan waktu yang terjaga, sehingga efektivitas pengawasan tetap konsisten. Keempat, keberadaan database sarana distribusi yang lengkap untuk tiap komoditi memudahkan penentuan target pemeriksaan dan mempercepat proses pengawasan. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, capaian indikator tidak hanya memenuhi target tetapi juga melampaui, sekaligus mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan Balai POM di Banyumas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampai dengan Triwulan II ini tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan	Capaian saat ini telah melebihi target untuk dapat dipertahankan. Di sisi lain perencanaan yang telah di susun akan dikerjakan sesuai dengan *timeline* dengan memperhatikan kapabilitas secara optimal	Melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sesuai dengan perencanaan yang disusun hingga akhir periode agar target mampu terus terpenuhi	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/06	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi sediaan farmasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan

Tabel 3. 38 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 9

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak hanya ditunjang oleh pelaksanaan pemeriksaan yang telah disusun dalam rencana kerja, tetapi juga oleh penerapan program kelembagaan yang memastikan konsistensi pengawasan. Salah satu program penting adalah ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan oleh petugas melalui SIPT, yang menjamin akurasi data capaian dan memudahkan monitoring secara berkala. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh kesesuaian tindak lanjut terhadap sarana distribusi sesuai pedoman yang berlaku, sehingga setiap hasil pemeriksaan

ditindaklanjuti secara tepat dan terstandar. Dengan adanya program-program tersebut, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan capaian yang melampaui target, memperkuat akuntabilitas Balai POM di Banyumas dalam melindungi masyarakat dari risiko distribusi produk farmasi yang tidak sesuai ketentuan.

IKSS 10: Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pemeriksaan disini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, sedangkan “diperiksa sesuai ketentuan” berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator kinerja utama mengenai Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 80%. Jika dibandingkan dengan target yaitu 77,33%, capaian terhadap IKSS 10 adalah 103,45% dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan bersifat flat sesuai dengan ketentuan manual IKU, realisasi triwulan telah mampu melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan cakupan pengawasan, ketepatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan, serta konsistensi tindak lanjut sesuai pedoman dan SOP yang berlaku. Rincian capaian IKSS 10 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	77,33			80	103,45 Sangat Baik

Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sarana Distribusi Pangan Olahan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan I Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	77,33	103,45

Tabel 3. 40 Capaian IKSS 10 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 80%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 yaitu 78,46%, capaian terhadap realisasi Triwulan sebelumnya adalah 103,45%. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas perencanaan cakupan pengawasan, ketepatan pelaksanaan pemeriksaan, serta konsistensi tindak lanjut sesuai pedoman dan SOP yang berlaku. Peningkatan capaian ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas berjalan semakin optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan konsumen.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa	80	77,33	103,45	Tercapai/ Melampaui

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				

Tabel 3. 41 Perbandingan IKSS 10 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 80 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 77,33 %, capaian terhadap target tahunan 2026 adalah 103,45 % dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Balai POM di Banyumas akan selalu berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan dengan optimal dan memperhatikan kebutuhan Masyarakat, khususnya di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS 10 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan oleh petugas melalui SIPT memastikan data capaian dapat dimonitor secara akurat dan sesuai jadwal. Kedua, penetapan serta pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai target yang telah ditentukan, disertai dengan monitoring dan evaluasi bulanan yang menjaga konsistensi pelaksanaan pengawasan. Ketiga, kesesuaian tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa sesuai pedoman yang berlaku, sehingga setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat dan terstandar. Ke depannya, Balai POM di Banyumas akan menjaga keberlanjutan koordinasi antar-petugas agar pelaporan tetap tepat waktu, meningkatkan kualitas monitoring bulanan, serta memastikan tindak lanjut dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap agar akuntabilitas pengawasan tetap terjaga.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 10	Persentase Sarana Distribusi Pangan	Sampai dengan Triwulan II ini tidak ada kendala yang	Capaian saat ini telah melebihi target untuk dapat	Melanjutkan pemeriksaan sarana pangan olahan yang	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/09	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha

	Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	berarti dalam melaksanakan kegiatan	dipertahankan. Di sisi lain perencanaan yang telah di susun akan dikerjakan sesuai dengan *timeline* dengan memperhatikan kapabilitas secara optimal	sesuai dengan perencanaan yang disusun hingga akhir periode agar target mampu terus terpenuhi				distribusi pangan olahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan

Tabel 3. 42 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 10

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak hanya ditunjang oleh pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang telah disusun, tetapi juga oleh penerapan program kelembagaan yang memastikan konsistensi pengawasan. Salah satu program penting adalah ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan oleh petugas melalui SIPT, yang menjamin akurasi data capaian serta memudahkan monitoring secara berkala. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh kesesuaian tindak lanjut terhadap sarana distribusi sesuai pedoman yang berlaku, sehingga setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat dan terstandar. Dengan adanya program-program tersebut, pengawasan sarana distribusi pangan olahan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan capaian yang melampaui target.

IKSS 11: Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Tahapan pengawasan iklan ini diantaranya evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi IKSS 11 adalah sebesar 94,42% jika dibandingkan dengan target 94,38%, maka capaian sampai dengan sebesar 100,04% berada dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara optimal. Kegiatan ini akan terus dipertahankan agar mampu mencapai targetnya pada kategori "Sangat Baik". Berikut tabel rincian pencapaian indikator kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	94,38			94,42	100,04 Sangat Baik

Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Iklan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	94,42	94,42	100

Tabel 3. 44 Capaian IKSS 11 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Capaian iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan II sama dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026, sehingga capaian yang didapat yakni 100%. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen, seiring dengan meningkatnya jumlah dan variasi produk serta intensitas peredaran iklan di berbagai media yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan komprehensif.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	94,42	94,38	100,04	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 45 Perbandingan IKSS 11 dengan Target Tahunan 2026

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi pengawasan iklan pada Triwulan II Tahun 2026 ini dapat tercapai karena kegiatan pengawasan telah dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya koordinasi yang baik, pemantauan secara rutin, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan turut mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Setelah dianalisa lebih lanjut, beberapa penyebab keberhasilan indikator kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam mencapai target diantaranya.

1. Masing-masing PIC Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan mempunyai target/ jadwal setiap bulannya (sudah terjadwal). Hal ini menunjukkan adanya konsistensi pelaksanaan tugas oleh masing-masing PIC dalam memastikan bahwa kegiatan pengawasan berjalan secara sistematis dan terukur.

2. Iklan juga diperoleh dari petugas yang melaksanakan dinas, baik dinas dalam kota maupun dinas luar kota untuk diberikan kepada PIC iklan dan dievaluasi, sehingga target iklan dapat terpenuhi. kegagalan). Mekanisme ini menjamin bahwa seluruh potensi iklan yang beredar dapat terpantau dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Adanya Evaluasi setiap Triwulan oleh Petugas Iklan pada Kedeputian II. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana monitoring, tetapi juga sebagai forum perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengawasan iklan tetap relevan dengan dinamika lapangan.

Dengan kombinasi antara perencanaan yang terjadwal, dukungan dari petugas lapangan, serta evaluasi berkala, indikator kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat mencapai target secara konsisten

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Kegiatan pengawasan iklan dalam Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat kendala yang berarti. Hal ini dicerminkan dengan capaian yang melebihi target.	Mempertahankan capaian yang mampu melebihi target yang telah direncanakan dengan memperhatikan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas. Selain itu, tetap memperhatikan serapan anggaran agar tercapai secara maksimal.	Melanjutkan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang sesuai renlak pada Triwulan III disertai evaluasi berkelanjutan.	Triwulan III Tahun 2026	Y	INS/S/10	Masih terdapat iklan yang tidak memenuhi ketentuan

Tabel 3. 46 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 11

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya bergantung pada jumlah iklan yang diawasi, tetapi juga pada

ketepatan waktu petugas dalam melaksanakan pengawasan sesuai rencana pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Ketepatan waktu ini menjadi indikator penting karena menunjukkan konsistensi pelaksanaan tugas serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan dan kesesuaian hasil evaluasi sesuai dengan pedoman.

IKSS 12: Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi Indeks Kinerja Sasaran Strategis Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar mencapai 94,44%. Jika dibandingkan dengan target triwulan sebesar 87,36%, maka capaian terhadap IKSS 12 adalah 108,10% dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap label produk tembakau dan rokok elektronik telah dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian capaian IKSS 12 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	87,36			94,44	108,10 Sangat Baik

Tabel 3. 47 Capaian Indikator Kinerja Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91,67	94,44	103,02

Tabel 3. 48 Capaian IKSS 12 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar mencapai 94,44%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan I sebesar 91,67%, maka capaian relatif terhadap triwulan sebelumnya adalah 103,02%, menunjukkan adanya peningkatan. Hasil ini menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap label produk tembakau dan rokok elektronik telah berjalan lebih efektif dan konsisten dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan penerapan pedoman pengawasan, ketepatan waktu pelaporan, serta komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Dengan capaian yang melampaui target triwulan, indikator ini berada dalam kategori SANGAT BAIK, sekaligus memperkuat bukti bahwa strategi pengawasan yang diterapkan Balai POM di Banyumas mampu meningkatkan kualitas kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik.

c. **Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan**

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	94,44	87,36	108,10	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 49 Perbandingan IKSS 12 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi daripada indikator kinerja utama Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 91,67%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yaitu 87,36%, capaian terhadap IKSS 12 adalah 104,93% dengan kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengawasan pelabelan produk tembakau dan rokok elektronik telah dilaksanakan secara disiplin sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus memperlihatkan peningkatan efektivitas pengawasan dibandingkan periode sebelumnya. Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan konsistensi penerapan standar, tetapi juga menegaskan komitmen Balai POM di Banyumas dalam memastikan informasi yang tercantum pada label produk tembakau dan rokok elektronik tidak menyesatkan konsumen. Dengan capaian yang melampaui target, indikator ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi serta memperkuat peran pengawasan dalam perlindungan masyarakat.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pengawasan kegiatan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor operasional yang terjadi langsung di lapangan. Pertama, PIC pengawasan label telah menetapkan target dan jadwal pengawasan secara rutin setiap bulan, sehingga kegiatan pengawasan berjalan terstruktur dan konsisten sesuai rencana. Kedua, adanya dukungan dari tim yang sedang bertugas dinas, baik di dalam maupun luar kota, turut membantu dalam

pencarian atau pembelian sampel produk tembakau dan rokok elektronik dengan berkoordinasi bersama PIC. Sinergi antara penjadwalan yang jelas dan dukungan tim lapangan ini menjadi penyebab langsung keberhasilan capaian indikator, karena memastikan ketersediaan sampel sesuai kebutuhan serta kelancaran proses pengawasan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Tidak terdapat kendala yang berarti	Perencanaan kinerja dan anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode.	Melaksanakan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan hingga akhir periode tahun 2026.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/05	Tidak tercapainya presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

Tabel 3. 50 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 12

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan secara terstruktur melalui penerapan ketepatan waktu petugas dalam melakukan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Ketepatan waktu ini menjadi indikator penting karena memastikan setiap tahapan pengawasan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan melalui pelaporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, serta melalui kesesuaian hasil evaluasi dengan pedoman yang berlaku. Dengan adanya mekanisme program ini, pengawasan tidak hanya konsisten tetapi juga akuntabel, sehingga capaian indikator dapat melampaui target sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan di bidang perlindungan konsumen.

IKSS 13: Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Target Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan target yang ditetapkan dalam satu tahun berjalan, persentase akhir dihitung secara kumulatif, tidak di *break down* setiap triwulan. Capaian Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT pada TW II sebagai berikut:

- Persentase penggunaan *tools* pengawasan AMR pada Pemeriksaan apotek tercapai 100% (Target penggunaan tools AMR 85%). Tools AMR telah dielaborasi dalam *tools* pengawasan apotek.
- Persentase Kegiatan Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba sudah terlaksana 2 (dua) kali (target 1 kali setahun) yaitu kegiatan advokasi lintas sektor dengan DinaKesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Persentase Bahan publikasi terkait pengendaian Resistensi Antimikroba telah terealisasi setiap triwulan, dan sudah terlaksana pada TW I dan II tahun 2026.
- KIE AMR kepada masyarakat (1 kali setahun), target telah terealisasi pada TW II 2026 (Bulan April 2026).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	0			0	Capaian di Akhir Periode

Tabel 3. 51 Capaian Indikator Kinerja Pengendalian AMR Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	0	0	Capaian muncul pada akhir periode

Tabel 3. 52 Capaian IKSS 13 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Jika dibandingkkan realisasi kinerja TW II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja TW I sebelumnya, capaian kinerja TW II tahun 2026 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase penggunaan tools pengawasan AMR pada Pemeriksaan apotek tercapai 100% (Target penggunaan *tools* AMR 85%). *Tools* AMR telah dielaborasi dalam tools pengawasan apotek.
- Persentase Kegiatan Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba sudah terlaksana 2 (dua) kali (target 1 kali setahun) yaitu kegiatan advokasi lintas sektor dengan DinaKesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Persentase Bahan publikasi terkait pengendaian Resistensi Antimikroba telah terealisasi setiap triwulan, dan sudah terlaksana pada TW I dan II tahun 2026.
- KIE AMR kepada masyarakat (1 kali setahun), target telah terealisasi pada TW II 2026 (Bulan April 2026).

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang	0	100	0	Perlu Upaya Keras (Akan

Diawasi Sesuai Standar				tercapai pada akhir periode) ▼

Tabel 3. 53 Perbandingan IKSS 13 dengan Target Tahunan 2026

Meskipun belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, banyak realisasi TW II sudah dilakukan yaitu:

- Persentase 85% penggunaan tools pengawasan AMR pada Pemeriksaan apotek telah tercapai 100%. Karena pemeriksaan Apotek selalu menggunakan *tools* pengawasan AMR.
- Persentase Kegiatan Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (target 1 kali setahun), sudah terlaksana 2 (dua) kali yaitu kegiatan advokasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Persentase Bahan publikasi terkait pengendaian Resistensi Antimikroba telah tercapai setiap triwulan, dan sudah terlaksana pada TW I dan II tahun 2026.
- Target KIE AMR kepada masyarakat (1 kali setahun), telah terealisasi pada TW II 2026 (Bulan April 2026).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum, capaian kinerja TW II sudah berjalan baik, beberapa target tahunan seperti Persentase Kegiatan Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba dan KIE AMR kepada masyarakat sudah terlaksana sebelum akhir tahun. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain:

1. Kegiatan KIE AMR kepada masyarakat dapat dielaborasi dengan kegiatan fungsi lain seperti fungsi informasi dan komunikasi.
2. *Tools* pengawasan AMR telah terakomodir dan menjadi bagian dalam chekilst pemeriksaan apotek. Setiap petugas yang memeriksa apotek harus mengisi tools pengawasan terkait AMR.

3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi Balai POM Banyumas dengan pemerintah daerah setempat, yang memudahkan follow up dan monitoring serta pemanfaatan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dintervensi dengan program AMR.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 13	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Tidak ada kendala, masih berjalan sesuai rencana	Kegiatan akan dilakukan sesuai rencana	Melakukan Bimtek AMR ke apotek Melakukan publikasi AMR serta Penggunaan *tools* AMR dalam pemeriksaan.	Akhir tahun 2026	Y	INS/O/05	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan di masyarakat.

Tabel 3. 54 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 13

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT pada TW II tidak lepas dari keberhasilan program sebagai berikut:

- Elaborasi kegiatan KIE AMR kepada masyarakat pada kegiatan fungsi informasi dan komunikasi.
- Elaborasi *tools* pengawasan AMR cheklist pemeriksaan apotek.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Balai POM Banyumas dengan pemerintah daerah setempat, terkait pemanfaatan kegiatan yang dapat diintervensi terkait pengendalian resistensi antimikroba.

IKSS 14: Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan

Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Balai POM di Banyumas termasuk sebagai Laboratorium Tingkat 2. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam penetapan target pemenuhan standar kemampuan laboratorium yang harus dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW I 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	6,5			6,65	102,31 Sangat Baik

Tabel 3. 55 Capaian Indikator Kinerja Laboratorium Pengujian Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, target indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ditetapkan sebesar 6,5 sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Adapun realisasi yang berhasil dicapai sampai dengan akhir Triwulan II adalah sebesar 6,65. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, tingkat pencapaian indikator kinerja mencapai 102,31% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, kinerja indikator pada Triwulan II Tahun 2026 termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	6,12	6,65	108,66

Tabel 3. 56 Capaian IKSS 14 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I, realisasi indikator tercatat sebesar 6,12, sedangkan pada Triwulan II meningkat menjadi 6,65. Secara umum, hasil perbandingan antartriwulan menggambarkan bahwa capaian indikator mengalami tren yang meningkat dari Triwulan I ke Triwulan II. Realisasi pada Triwulan II tidak hanya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, tetapi juga telah melampaui target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator terus bergerak ke arah yang lebih baik dan memberikan gambaran positif terhadap pencapaian target kinerja tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	6,65	7,5	88,67	Akan Tercapai 

Tabel 3. 57 Perbandingan IKSS 14 dengan Target Tahunan 2026

Target tahunan indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2026

ditetapkan sebesar 7,5 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2026, realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 6,65. Apabila realisasi Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahunan, maka tingkat pencapaian kinerja mencapai 88,67% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian indikator termasuk dalam kriteria akan tercapai, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target tahunan telah terpenuhi hingga periode Triwulan II. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II telah mendekati target tahunan yang ditetapkan. Secara umum, perkembangan capaian hingga Triwulan II menunjukkan bahwa indikator berada pada jalur yang sesuai untuk memenuhi target tahunan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator adalah:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup melalui verifikasi metode analisa ONAPPZA secara rapid test. Upaya ini berhasil meningkatkan kemampuan laboratorium. Namun demikian, implementasi metode tersebut belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium, sehingga pemenuhan target ruang lingkup masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

2. Pengadaan test kit dan reagen yang dibutuhkan untuk mendukung dalam meningkatkan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Pemenuhan Kompetensi Laboratorium.

   Pengadaan rapid test kit dan reagen telah mendukung kelancaran pelaksanaan pengujian dan memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan dalam kegiatan laboratorium. Namun demikian, peningkatan kapasitas laboratorium belum dapat dicapai secara maksimal karena belum didukung oleh ketersediaan peralatan laboratorium yang memadai akibat keterbatasan anggaran. Sebagai alternatif solusi, dilakukan perencanaan kebutuhan reagen dan bahan habis pakai secara lebih efektif sesuai skala prioritas.

3. Melakukan pengembangan kompetensi untuk personel pengujian.

   Pengembangan kompetensi personel telah dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendukung kemampuan teknis penguji. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel. Namun demikian, kompetensi penguji pada bidang pengujian kimia dan

mikrobiologi masih terbatas sehingga belum seluruh metode pengujian dapat dilaksanakan secara mandiri. Untuk mengatasi kondisi tersebut, akan terus dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis agar kompetensi personel semakin meningkat.

4. Pengusulan permintaan anggaran untuk pembelian alat laboratorium.

   Pengusulan anggaran telah dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan peralatan laboratorium yang mendukung pengembangan ruang lingkup pengujian. Namun, hingga saat ini, usulan tersebut belum dapat direalisasikan sehingga kebutuhan alat laboratorium masih belum terpenuhi.

Meskipun beberapa upaya yang dilakukan Balai POM di Banyumas untuk mencapai target, masih terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Keterbatasan gedung, sarana, dan prasarana laboratorium

   Belum tersedianya gedung laboratorium beserta sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan operasional menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Kondisi ini membatasi pengembangan ruang lingkup pengujian serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengujian.

2. Tidak adanya anggaran untuk pembelian alat laboratorium.

   Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pengadaan peralatan laboratorium maupun peningkatan kapasitas laboratorium secara menyeluruh. Dampaknya, beberapa rencana pengembangan belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.

3. Terbatasnya kemampuan kompetensi penguji di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi.

   Kondisi ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah personel yang memiliki kompetensi spesifik pada metode pengujian tertentu, serta belum seluruh penguji memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun bimbingan teknis secara berkelanjutan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	Kompetensi personil laboratorium belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek pengujian yang dibutuhkan	Perencanaan pengembangan kompetensi	Mengikuti pelatihan di PPPOMN dan UPT lain	TW IV	Y	LAB/ SDM/01	Terdapat gap kompetensi personil laboratorium
		Belum terdapat Peralatan Laboratorium sesuai Standar Ruang Lingkup di Balai POM Banyumas	Perencanaan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium	Pengadaan Peralatan Laboratorium di Balai POM Banyumas	2027	T	-	-

Tabel 3. 58 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 14

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium antara lain:

1. Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium

   Program ini dilaksanakan melalui kegiatan verifikasi metode analisis ONAPPZA dan pengembangan ruang lingkup pengujian. Kegiatan tersebut mendukung peningkatan kesiapan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan serta menjadi dasar dalam pengembangan kemampuan pengujian laboratorium. Meskipun pencapaiannya masih perlu diperkuat melalui dukungan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai.

2. Kegiatan penyediaan kebutuhan operasional pengujian laboratorium

   Kegiatan pengadaan test kit dan reagen merupakan faktor pendukung dalam keberlangsungan pelaksanaan pengujian.

3. Kegiatan peningkatan kompetensi pengujian

   Kegiatan pengembangan kompetensi personel melalui pelatihan dan bimbingan teknis mendukung peningkatan kemampuan penguji dalam melaksanakan kegiatan pengujian. Program ini menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian laboratorium dan memastikan personel memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ruang lingkup pengujian.

4. Program perencanaan dan pemenuhan sarana prasarana serta peralatan laboratorium

   Kegiatan identifikasi kebutuhan dan pengusulan anggaran pengadaan alat laboratorium merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan. Program ini menjadi dasar dalam penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan laboratorium dalam memenuhi standar pengujian.

IKSS 15: Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
- Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
- Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada triwulan II tahun 2026 belum ada realisasi pada IKSS 15 dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun

2026 sesuai *timeline* KAK/TOR yang ditetapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu pada bulan Februari - Juli 2026, sehingga capaian realisasi sebesar 0, hal ini sesuai dengan target pada triwulan II tahun 2026. Rincian capaian IKSS 15 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0			0	Capaian di Akhir Periode

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	Capaian di Akhir Periode

Tabel 3. 60 Capaian IKSS 15 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Pada triwulan II tahun 2026 dibandingkan dengan triwulan I masih sama dengan sebelumnya yaitu belum ada realisasi pada IKSS 15 dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai

timeline KAK/TOR yang ditetapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu pada bulan Februari - Juli 2026. Pendampingan dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat menjadi salah satu indikator terimplementasinya keamanan pangan di daerah

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	50	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode)

Tabel 3. 61 Perbandingan IKSS 15 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi Tahun 2025 sebesar 1 (satu) kabupaten yang didampingi oleh Balai POM di Banyumas atau 25% kabupaten dari 4 kabupaten wilayah kerja telah didampingi. Target tahunan pada tahun 2026 yaitu 50% dimana merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sehingga target yang harus didampingi pada tahun 2026 sebesar 1 (satu) kabupaten yang didampingi oleh Balai POM di Banyumas. Namun, pada triwulan II tahun 2026 belum ada realisasi pada IKSS 15 dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai *timeline* KAK/TOR yang ditetapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu pada bulan Februari - Juli 2026. Dengan demikian, capaian indikator akan terealisasi sesuai dengan timeline kegiatan yang telah direncanakan, dan belum dapat ditampilkan pada Triwulan II.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja kinerja IKSS 15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman antara lain:

1. Pemahaman dan kapasitas daerah yang memerlukan adanya pendampingan lebih intens dalam mengisi *tools* penilaian mandiri, sehingga peran Balai POM di Banyumas menjadi krusial dalam memastikan kesesuaian data dan kelengkapan dokumen.
2. Komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui penerbitan regulasi daerah, pembentukan SK Tim, serta alokasi anggaran khusus mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pangan aman.
3. Sinergi lintas sektor yang memperkuat koordinasi antar-OPD dan pemangku kepentingan, sehingga proses pendampingan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadi penyebab langsung keberhasilan capaian indikator, sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Harapannya di tahun ini Kabupaten yang diampu mampu masuk peringkat seperti pendampinganny a yang tahun lalu mendapat penghargaan. Perhatikan koordinasi di dalam Kabupaten, keterlibatan Bupati, dan kerjasama petugas.	1. Koordinasi dengan personil kunci sebelumnya terkait program KKPA dan indikator keberhasilannya. 2. Penetapan usulan lokus program KKPA. 3. Internalisasi perencanaan pelaksanaan program KKPA th 2026. 4. Advokasi terhadap kabupaten yang akan menerima intervensi program Kabupaten/Kota	April-Juli 2026	Y	INS/R/03	Tidak tercapainya presentase Kab/Kota yang didampingi.

				Pangan Aman. 5. Telah dibuat grup whatsapp sebagai sarana komunikasi antara PIC pengisian tools KKPA tiap Kabupaten dengan petugas Balai POM di Banyumas				

Tabel 3. 62 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 15

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menjadi salah satu tolak ukur kinerja Balai POM di Banyumas dalam memperkuat sistem keamanan pangan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Beberapa program yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Penguatan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
2. Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan pangan aman di daerah.
3. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta literasi Masyarakat sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya pangan yang aman dan bermutu.

Dengan adanya program-program tersebut, capaian indikator diharapkan tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, peningkatan kepercayaan konsumen, serta terwujudnya ekosistem pangan yang aman dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSS16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,5	37,5			37,5	100	BAIK	100
Capaian SS2									100	BAIK	

Gambar 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Banyumas

Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi” pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah berhasil melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Seluruh kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan efektif, sehingga capaian indikator dapat terpenuhi secara optimal. Capaian tersebut masuk ke dalam kategori **BAIK.** Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi penerapan standar pengawasan serta komitmen Balai POM dalam memastikan bahwa sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja UPT memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan capaian penuh, dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga menghasilkan *outcome* yang nyata dalam mendukung keamanan pangan masyarakat. Ke depan, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan capaian di triwulan berikutnya. Upaya peningkatan kualitas pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi faktor penting agar efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi tetap konsisten dan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Badan POM secara nasional.

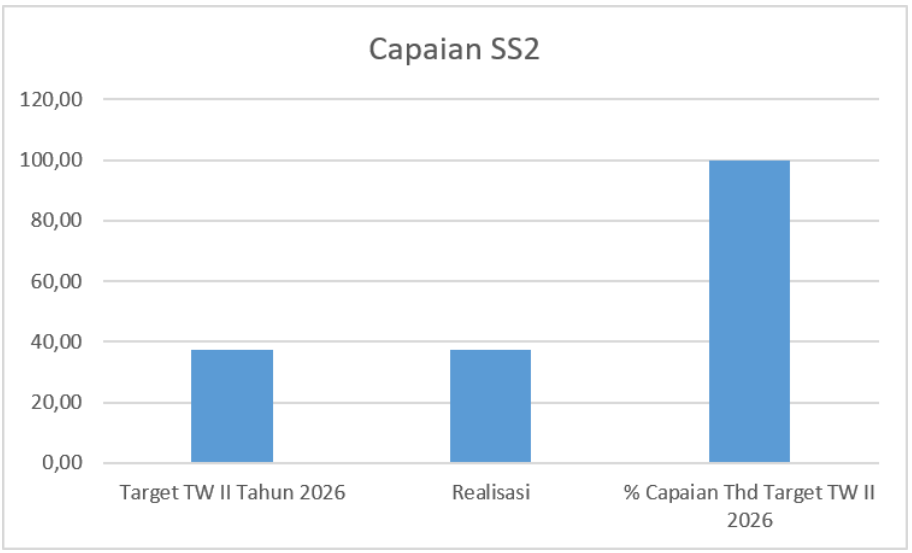

Gambar 3. 4 Grafik Capaian Sasaran Strategis 2

IKSS 16: Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tercatat sebesar 37,5%. Jika dibandingkan dengan target triwulan yang ditetapkan sebesar 37,5%, maka capaian terhadap IKSS 16 adalah 100% dengan kategori BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pencapaian target dalam satu tahun (3 sarana) ini telah tercapai pada triwulan II ini, lebih tepatnya pada bulan April 2026. Ke depannya, hingga akhir periode tahun 2026 target akan flat. Dengan capaian yang tepat sasaran, indikator ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem keamanan pangan, khususnya pada komoditi fortifikasi seperti minyak goreng sawit, garam konsumsi, dan tepung terigu di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	37,5			37,5	100 Baik

Tabel 3. 63 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	12,50	37,50	300

Tabel 3. 64 Capaian IKSS 16 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026 yang sebesar 12,50%, nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II meningkat menjadi 37,50%. Dengan demikian, capaian terhadap realisasi triwulan sebelumnya adalah 300%, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi karena kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun, mulai dari perencanaan cakupan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan	37,50	63	59,52	Perlu Upaya Keras 

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				

Tabel 3. 65 Perbandingan IKSS 16 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi TW II sudah sesuai dengan perencanaan dan target yaitu 37,5%. Hal ini sesuai dengan Nota dinas sekretariat utama Badan POM nomor PR.04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 perihal Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 Terkait dengan hal tersebut Badan POM perlu melakukan penyesuaian target RO 2026 dimana target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi mengalami penurunan dari 5 sarana menjadi 3 sarana. Jika sesuai perhitungan RAPK dengan baseline 8 sarana maka nilai target menjadi 37,5%. Hal ini berarti nilai di TW II sudah sesuai karena semua sarana sudah diperiksa.

Terkait dengan target tahunan masih menunggu adanya revisi PK Sesuai dengan nota dinas nomor PR.07.21.06.26.302 mengenai Tanggapan Revisi Rencana Aksi PK 2026 BPOM Banyumas, perubahan target akhir tahun (b12) akan dilakukan pada mekanisme revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dilakukan pada periode yang akan diinformasikan kemudian.

Hasil penurunan target baseline dalam periode 5 (lima) tahun ini masih dalam proses dan dimungkinkan untuk berubah dengan mengikuti mekanisme perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) yang direncanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM pada akhir bulan Juli 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS 16 Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun, sehingga cakupan pengawasan dapat tercapai secara optimal. Kedua, adanya koordinasi dengan Balai Besar POM Semarang dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling di sarana produksi pangan fortifikasi turut memperkuat efektivitas pengawasan, terutama pada komoditi minyak goreng sawit, garam konsumsi, dan tepung terigu.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Saat ini, belum adanya penyesuaian target yang sesuai dengan *baseline* yang menjadi kesepakatan dengan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sehingga pelaporan capaian belum sinkron.	Tetap memperhatikan kembali apa yang harus disiapkan untuk mengubah target sesuai dengan kesepakatan, perkuat komunikasi yang efektif.	Melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan dan akan dilakukan perbaikan target lebih lanjut.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/02	Terdapat beberapa sarana produksi fortifikasi yang tidak beroperasi namun masih memiliki izin edar.

Tabel 3. 66 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 16

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi tidak hanya ditunjang oleh pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang telah disusun, tetapi juga oleh koordinasi yang intensif dengan Balai Besar POM di Semarang. Koordinasi ini berperan penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan sampling berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

SS3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	89,25			90,33	101,21	SANGAT BAIK	101,21
		IKSS18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	70%			70%	100	BAIK	100
		IKSS19	Jumlah desa pangan aman	1	72%			72%	100	BAIK	100
		IKSS20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	70%			70%	100	BAIK	100
Capaian SS3									100,30	SANGAT BAIK	

Gambar 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di wilayah kerja Balai POM di Banyumas” pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 100,30% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoptimalkan strategi komunikasi publik, penyampaian informasi yang tepat sasaran, serta edukasi yang konsisten kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Keberhasilan capaian ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Balai POM di Banyumas dengan stakeholder lokal, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas pasar, serta pelaku usaha. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan pesan KIE dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat luas. Meskipun capaian indikator telah berada pada kategori Sangat Baik, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hasil di triwulan berikutnya. Upaya peningkatan kualitas materi KIE, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan informasi, serta penguatan kapasitas SDM dalam komunikasi publik akan menjadi langkah strategis agar efektivitas KIE terus meningkat.

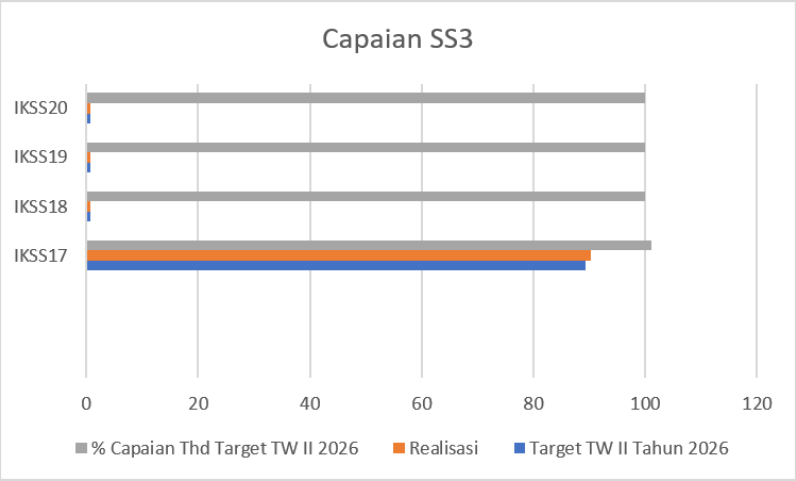

Gambar 3. 6 Grafik Capaian Sasaran Strategis 3

IKSS 17: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada Masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Perbandingan realisasi dengan target Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 101,21%. Hal ini dapat dicapai karena selama periode Triwulan II telah dilaksanakan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui beragam media, seperti media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terarah, nilai efektivitas KIE mencapai 90,33% dari target sebesar 89,25%, sehingga menghasilkan capaian relatif terhadap target sebesar 101,21% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan UPT dalam mengoptimalkan peran narasumber, kualitas konten, tingkat pemahaman audiens, serta manfaat yang dirasakan masyarakat dari kegiatan KIE.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25			90,33	101,21 Sangat Baik

Tabel 3. 67 Capaian Indikator Kinerja KIE Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,38	90,33	99,95

Tabel 3. 68 Capaian IKSS 17 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi efektifitas KIE Triwulan II lebih rendah dibanding dengan Triwulan I hal ini dikarenakan bahwa efektifitas KIE didapatkan dari survei responden KIE tatap muka dan survei responden KIE media. Pelaksanaan KIE media survei dilaksanakan setiap bulan, karena pelaksanaan KIE media dilaksanakan setiap bulan. Sedangkan untuk KIE tatap muka langsung tidak dapat dilaksanakan setiap bulan, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan target capaian *output* dan anggaran. KIE tatap muka Triwulan I dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni bulan Januari dan Februari dengan jumlah responden 50. KIE Triwulan II dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada bulan April dengan jumlah responden 29. Perbedaan hal ini yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai efektifitas KIE dari sisi KIE tatap muka dan pada akhirnya menurunkan nilai effektiitas KIE Triwulan II. Meskipun Triwulan II Tahun 2026 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan target tahunan maupun target Triwulan II Tahun 2026 realisasi masih masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,33	89,25	101,21	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 69 Perbandingan IKSS 17 dengan Target Tahunan 2026

Perbandingan realisasi dengan target tahunan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian sebesar 101,21%. Dengan pelaksanaan kegiatan KIE yang sesuai dengan perencanaan dan terarah, nilai efektivitas KIE mencapai 90,33% dari target tahunan sebesar 89,25%, sehingga menghasilkan capaian relatif terhadap target tahunan sebesar 101,21% dengan kategori SANGAT BAIK. Dengan capaian yang melampaui target flat tahunan sesuai ketentuan manual IKU, indikator efektivitas KIE memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran publik mengenai keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya perencanaan pelaksanaan KIE yang telah disusun sejak awal tahun, mencakup periode Triwulan I hingga Triwulan IV. Dengan perencanaan yang matang, kegiatan KIE dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang tahun, sehingga efektivitasnya dapat diukur secara konsisten dari masyarakat penerima KIE. Kedua, efektivitas KIE merupakan hasil gabungan dari pelaksanaan KIE langsung (tatap muka) dan KIE melalui media, yang memperluas jangkauan audiens serta meningkatkan pemahaman dan penerimaan informasi. Ketiga, adanya kolaborasi intensif dengan stakeholder memungkinkan kegiatan KIE dapat segera dilaksanakan sejak Triwulan I, sehingga konsistensi capaian dapat terjaga.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Dalam pelaksanaannya mencapai target, tidak ada kendala yang berarti.	Pencapaian kinerja untuk bisa mempertimbangkan masukan dari Masyarakat agar mampu meningkatkan nilai KIE dan mencapai tujuan dalam peningkatan kesadaran Masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan.	Pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan perencanaan yang telah dijadwalkan.	Hingga TW IV 2026	Y	INF/R/02	Petugas KIE tidak dapat melayani permintaan KIE tatap muka yang diminta oleh stakeholder/ masyarakat
							INF/O/01	Produk layanan informasi belum update status UPT dari Loka menjadi Balai
							INF/S/03	Pelaksanaan KIE belum menyentuh daerah perifer

Tabel 3. 70 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 17

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tidak hanya ditunjang oleh pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan tahunan, tetapi juga oleh adanya koordinasi intensif dengan stakeholder dalam pelaksanaan KIE tatap muka (langsung). Koordinasi ini berperan penting untuk memastikan kegiatan KIE dapat berjalan lancar, tepat sasaran, serta dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang efisien. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh pemanfaatan media KIE yang beragam, seperti media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang, sehingga jangkauan audiens semakin luas dan pesan KIE lebih mudah diterima. Program penunjang lainnya adalah evaluasi efektivitas KIE yang dilakukan secara berkala untuk menilai kualitas narasumber, konten, pemahaman audiens, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Ke depannya, Balai POM di Banyumas akan selalu menjaga keberlanjutan capaian, berupa penguatan kualitas konten KIE agar lebih

relevan dengan kebutuhan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan, serta evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman audiens guna memastikan efektivitas pesan yang disampaikan.

IKSS 18: Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi. Tahun 2026, kegiatan pelaksanaan PJAS ini dilaksanakan pada SD Negeri 2 Sokaraja.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pencapaian target triwulan II 2026 sudah terlaksana dengan baik. Sebanyak 70 persen pencapaian terdiri dari tahap pelaksanaan koordinasi dan advokasi, serta pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan dan bimtek kader keamanan pangan di bulan Juni 2026. Dengan demikian seluruh pelaksanaan tahap pada triwulan II 2026 sudah terlaksana dengan baik.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	70%			70%	100 Baik

Tabel 3. 71 Capaian Indikator Kinerja Sekolah Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2025	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20%	70%	350

Tabel 3. 72 Capaian IKSS 18 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Persentase capaian dari hasil perbandingan realisasi triwulan I 2026 dengan triwulan II 2026 berbeda, karena dalam perencanaan tahapan, sebagian besar tahapan dilaksanakan pada triwulan II (Sosialisasi dan Bimtek Kader). Penyesuaian ini berdasarkan pada kalender akademik dari Dinas Pendidikan setempat dengan tujuan tahapan sosialisasi dan bimtek dilakukan menjelang Tahun Ajaran Baru 2026/2027. Dengan demikian sebagian besar tahapan capaian akan diperoleh pada Triwulan II 2026.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	70%	1	70	Akan tercapai 

Tabel 3. 73 Perbandingan IKSS 18 dengan Target Tahunan 2026

Sesuai dengan petunjuk teknis program PJAS Aman, penyelesaian program PJAS direncanakan sebanyak 70 persen pada triwulan II dengan sisa tahapan yang akan dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi serta Sertifikasi. Tahapan yang berkontribusi terhadap capaian target tahunan adalah tahapan Sosialisasi (25%), Bimbingan Teknis (25%), Monitoring dan Evaluasi (25%), dan Pengawalan (5%) dimana sebagian besar sudah terselesaikan pada triwulan II.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja sebanyak 70 persen pada akhir TW II 2026 sesuai dengan target capaian TW II 2026 sehingga dapat disimpulkan kinerja yang telah diberikan berhasil mencapai target. Hal ini didukung oleh koordinasi dan pembagian tugas yang sinergis antara tim kerja Program PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Ama berbasis komunitas (PPABK), serta hasil koordinasi yang baik antara tim kerja Program PJAS Aman dengan sekolah target intervensi, sehingga tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kesulitan dalam peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku siswa mengenai Keamanan Pangan yang menghambat pelaksanaan program PJAS Aman di sekolah intervensi	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan sekolah intervensi serta pengenalan tools untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku siswa mengenai Keamanan Pangan sehingga dapat menentukan tindak lanjut berikutnya	Koordinasi langsung ke sekolah intervensi pada bulan Juli 2026	Juli 2026	Y	INF/IT/02 INF/O/03 INF/K/04	Risiko pelaporan tidak tepat waktu Risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal Risiko pelaksanaan kegiatan KIE kurang maksimal yang mengakibatkan tingkat

								pemahaman masyarakat masih kurang

Tabel 3. 74 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 18

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sebanyak 70 persen (terlaksananya advokasi keterpaduan keamanan pangan , sosialisasi keamanan pangan dan bimtek kader keamanan pangan) tercapai dengan bantuan dan sinergi dengan program Desa Pangan Aman, serta Pasar Pangan Aman berbasis komunitas (PPABK), sehingga penggunaan anggaran dapat ditekan menjadi lebih efisien. Selain itu adanya komitmen yang tinggi dari sekolah target intervensi mempermudah terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan tahapan yang sesuai dengan jadwal.

IKSS 19: Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman adalah:

a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis komunitas dan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b. Desa yang diintervensi merupakan desa stunting.

c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

    1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.

    2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.

    3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa yang diintervensi adalah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin b dan c. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi Kelembagaan Desa.

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD).

3. Bimtek Komunitas.

4. Monitoring dan Evaluasi.

5. Pengawalan.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan di kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 dengan total target desa yang diintervensi sebesar 1 Desa yaitu Desa Langgongsari yang merupakan kategori Desa Stunting berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 320 Tahun 2025 Tentang Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025-2026. Penentuan desa/kelurahan dan lokasi kab/kota yang akan menjadi target intervensi oleh UPT BPOM juga mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa Dan Kelurahan Pangan Aman Oleh Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 100% yaitu tahapan Advokasi Lintas sektor 25% mencakup penunjukan PIC kegiatan serta koordinasi awal dan pre advokasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait seperti Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 25 % yang mana dalam kegiatan bimtek turut mengundang perwakilan Desa Kalisari Kec Cilongok yang merupakan sentra tahu dan Desa Melung sebagai desa wisata, Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20 %, dan Pengawalan 2% sehingga total realisasi adalah 72%. Jika dibandingkan dengan target Triwulan 1 Tahun 2026 maka akan diperoleh capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 19	Jumlah Desa Pangan Aman	72%			72%	100 Baik

Tabel 3. 75 Capaian Indikator Kinerja Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 19	Jumlah Desa Pangan Aman	15%	72%	480

Tabel 3. 76 Capaian IKSS 19 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Target indikator Desa Pangan Aman tahun 2026 di Kabupaten Banyumas adalah 1 desa. Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun yaitu Triwulan IV merupakan target jumlah desa yang diintervensi tahun 2026.

Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun merupakan target jumlah desa yang diintervensi tahun 2026. Pada Triwulan 2 ini telah dilaksanakan tahapan Avokasi Lintas Sektor bersama pemerintah Kabupaten Banyumas , Bimtek Kader dan Bimtek komunitas Desa dengan capaian tahapan dalan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman sebesar 72% dengan % capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik. Setiap tahapan dalan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas Triwulan II Tahun 2026 telah selesai 100.00% sesuai target tahapan program dan mengalami peningkatan 57 % dibandingkan Triwulan sebelumnya dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	72%	1	72	Akan Tercapai 

Tabel 3. 77 Perbandingan IKSS 19 dengan Target Tahunan 2026

Target Indikator Desa Pangan Aman Tahun 2026 adalah 1 desa. Progres realisas kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun merupakan Desa Pangan Aman sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan tahapan dalam Program Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas Triwulan II Tahun 2026 telah sesuai dengan target per tahapan kegiatan yaitu 72%.

Realisasi Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 karena karakteristik dari target Indikator Kinerja Desa Pangan Aman ini bersifat jumlah desa, sedangkan pada Triwulan II ini merupakan progress tahapan kegiatan. Namun demikian target Triwulan II 2026 telah dapat dicapai dengan Kriteria Baik dan jika dibandingkan terhadap Kriteria Target 2026 dengan kriteria akan tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di kabupaten Banyumas dengan target desa yang dintervensi tahun 2026 sebesar 1 Desa. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2026 adalah meliputi tahapan kegiatan Advokasi kelembagaan desa 25 %, pelatihan kader keamanan pangan desa 25%, bimbingan teknis terhadap komunitas desa 20%, monitoring dan evaluasi 20%, pengawalan desa sebelumnya sebesar 10%.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 19	Jumlah Desa Pangan Aman	Pelaksanaan KIE Mandiri oleh Kader belum dilaksanakan / dimulai.	Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah desa dan kader untuk menyusun jadwal KIE dan memanfaatkan kegiatan masyarakat yang sudah berjalan sebagai media penyuluhan.	Menyusun jadwal KIE Mandiri pada Triwulan III, melakukan pendampingan kepada kader, serta mendokumentasikan seluruh kegiatan sebagai bukti pelaksanaan.	Agustus	Y	INF/SDM/03 INF/R/03 INF/K/03	GAP Kompetensi petugas KIE Kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Desa Pangan Aman Pelaksanaan kegiatan KIE/ tahapan Desa Pangan Aman kurang maksimal.

Tabel 3. 78 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 19

Penetapan Jumlah Desa Pangan Aman yang akan diintervensi program Keamanan Pangan pada tahun 2026 yaitu 1 desa berada di Kabupaten Banyumas dan pengawalan terhadap 1 desa yang telah diintervensi sebelumnya di Tahun 2025 di Kabupaten Cilacap. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan di Triwulan II tahun 2025 telah selesai 72% yaitu tahapan Avokasi Lintas Sektor bersama pemerintah Kabupaten Banyumas , Bimtek Kader dan Bimtek komunitas Desa. Untuk meningkatkan keaktifan kader dan keberhasilan program, kader yang sudah dibentuk melaksanakan KIE secara mandiri dengan memanfaatkan kegiatan masyarakat yang sudah berjalan sebagai media penyuluhan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Banyumas. Untuk Aspek Eksternal diantaranya:

1. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Bapperida, Dinpermades dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan

kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan Desa Pangan aman.

2. Dukungan dari *stakeholder* terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik.
3. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa.
5. Pelaksanaan pengawalan program desa pangan aman terhadap desa yang yang telah diintervensi melalui pendampingan kepada Tim KPD dalam melaksanakan program mandiri.

Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.
2. Komunikasi aktif dengan pihak *stakeholder* terutama lintas sektor terkait Upaya untuk pengimbasan desa telah dikomunikasikan secara aktif dengan pemerintah daerah.

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Desa dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Sekolah dan Pasar di Kabupaten Banyumas. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan Aman, Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.

IKSS 20: Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Capaian fisik Indikator Kinerja Sasaran Strategis 20 jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung pada akhir tahun, di bulan Desember. Sementara itu kegiatan dilaksanakan menjadi beberapa tahap, yakni (1) Advokasi kelembagaan, (2) Bimtek Kader, (3) Sosialisasi Komunitas, (4) Monev, dan (5) Pengawalan. Adapun target Tahun 2026 sebanyak 1 pasar tradisional yang di intervensi. Target triwulanan

merupakan persentase progres tahapan yang terlaksana sesuai bobot tiap-tiap tahapan kegiatan. Pada Triwulan II, bobot kegiatan Advokasi, Bimtek Kader dan Sosialisasi Komunitas sebesar 70% telah terlaksana, sehingga capaian IKSS 20 adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70%			70%	100 Baik

Tabel 3. 79 Capaian Indikator Kinerja Pasar Aman Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10%	70	700

Tabel 3. 80 Capaian IKSS 20 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 terhadap Realisasi kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 mengindikasikan adanya kenaikan capaian yang signifikan dari 10% menjadi 70%. Pada triwulan II, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni Advokasi, Bimtek Kader dan Sosialisasi Komunitas.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	70%	1	70	Akan Tercapai 

Tabel 3. 81 Perbandingan IKSS 20 dengan Target Tahunan 2026

Capaian pada triwulan II tersebut terbagi dalam beberapa kegiatan terlampir:

1. Pada 8 April 2026 telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Balai POM di Banyumas Tahun 2026 dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.
2. Pada 12 Mei 2026 telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan dan Penyuluhan Pangan Pengelola Pasar Banyumas selaku pasar intervensi, dengan mengundang DKUKMP, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, pedagang pasar dan 2 (dua) pengelola Pasar non intervensi.
3. Pada 23 Juni 2026 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan terhadap Komunitas Pasar Banyumas, dengan melibatkan Tim Kader Keamanan Pangan Pasar Banyumas, DKUKMP, pengelola pasar dan 15 pedagang pasar sebagai target sosialiasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Triwulan II telah sesuai target karena didukung oleh perencanaan yang baik dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan kegiatan koordinasi langsung dengan Tim Keamanan Pangan Pasar terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Tidak ada.	Mengingat *output* kegiatan selanjutnya yakni Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev yang cukup banyak, ada baiknya jika dilakukan koordinasi secara langsung terkait dengan persiapan kegiatan tersebut.	Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Monev	Juli 2026	Y	INF/IT/02 INF/O/03 INF/K/04	Risiko pelaporan tidak tepat waktu. Risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. Risiko pelaksanaan kegiatan KIE kurang maksimal yang mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat kurang.

Tabel 3. 82 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 20

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan II didukung oleh terlaksananya rangkaian kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), yaitu advokasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, bimbingan teknis kader keamanan pangan pasar, serta sosialisasi kepada komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan secara bertahap dengan melibatkan lintas sektor berhasil meningkatkan komitmen, kapasitas, dan partisipasi pengelola pasar serta pedagang dalam penerapan keamanan pangan. Sinergi yang baik antara Balai POM di Banyumas, pemerintah daerah, dan pengelola pasar menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya target kinerja Triwulan II sesuai dengan rencana. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu pengawasan keamanan pangan,

monitoring dan evaluasi, serta pengawalan implementasi program hingga target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

SS4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSS21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37,25	50%	0	0	53,33	106,66	SANGAT BAIK	106,66 ▲
Capaian SS4									106,66	SANGAT BAIK	

Gambar 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 106,66%. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melaksanakan pendampingan terhadap UMKM secara optimal, sehingga mendukung pemenuhan standar kesesuaian dan mutu pangan olahan dengan kategori SANGAT BAIK. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Balai POM dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu memenuhi standar produksi yang baik, seperti penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), maupun Industri Pangan Olahan dengan CPPOB. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga mencakup edukasi mengenai regulasi, tata cara sertifikasi, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan dan mutu produk. Capaian yang melampaui target ini juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara Balai POM di Banyumas dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan komunitas lokal. Meskipun capaian indikator telah berada pada kategori Sangat Baik, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hasil di triwulan berikutnya. Upaya penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pendampingan, serta monitoring berkelanjutan terhadap UMKM binaan akan menjadi langkah strategis agar efektivitas program tetap konsisten.

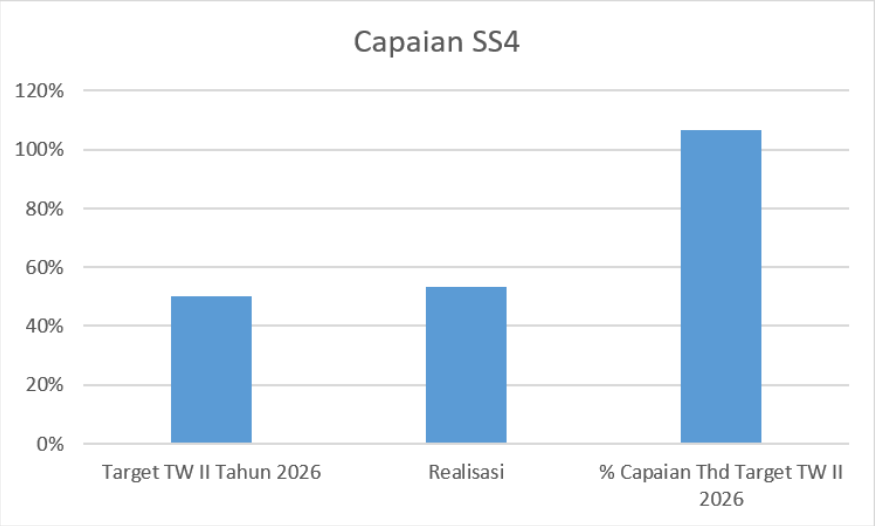

Gambar 3. 8 Grafik Capaian Sasaran Strategis 4

IKSS 21: Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan hasil perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 21 pada Triwulan II Tahun 2026, yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, target yang ditetapkan sebesar 50% dapat dilampaui dengan realisasi sebesar 53,33%. Capaian ini menunjukkan tingkat pencapaian terhadap target sebesar 106,66%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pendampingan yang dilakukan Balai POM di Banyumas, terutama dalam memberikan pembinaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pendampingan yang terstruktur, mulai dari inspeksi sarana produksi, pemberian rekomendasi sertifikat, hingga monitoring kepatuhan, terbukti mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memenuhi standar keamanan dan mutu.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 21	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	50%			53,33%	106,66 Sangat Baik

Tabel 3. 83 Capaian Indikator Kinerja UMKM yang Didampingi Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 21	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	21,67%	53,33%	246,10%

Tabel 3. 84 Capaian IKSS 21 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Jika dilihat dari tabel perbandingan realisasi kinerja, capaian pada Triwulan II Tahun 2026 memang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Triwulan I. Hal ini terjadi karena metode penghitungan capaian menggunakan pendekatan kumulatif,

bukan rata-rata, sehingga nilai capaian akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan hingga mendekati 100%.

Dengan metode kumulatif ini, setiap kegiatan pendampingan UMKM yang berhasil dilakukan akan langsung menambah persentase capaian, sehingga akumulasi hasil pada Triwulan II terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan Triwulan I. Peningkatan ini bukan semata karena adanya lonjakan kegiatan baru, melainkan karena seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun dihitung secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	53,33%	37,25	53,33%	Perlu Upaya Keras

Tabel 3. 85 Perbandingan IKSS 21 dengan Target Tahunan 2026

Angka 37,25% pada target tahunan berasal dari perhitungan jumlah UMKM yang menjadi sasaran pendampingan, yaitu akumulasi UMKM tahun 2025 (6 pangan, 2 obat tradisional, 1 kosmetik) dan UMKM tahun 2026 (6 pangan, 3 obat tradisional, 1 kosmetik). Total keseluruhan UMKM yang dihitung adalah 19 UMKM, kemudian dibagi dengan jumlah total perencanaan pendampingan UMKM selama periode lima tahun (2025–2029) yaitu 51 UMKM, sehingga menghasilkan nilai target tahunan sebesar 37,25% yang menjadi acuan capaian kinerja pendampingan UMKM pada tahun 2026. Angka ini sekaligus mencerminkan pendekatan perencanaan jangka menengah yang digunakan Balai POM di Banyumas, di mana target tahunan tidak ditentukan secara parsial per tahun, melainkan dihitung secara kumulatif berdasarkan total sasaran pendampingan selama periode lima tahun (2025–2029). Capaian kinerja pada TW II

Tahun 2026 telah sesuai dengan timeline pendampingan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha masing-masing komoditi dan telah ditargetkan dapat tercapai di TW IV. Dengan demikian, jika kegiatan pendampingan UMKM tetap dilakukan sesuai rencana, maka target pendampingan UMKM tahun 2026 dapat tercapai di TW IV.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya keputusan penolakan/persetujuan penurunan target pendampingan periode 5 tahun (2024-2029) yang telah diajukan di awal tahun 2026 sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan saat ini dilakukan terhadap UMKM dengan jumlah yang telah ditetapkan (sebelum efisiensi anggaran). Jika dibandingkan dengan tahun 2025, anggaran pendampingan UMKM mengalami penurunan sebesar 25% sedangkan target pendampingan tidak mengalami penurunan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Sertifikasi mengalihkan sebagian kegiatan pendampingan UMKM yang sebelumnya dilaksanakan secara luring menjadi daring. Pendekatan ini mendukung efisiensi anggaran sekaligus menjaga keberlangsungan program pendampingan. Kegiatan yang dialihkan meliputi kunjungan ke sarana produksi untuk mengarahkan pembangunan sarana serta bimbingan penyusunan dokumen mutu yang diperlukan dalam sertifikasi CPPOB, CPOBAB, maupun CPKB. Dengan adanya transformasi metode pendampingan ini, efektivitas kegiatan tetap terjaga meskipun terdapat keterbatasan anggaran, dan UMKM tetap memperoleh dukungan yang memadai untuk memenuhi standar keamanan dan mutu produk.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 21	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan	Masih menunggu persetujuan / penolakan usulan penurunan target sehubungan	Tetap menerima pendampingan untuk pelaku usaha yang meminta sertifikasi dan dimaksimalkan output yang bisa	Kegiatan yang akan dilakukan secara daring antara lain kunjungan sarana untuk pendampingan pembangunan	TW IV Tahun 2026	T	-	Tidak tercapainya target pendampingan UMKM di tahun berjalan

	OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	dengan adanya efisiensi anggaran	didapatkan oleh pelaku usaha.	sarana produksi serta bimbingan teknis CPOBAB /CPKB				

Tabel 3. 86 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 21

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target pendampingan UMKM adalah koordinasi lintas sektor untuk secara aktif menjaring calon peserta pendampingan UMKM. Penjaringan calon peserta ini sebaiknya dilakukan di pertengahan sampai dengan akhir tahun berjalan untuk mencari kandidat peserta pendampingan tahun berikutnya. Calon peserta ini sekiranya memiliki komitmen serta sumber daya yang memadai agar bisa mengikuti seluruh tahap pendampingan dengan baik sehingga bisa mendapatkan Sertifikat CPPOB/CPOBAB/CPKB maksimal di TW IV tahun berjalan sesuai dengan target pendampingan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target pendampingan UMKM lebih difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan pendampingan dengan keterbatasan anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengalihan sebagian kegiatan pendampingan dari metode luring menjadi daring, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pembinaan. Pendekatan daring ini diterapkan pada kegiatan bimbingan penyusunan dokumen mutu serta konsultasi teknis terkait pembangunan sarana produksi, sehingga UMKM tetap memperoleh arahan yang memadai untuk memenuhi standar CPPOB/CPOBAB/CPKB.

Kegiatan lain yang mendukung pencapaian kinerja adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan pelaporan, sehingga data capaian dapat diperoleh secara lebih cepat dan akurat. Kegiatan pengembangan kompetensi bagi fasilitator pendampingan, baik kompetensi teknis maupun non teknis, juga menjadi faktor yang penting untuk memastikan fasilitator pendampingan memiliki pengetahuan teknis yang mumpuni dalam mengarahkan pelaku usaha menerapkan aspek CPPOB/CPOBAB/CPKB dengan baik dan menyeluruh. Kompetensi non teknis seperti kemampuan komunikasi juga penting untuk dimiliki oleh fasilitator agar arahan pendampingan dapat disampaikan dengan baik dan diterima oleh pelaku usaha untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SS5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	10			0	0	KURANG	0
Capaian SS5									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian daripada Sasaran Strategis 5 yakni “Terlaksananya Penindakan Kegiatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja ZI” tercatat masih berada pada angka 0%. Hal ini menunjukkan bahwa target penindakan belum dapat direalisasikan pada periode tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah situasi geokriminal di wilayah Cilacap yang belum kondusif untuk dilakukan penindakan. Kondisi lapangan yang rawan kasus menyebabkan keterbatasan ruang gerak bagi tim pengawas dalam melaksanakan kegiatan penindakan secara efektif. Selain itu, pelaku usaha jamu berbahan kimia obat (BKO) untuk sementara waktu menghentikan kegiatan produksinya, sehingga tidak terdapat objek penindakan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan. Meskipun capaian indikator masih nol, hal ini tidak serta-merta menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, melainkan lebih kepada faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan penindakan. Situasi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja, bahwa efektivitas penindakan sangat bergantung pada kondisi lapangan dan keberadaan aktivitas ilegal yang menjadi sasaran pengawasan.

Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan penindakan. Selain itu, diperlukan strategi deteksi dini terhadap potensi munculnya kembali aktivitas produksi jamu BKO, sehingga penindakan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan pada triwulan berikutnya, sekaligus memperkuat komitmen Balai POM dalam melindungi masyarakat dari peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan.

IKSS 22: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada tanggal 26 Februari 2026 sudah dilaksanakan operasi penindakan terhadap produksi obat tradisional illegal dan diduga mengandung bahan kimia obat di desa pagubugan Kulon, kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan temuan produk jadi jamu TIE 2 item, kemasan roll foil sebanyak 20 item, kemasan kotak dus 10 item, alat produksi mesin filling sebanyak 1 unit dan total nilai ekonomis temuan sekitar Rp 175.000.000,-. Terdapat kendala setelah operasi penindakan tersebut, saksi terlapor tidak hadir memenuhi panggilan dari BPOM Banyumas dua kali berturut turut tanpa alasan yang sah, dan sudah dilakukan penelusuran ke alamat KTP dan alamat keluarganya, namun saksi terlapor belum diketahui keberadaannya sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam penelusuran dan pengembangan kasus tersebut. Oleh karena itu, capaian pada Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat tercapai sesuai dengan targetnya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10			0	0

Tabel 3. 87 Capaian Indikator Kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0

Tabel 3. 88 Capaian IKSS 22 TW I Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan IV 2025

Capaian pada Triwulan II dan Triwulan I masih sama dengan 0. Berdasarkan nota dinas nomor PR.07.21.06.26.302 mengenai Tanggapan Revisi Rencana Aksi PK 2026 BPOM Banyumas, target IKU ini dari bulan Januari – Mei 2026 sebesar “0”. Target “10%” dimulai pada bulan Juni 2026. Namun, hal ini tidak dapat dicapai karena situasi geokriminal atau rawan kasus di wilayah Cilacap belum kondusif untuk dilakukan penindakan karena pelaku usaha jamu BKO untuk sementara ini menghentikan kegiatan produksinya. Target akan dikejar kembali bulan Juli 2026.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	100	0	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3. 89 Perbandingan IKSS 22 dengan Target Tahunan 2026

Masih diperlukan upaya secara komprehensif dalam penelusuran dan pengembangan dalam rangka ungkap kasus produksi jamu BKO khususnya di wilayah Kroya, Sampang dan Binangun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator IKSS 22: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT masih bernilai 0%. Kondisi ini terjadi bukan karena tidak adanya kegiatan, melainkan karena faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan penyidikan. Situasi geoklimatikal di wilayah Cilacap belum kondusif untuk dilakukan penindakan, sementara pelaku usaha jamu BKO untuk sementara menghentikan kegiatan produksinya. Hal tersebut membuat target yang mulai ditetapkan sebesar 10% pada bulan Juni 2026 belum dapat dicapai sesuai rencana.

Meskipun demikian, Balai POM di Banyumas telah mengambil langkah positif untuk memastikan keberhasilan di periode berikutnya. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat penelusuran kasus dengan memperluas jaringan informasi hingga ke wilayah Kroya, Sampang, dan Binangun, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Selain itu, monitoring berkelanjutan terhadap aktivitas pelaku usaha tetap dilakukan agar penindakan dapat segera dilaksanakan ketika produksi kembali berjalan. Strategi penjadwalan ulang juga disiapkan, dengan fokus mengejar target capaian mulai bulan Juli 2026 sesuai rencana aksi yang telah direvisi.

Dengan langkah-langkah tersebut, capaian yang belum terlihat pada Triwulan II dapat dipandang sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap kondisi lapangan. Balai POM di Banyumas tetap optimis bahwa target tahunan dapat tercapai melalui komitmen kuat, koordinasi yang solid, serta kesiapan strategi penindakan yang lebih komprehensif.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Proses masih dalam tahap pendalaman informasi , sehingga diperlukan beberapa tahapan	Pendalaman informasi dilaksanakan beberapa kali	Kegiatan Pendalaman Informasi	Mei 2026	Y	P/H/05/26	Perlunya penyesuaian antara KUHAP yang lama dengan yang baru

		persiapan operasi penindakan						

Tabel 3. 90 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 22

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026, kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKSS 22: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT antara lain adalah koordinasi intensif dengan criminal justice system seperti Kepolisian, BNN Kabupaten, dan Kejaksaan Negeri. Sinergi lintas sektor ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, memperkuat legitimasi penindakan, serta mempercepat proses hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan produksi atau distribusi ilegal. Selain itu, kegiatan pengembangan jaringan informasi di wilayah rawan kasus seperti Kroya, Sampang, dan Binangun juga mendukung ketercapaian kinerja dengan memperluas cakupan pengawasan dan memperkuat bukti dukung dalam proses penyidikan. Di sisi lain, kegiatan operasi penindakan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kondisi geoklimatikal dan situasi lapangan yang belum kondusif menjadi faktor yang sementara membatasi capaian. Namun, hal ini tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai tantangan eksternal yang mendorong Balai POM di Banyumas untuk melakukan penyesuaian strategi, monitoring berkelanjutan, serta penjadwalan ulang target capaian mulai Juli 2026. Dengan kombinasi kegiatan penunjang tersebut, Balai POM di Banyumas tetap optimis bahwa target tahunan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SS6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	50			50	100	BAIK	100
Capaian SS6									100	BAIK	

Gambar 3. 9 Capaian Sasaran Strategis 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian Sasaran Strategis 6 “Terlaksananya kegiatan teknis di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah melaksanakan kegiatan analisis dan deteksi kejahatan di sektor farmasi dan pangan olahan secara efektif, dengan kategori BAIK. Keberhasilan capaian ini menegaskan bahwa seluruh laporan analisis kejahatan yang menjadi indikator utama dapat diselesaikan sesuai standar yang berlaku. Hal ini mencerminkan konsistensi penerapan prosedur teknis, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kesesuaian hasil analisis dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Dengan capaian penuh, dapat disimpulkan bahwa fungsi teknis pengawasan berjalan optimal dan mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang farmasi dan pangan olahan. Pencapaian penuh ini juga menegaskan kesiapan Balai POM di Banyumas dalam mendukung penindakan dan pengendalian risiko di sektor farmasi dan pangan olahan. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas teknis, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor.

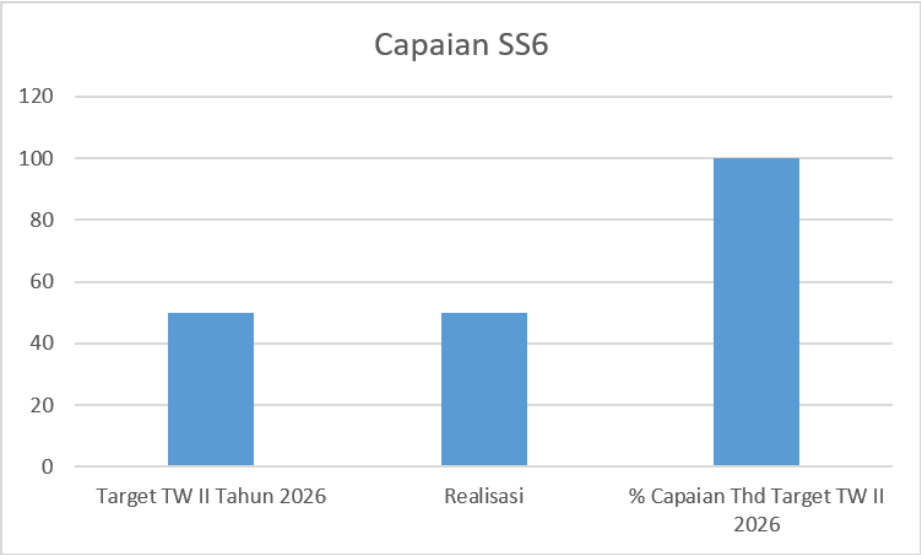

Gambar 3. 10 Grafik Capaian Sasaran Strategis 6

IKSS 23: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

NPSS 6 tercapai sebesar 100% dengan memenuhi target. Hal ini menggambarkan bahwa Balai POM di Banyumas telah melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif pada wilayah kerja Balai POM di Banyumas dengan kategori **BAIK**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%			50%	100 Sangat Baik

Tabel 3. 91 Capaian Indikator Kinerja Laporan Analisis Kejahatan yang Didampingi Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50%	50%	100

	Diselesaikan Sesuai Standar			

Tabel 3. 92 Capaian IKSS 23 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator ini tercatat sebesar 50%, sehingga persentase capaian terhadap realisasi triwulan sebelumnya adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian laporan analisis kejahatan tetap konsisten dan sesuai standar yang berlaku. Stabilitas capaian ini menandakan adanya kesinambungan dalam pelaksanaan fungsi teknis pengawasan, khususnya dalam penyusunan dan penyelesaian laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. engan dukungan koordinasi lintas sektor, monitoring internal, serta penguatan kapasitas tim, Balai POM di Banyumas optimis bahwa target tahunan dapat tercapai sesuai standar yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%	91%	54,95	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3. 93 Perbandingan IKSS 23 dengan Target Tahunan 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator ini tercatat sebesar 50%, sementara target tahunan yang ditetapkan adalah 91%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan mencapai 54,95%. Notifikasi capaian menunjukkan status “Perlu Upaya Keras”, yang menandakan perlunya peningkatan intensitas kegiatan agar target tahunan dapat tercapai sesuai rencana. Meskipun capaian belum maksimal, hasil ini tetap menunjukkan adanya konsistensi dalam penyelesaian laporan analisis sesuai standar yang berlaku.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator IKSS 23: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar masih berada di angka 50%, sama dengan Triwulan I. Kondisi stagnan ini bukan disebabkan oleh kelemahan kinerja, melainkan karena memang target yang ditetapkan hingga bulan November adalah 50%, sementara target tahunan baru meningkat menjadi 91% pada akhir tahun. Dengan demikian, capaian yang stabil hingga Triwulan II justru menunjukkan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana tahapan target yang telah ditetapkan. Sebagai langkah antisipasi untuk mencapai target tahunan, Balai POM di Banyumas telah melakukan berbagai upaya positif. Di antaranya adalah penguatan koordinasi lintas sektor dengan Kepolisian, BNN Kabupaten, dan Kejaksaan Negeri agar laporan analisis dapat segera ditindaklanjuti; monitoring internal berkala untuk memastikan laporan disusun sesuai standar; serta peningkatan kapasitas tim teknis melalui pelatihan agar petugas lebih siap menghadapi kompleksitas kasus. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk mempercepat proses dokumentasi dan pelaporan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Tidak ada kendala yang berarti	Ke depannya, usahakan tetap mampu mencapai target dengan maksimal. Perkuat justifikasi dan data dukung yang diperlukan.	Melaksanakan pelaporan siber sesuai dengan ketentuan dan perencanakan yang telah ditetapkan	s.d. TW IV 2026	Y	P/O/01	Peredaran penyalahgunaan obat- obat tertentu dan obat psikotropika ilegal di area pengawasan Balai POM di Banyumas

Tabel 3. 94 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 23

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026, kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKSS 23: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar antara lain adalah penggalangan dengan Saka POM Pramuka, tokoh keagamaan atau ulama, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat. Kegiatan ini berperan penting dalam memperkuat dukungan sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mitra aktif dalam memberikan informasi dan dukungan terhadap proses analisis kejahatan. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan legitimasi moral yang memperkuat penerimaan pesan pengawasan di tingkat lokal. Hal ini membantu mempercepat proses pengumpulan data dan bukti dukung, sehingga laporan analisis dapat diselesaikan sesuai standar. Dengan kombinasi kegiatan penggalangan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas internal, Balai POM di Banyumas optimis bahwa target tahunan sebesar 91% dapat tercapai. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas laporan analisis kejahatan sesuai standar sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sasaran Strategis 7: Layanan Publik UPT yang Prima

SS7	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSS24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,22				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS7									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	

Gambar 3. 11 Capaian Sasaran Strategis 7: Layanan Publik Balai POM di Banyumas yang Prima

Capaian Sasaran Strategis 7 “Layanan Publik UPT yang Prima” pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dihitung atau masih berada pada angka 0%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja terkait indeks pelayanan publik belum memiliki data capaian pada periode triwulan kedua tahun 2026 ini. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses pengumpulan data maupun pelaksanaan survei kepuasan layanan publik belum dilakukan atau belum menghasilkan output yang dapat diukur secara kuantitatif. Meskipun capaian indikator masih nol, hal ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem layanan publik agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya tindak lanjut yang tepat, diharapkan hingga akhir periode capaian indikator layanan publik dapat terukur secara jelas, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis dan memperkuat akuntabilitas kinerja Balai POM di Banyumas.

IKSS 24: Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);

2) Profesionalitas SDM (25%);

3) Sarana Prasarana (18%);

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);

5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);

6) Inovasi (12%).

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada TW II Tahun 2026, IKSS Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT belum memiliki nilai target yang harus dicapai dikarenakan penilaian IPP baru dilaksanakan pada TW II dan hasilnya akan disampaikan di TW IV. Hal ini sesuai dengan mekanisme penilaian yang

ditetapkan, di mana hasil IPP hanya dapat diperoleh setelah dilakukan survei dan evaluasi menyeluruh terhadap layanan publik UPT. Oleh karena itu, capaian terhadap target Triwulan II belum dapat dihitung dan masih bernilai 0. Namun, Balai POM di Banyumas tetap melakukan persiapan melalui kegiatan monitoring, evaluasi internal, dan penguatan standar pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, diharapkan hasil penilaian IPP pada Triwulan IV dapat memenuhi bahkan melampaui target tahunan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0			0	Belum dapat terhitung pada TW II 2026

Tabel 3. 95 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0

Tabel 3. 96 Capaian IKSS 24 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Pada TW II Tahun 2026, IKSS Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT belum memiliki nilai target yang harus dicapai dikarenakan penilaian IPP baru dilaksanakan pada TW II dan hasilnya akan disampaikan di TW IV. Pada penilaian IPP, Tim Sertifikasi sudah

menyampaikan data dukung sebaik mungkin untuk merepresentasikan pelayanan publik di Balai POM Banyumas untuk mendapatkan nilai yang maksimal.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	0	4,22	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) ▼

Tabel 3. 97 Perbandingan IKSS 24 dengan Target Tahunan 2026

Nilai capaian IK Indeks Pelayanan Publik UPT berupa nilai indeks yang akan diperoleh dari Berita Acara PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) yang akan didapatkan pada TW IV berdasarkan survei yang dilaksanakan pada TW II.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2026, tantangan utama dalam pencapaian target Indeks Pelayanan Publik UPT adalah penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan terhadap ruang gerak kegiatan pelayanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, alokasi anggaran untuk pelayanan publik mengalami penurunan drastis hingga 93%, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka secara langsung.

Sebagai bentuk adaptasi, Balai POM di Banyumas melakukan inovasi dengan mengalihkan sebagian besar kegiatan pelayanan publik dari metode luring menjadi platform daring. Transformasi ini tidak hanya mendukung efisiensi anggaran, tetapi juga memperluas jangkauan layanan sehingga pelaku usaha di seluruh wilayah pengawasan

tetap dapat memperoleh akses pendampingan dan konsultasi. Pelayanan daring mencakup bimbingan teknis, konsultasi kepatuhan, serta monitoring dokumen mutu, yang sebelumnya membutuhkan kunjungan fisik ke sarana produksi.

Selain itu, untuk menjaga kualitas layanan, dilakukan evaluasi internal berkala guna memastikan standar pelayanan tetap terpenuhi meskipun metode pelaksanaan berubah. Evaluasi ini menjadi sarana identifikasi kendala teknis dalam penerapan pelayanan daring sekaligus wadah untuk merumuskan perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, Balai POM di Banyumas berupaya menjaga konsistensi mutu pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa hasil penilaian IPP pada Triwulan IV tetap dapat mencapai target yang ditetapkan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penurunan anggaran untuk pelayanan publik	Pelayanan publik dapat dikoordinasikan oleh fungsi Infokom agar mampu memenuhi nilai yang masih rendah sebelum akhir periode tahun 2026.	Akan melaksanakan agenda atau perencanaan kegiatan yang telah tersedia sesuai dengan timeline	s.d. TW IV Tahun 2026	Y	SER/S/02	Menurunnya nilai indeks pelayanan publik Balai POM di Banyumas

Tabel 3. 98 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 24

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian target Indeks Pelayanan Publik adalah program pengembangan kompetensi teknis bagi petugas pelayanan dengan alokasi anggaran yang relatif lebih besar dibandingkan kegiatan lainnya. Kompetensi teknis ini mencakup pemahaman mendalam mengenai regulasi, prosedur pelayanan, serta penggunaan sistem informasi pelayanan publik. Dengan bekal kompetensi teknis yang mumpuni, petugas mampu memberikan layanan informasi yang tepat, akurat, dan

sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga.

Di sisi lain, kegiatan pengembangan kompetensi non teknis seperti pelatihan komunikasi efektif, meskipun tetap penting, memiliki alokasi anggaran yang lebih kecil dan dampaknya terhadap ketercapaian kinerja tidak sekuat kompetensi teknis. Namun, kemampuan komunikasi yang baik tetap menjadi faktor pendukung karena memungkinkan petugas menyampaikan informasi dengan jelas, menyeluruh, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan kompetensi teknis merupakan program yang paling signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target Indeks Pelayanan Publik, sedangkan kegiatan pengembangan kompetensi non teknis berperan sebagai pelengkap yang memperkuat kualitas interaksi antara petugas dan pelaku usaha. Kombinasi keduanya menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSS25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS26	Nilai AKIP UPT BPOM	78,96				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS8									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	

Gambar 3. 12 Capaian Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian Sasaran Strategis 8 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal” pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dihitung atau masih berada pada angka 0%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang terkait dengan tata kelola organisasi, seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Kinerja Anggaran, serta Indeks Manajemen Risiko, masih dalam tahap proses akumulasi capaian. Dengan demikian, hasil pengukuran baru dapat dievaluasi secara komprehensif pada akhir tahun setelah seluruh data terhimpun. Ketiadaan capaian pada triwulan kedua bukan berarti tidak adanya aktivitas, melainkan lebih kepada siklus pengumpulan data yang belum selesai. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja, bahwa aspek tata kelola organisasi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan indikator teknis pengawasan yang dapat diukur secara langsung per triwulan. Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas perlu memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan data dan dokumentasi berjalan sesuai jadwal, serta memperkuat koordinasi dengan tim kerja terkait agar capaian indikator dapat terhimpun secara lengkap pada akhir tahun.Dengan demikian, meskipun capaian indikator masih nol pada Triwulan II Tahun 2026, hal ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sistem tata kelola, memastikan konsistensi proses akuntabilitas, serta menyiapkan evaluasi yang lebih komprehensif pada akhir tahun

IKSS 25: Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM menjadi salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

IKSS Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun ini di Balai POM Banyumas dengan target nilai RB 75. Target indikator kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum dapat dihitung capaiannya pada TW II tahun 2026.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0			0	Belum dapat terhitung pada TW II 2026

Tabel 3. 99 Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Realisasi Triwulan I Tahun	Realisasi Triwulan II Tahun	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan

		2026	2026	Sebelumnya
IKSS 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0

Tabel 3. 100 Capaian IKSS 25 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Capaian indikator pembangunan Zona Integritas (ZI) pada UPT BPOM merupakan capaian tahunan yang baru akan dinilai secara resmi pada Triwulan IV Tahun 2026. Hal ini karena penilaian ZI dilakukan melalui mekanisme evaluasi menyeluruh oleh Inspektorat, sehingga nilai capaian tidak dapat ditampilkan pada Triwulan I maupun Triwulan II. Dengan demikian, angka capaian pada periode sebelumnya masih bernilai 0, dan hasil akhir baru akan keluar setelah proses penilaian resmi selesai di akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	75	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode)

Tabel 3. 101 Perbandingan IKSS 25 dengan Target Tahunan 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT BPOM masih bernilai 0 karena penilaian resmi belum dilakukan. Target tahunan yang ditetapkan adalah 75, namun capaian terhadap target tahunan belum dapat dihitung hingga Triwulan IV. Hal ini sesuai dengan mekanisme penilaian ZI yang bersifat tahunan, di mana hasil evaluasi baru akan keluar setelah dilakukan penilaian menyeluruh oleh Inspektorat pada akhir tahun. Namun, kegiatan pembangunan ZI tetap

dilaksanakan secara konsisten sebagai persiapan agar hasil penilaian akhir dapat memenuhi target tahunan sebesar 75.

Walaupun demikian, Balai POM di Banyumas telah melakukan *Desk* Penilaian ZI pada Triwulan II Tahun 2026. Hasil penialian pembangunan ZI tahun 2026 telah disampaikan melalui Nota Dinas Inspektur Utama tanggal 22 Juni 2026 Nomor PI.06.06.7.06.26.317 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2026. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Banyumas Tahun 2026 sebesar 82,07 atau capaian sebesar 109,43% dari target tahunan sebesar 75. Realisasi tersebut akan diklaim pada TW IV sesuai target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target tahunan tercapai sebesar 109,43% namun untuk batas nilai minimal dapat diusulkan untuk penilaian WBK sebesar 85. Point yang masih perlu dtingkatkan untuk menuju penilaian WBK antara lain nilai area pelayanan publik yang masih dibawah 60% atau Inovasi terkait Pelayanan Publik belum optimal, belum terukur dan dianggap belum berdampak langsung bagi stakeholder. Hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan inovasi pelayamam publik antara lain:

1) Melakukan evaluasi program kerja ZI dan inovasi Agen Perubahan terutama pada Pokja Peningkatan Pelayanan Publik;

2) Pengintegrasian Inovasi kedalam SOP Mikro.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Inovasi terkait Pelayanan Publik belum optimal, belum terukur dan dianggap belum berdampak langsung bagi stakeholder. Belum semua pokja melakukan	Memperbaiki penilaian yang masih rendah dan mampu dilakukan untuk periode berikutnya.	Update SOP Mikro	10 Juli 2026	T	-	-

		pemantauan program kerja yang ditetapkan dalam renja, sehingga ada program kerja yang tidak terlaksana sesuai schedule Belum semua SOP inovasi terintegrasi pada SOP Mikro.						

Tabel 3. 102 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 25

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang pembangunan ZI di Balai POM Banyumas, dilakukan beberapa strategi antara lain:

1. Penyusunan tim berdasarkan mekanisme yang jelas dan melibatkan seluruh pegawai.
2. Penyusuan program kerja dan rencana kerja prioritas, monitoring dan tindak lanjutnya.
3. Internalisasi budaya kerja dan pola pikir pegawai yang lebih intens dan melibatkan semua pegawai unit kerja.
4. Penyebaran dan permintaan dukungan pembangunan ZI ke eksternal secara *offline* maupun *online*.

IKSS 26: Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Realisasi nilai AKIP Balai POM di Banyumas akan terealiasi pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 26	Nilai AKIP UPT BPOM	0			0	Belum dapat terhitung pada TW II 2026

Tabel 3. 103 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 26	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0

Tabel 3. 104 Capaian IKSS 26 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Pada Triwulan I maupun Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM masih bernilai 0. Hal ini terjadi karena penilaian AKIP merupakan indikator tahunan yang baru akan dilakukan secara menyeluruh pada akhir tahun dan tidak dilakukan *breakdown* tiap triwulan. Dengan demikian, capaian terhadap target belum dapat dihitung pada periode triwulan berjalan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	0	78,96	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) 

Tabel 3. 105 Perbandingan IKSS 26 dengan Target Tahunan 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM memang masih bernilai 0, sementara target tahunan yang ditetapkan adalah 78,96. Kondisi ini bukan menunjukkan ketiadaan kegiatan, melainkan karena penilaian AKIP merupakan indikator tahunan yang baru akan muncul saat Triwulan IV Tahun 2026 oleh Inspektorat Badan POM. Balai POM di Banyumas akan selalu optimis bahwa target tahunan sebesar 78,96 dapat tercapai pada Triwulan IV. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga hasil penilaian akhir diharapkan memberikan nilai yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mencapai target nilai AKIP pada akhir tahun Tim Kerja Peningkatan Akuntabilitas Kinjerja memperhatikan rekomendasi Inspektorat hasil dari evaluasi AKIP Balai POM di Banyumas Tahun 2025, tindaklanjut dari rekomendasi tersebut dibuat dalam rencana kegiatan dan dimonitor tiap TW pelaksanaannya melalui aplikasi SAPAAPIP. Beberapa kendala yang dialami pada TW II antara lain:

1. Perubahan target pada bulan berjalan sehingga diperlukan penyesuaian yang membutuhkan waktu serta sinkronisasi pada pelaporan;

2. Belum tumbuhnya kesadaran secara penuh seluruh pegawai terkait nilai AKIP sehingga tidak semua pegawai memahami secara mendalam pentingnya perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hingga mencapai hasil akhir capaian yang telah dimitigasi oleh risiko.

3. Banyaknya dokumen yang harus dikerjakan dan seringnya terjadi *human error* dalam pelaksanaan rangkaian SAKIP di lingkungan Balai POM Banyumas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 26	Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa target RAPK tidak relevan lagi dengan target output yang turun menyesuaikan efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyeeuaian target bulanan (RAPK)	Koordinasi oleh seluruh tim kerja untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Dapat dibuatkan diskusi sebelum adanya desk dari Pusat.	Mempersiapkan desk SAKIP Tahun 2026	Menunggu pengumuman dari Badan POM Pusat	Y	TU/O/01	Penilaian Kinerja Organisasi tidak akurat

Tabel 3. 106 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 26

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan peningkatan nilai antara lain:

1. Monev kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dan tercapainya target indikator kinerja setiap bulan;

2. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target indikator kinerja, antara lain Inovasi dari Pokja Penguatan Akuntabilitas Zona Integritas yaitu :

   1) PIR MOKA “Pimpinan Ikut Rapat Monitoring Kinerja dan Anggaran”, Keterlibatan aktif pimpinan dalam monitoring kinerja dan anggaran meningkatkan akuntabilitas, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan penggunaan sumber daya selaras dengan target dan prioritas organisasi.

2) TERANG, Transparansi Kinerja dan Anggaran. Ketepatan waktu pelaporan, meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, serta tertibnya administrasi dan publikasi kinerja Unit Kerja.

3) KANGMAS, Kinerja dan Anggaran Balai POM di Banyumas. Memfasilitasi akses cepat terhadap data dan dokumen kinerja serta anggaran, sehingga informasi dapat diperoleh secara tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IKSS 27: Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Banyumas akan terealiasi pada akhir tahun 2026 setelah dilakukan penilaian Satuan Kerja oleh Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Triwulan II Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0			0	Belum dapat terhitung pada TW II 2026

Tabel 3. 107 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	0	0

Tabel 3. 108 Capaian IKSS 27 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Target Nilai Kinerja Angagran bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	5	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) 

Tabel 3. 109 Perbandingan IKSS 27 dengan Target Tahunan 2026

Target Nilai Kinerja Angagran bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa penyebab keberhasilan dari indikator kinerja terkait nilai kinerja anggaran, yaitu:

1. Menyelesaikan revolving GUP dilakukan sesuai ketentuan, dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo revolving GUP;
2. Melakukan Revisi DIPA sesuai dengan jadwal dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan dalam satu triwulan/semester;
3. Monitoring dan penyesuaian Revisi Halaman III DIPA secara rutin;
4. Data Kontrak disampaikan tepat waktu;
5. Monitoring realisasi output fisik (Caput) setiap bulan melalui rapat monev kinerja dan anggaran setiap bulan, dan melaporkannya tepat waktu melalui aplikasi SAKTI.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Deviasi penyerapan anggaran bulan Juni lebih dari 5% dikarenakan, antara lain: > beberapa kegiatan keikutsertaan dari Unit kerja Pusat tentative/tidak pasti jadwal kegiatannya > KRO QCD target Perkara belum tercapai sehingga mempengaruhi	Perhatikan kembali serapan anggaran yang harus dicapai dan efektifkan kembali seluruh kegiatan hingga akhir periode sehingga mampu terserap secara maksimal.	Revisi RPD TW III	Juli 2026	Y	TU/KEU/03	Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan

		pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran.						

Tabel 3. 110 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 27

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penyusunan Program Monitoring dan Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran dilaksanakan secara terstruktur melalui rapat evaluasi bulanan yang dipimpin oleh Ketua Tim masing-masing fungsi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian target kinerja organisasi, sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun kegagalan. Dalam prosesnya, evaluasi dilakukan dengan:

1. Mempertimbangkan kesesuaian antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
2. Selain itu, monitoring juga menekankan pada keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian indikator kinerja, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas program berjalan. Melalui forum evaluasi bulanan, setiap kendala yang muncul—baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun teknis pelaksanaan—dapat diidentifikasi secara dini dan segera dirumuskan solusi perbaikannya;
3. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam rekomendasi tindak lanjut yang bersifat operasional agar dapat segera diimplementasikan oleh unit terkait.

IKSS 28: Indeks Manajemen Risiko UPT

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.

2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen Risiko.

3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Target Nilai Indeks Manajemen Resiko UPT bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW II 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 28	Indeks Manajemen Risiko UPT	0	0	0	0	Belum dapat terhitung pada TW II 2026

Tabel 3. 111 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	%Capaian Terhadap Realisasi Triwulan Sebelumnya
IKSS 28	Indeks Manajemen Risiko UPT	0	0	Capaian akan muncul pada akhir periode

Tabel 3. 112 Capaian IKSS 28 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Target Nilai Indeks Manajemen Resiko UPT bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT	0	2,9	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode)

Tabel 3. 113 Perbandingan IKSS 28 dengan Target Tahunan 2026

Target Nilai Indeks Manajemen Resiko UPT bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan dari manajemen risiko ini antara lain:

1. Proses identifikasi risiko yang menyeluruh yang melibatkan seluruh fungsi organisasi. Keterlibatan pimpinan unit kerja dalam memberikan arahan dan masukan terkait implementasi manajemen risiko menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kinerja, karena setiap keputusan strategis didasarkan pada pemahaman yang jelas terhadap potensi risiko.
2. Pengembangan kompetensi pegawai memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi manajemen risiko, pelaksanaan penilaian risiko sesuai pedoman dengan melengkapi kertas kerja penentuan skor Risiko.
3. Serta tindak lanjut atas masukan dari Auditor Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi sebelum pelaporan risiko dilakukan pada aplikasi SAPAAPIP.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 28	Indeks Manajemen Risiko UPT	Perlu dilakukan update analisis resiko indikator kinerja utama semester II	Pembuatan risiko agar disesuaikan dengan kapabilitas sehingga mampu termitigasi.	update dokumen daftar resiko	Juli 2026	T	-	-

Tabel 3. 114 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 28

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target tidak lepas dari upaya peningkatan maturitas resiko melalui Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan antara lain:

1) Identifikasi risiko yang telah dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi, pimpinan masing-masing fungsi telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko di fungsinya dan memanfaatkan manajemen risiko dalam pengambilan Keputusan.

2) Peningkatan kompetensi pegawai terkait pelaksanaan manajemen resiko secara tersistem menggunakan aplikasi POKEMON (Progres Kompetensi dan Monitoring) juga turut serta meningkatkan maturitas resiko di Balai POM Banyumas.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	Melakukan sampling sesuai renlak pada Triwulan I 2026.	Selesai	Melanjutkan sampling sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/01	Masih tingginya produk sediaan farmasi yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Tidak ada kendala	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan,	Bimtek dan monitoring pelaporan KTD dari Saryanfar	Target dihitung hingga akhir tahun 2026	Monitoring pelaporan KTD/ESO dari sarana pelayanan Kesehatan yang telah diberikan	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/03	Sarana pelayanan kesehatan tidak menyampaikan laporan KTD/ESO sehingga target

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan			KIE Farmakovigilans. Perkuatan jejaring lintas sektor dengan pemerintah daerah atau organisasi profesi Kesehatan di area pengawasan BPOM Banyumas.				persentase pelaporan tidak tercapai.
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Selesai	Melanjutkan sampling pangan olahan sesuai dengan perencanaan.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/02	Masih tingginya produk sediaan pangan olahan yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.							
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak ada kendala	Untuk penanganan KLB KP tetap dari Balai POM harus melakukan pemeriksaan walaupun sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan (tetap dianjurkan untuk turun lapangan).	Tetap dilaksanakan sesuai dengan renlak	Selesai	Tetap dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di tiap Kabupaten	s.d. TW IV 2026	Y	INS/R/01	Tidak tercapainya Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan.	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Selesai	Melanjutkan sampling PIRT sesuai dengan perencanaan.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/04	Masih tingginya produk sediaan pangan PIRT yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.							persyaratan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Untuk selalu dapat berkomunikasi dengan pelaku usaha agar memudahkan proses yang sedang dilaksanakan.	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Selesai	Melanjutkan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	s.d. TW IV 2026	Y	INS/R/02	Tidak semua surat rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder seperti DKK dan asosiasi profesi secara tepat waktu.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sarana UMOT dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat diperiksa	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	Selesai	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan renlak	TW III 2026	Y	INS/O/03	Sarana produksi farmasi yang sudah tidak aktif, tidak melakukan pencabutan izin sarana sehingga akan selalu terdata di sistem

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.							BPOM. Pemeriksaan sarana produksi tidak tepat sasaran.
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala yang berarti	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	Selesai	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan renlak	TW III 2026	Y	INS/O/04	Sarana produksi farmasi yang sudah tidak aktif, tidak melakukan pencabutan izin sarana sehingga akan selalu terdata di sistem BPOM. Pemeriksaan sarana produksi tidak tepat sasaran.
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi	Selesai	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan	TW III 2026	Y	INS/S/06	Masih rendahnya kepatuhan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian		pengawasan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi.				pelaku usaha distribusi sediaan farmasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 3	Selesai	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan.	TW III 2026	Y	INS/S/09	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi pangan olahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			anggaran yang ada.							hasil pemeriksaan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	Selesai	Melanjutkan kegiatan pengawasan terhadap iklan yang menjadi ruang lingkup Balai POM di Banyumas.	TW III 2026	Y	INS/S/10	Iklan OBA SK Media penyiaran lokal (TV/Radio) jarang bisa didapatkan untuk dilakukan evaluasi
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	Tidak ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah	Dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Selesai	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/05	Tidak tercapainya presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.							ketentuan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila sedang turun di lapangan, silahkan untuk menyelipkan	Bimtek AMR Advokasi AMR	Selesai	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan. Pemeriksaan TW I dan II terlaksana 100%. Publikasi AMR TW I dan II sudah terlaksana sesuai timeline. Advokasi AMR dengan lintas sektor 1 tahun sekali sudah terlaksana 2 kali (melebihi target).	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/05	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan di masyarakat

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			materi AMR.			KIE/Bimtek AMR kepada masyarakat 1 tahun sekali sudah terlaksana.				
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Pastikan untuk SDM yang tersedia siap untuk melakukan pengujian apabila dibutuhkan.	Progres pemenuhan SKL melalui penambahan Standar Ruang Lingkup	Selesai	Melakukan verifikasi SRL ONAPPZA. Melakukan pengembangan kompetensi pengujian kimia pangan.	Akan terus berprogress hingga akhir periode.	T	-	-
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026.	Pastikan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan. Pastikan setiap bulan terdapat progress untuk mencapai target yang telah	1. Koordinasi dengan personil kunci sebelumnya terkait program KKPA dan indikator keberhasilannya. 2. Penetapan usulan lokus program KKPA. 3. Internalisasi	Selesai	Telah dibuat grup whatsapp sebagai sarana komunikasi antara PIC pengisian tools KKPA tiap Kabupaten dengan petugas Balai POM di Banyumas	Akan terus berprogress hingga akhir periode.	Y	INS/R/03	Tidak tercapainya presentase Kab/Kota yang didampingi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program. 4. Hambatan dalam proses penetapan usulan lokus.	direncanakan.	perencanaan pelaksanaan program KKPA th 2026. 4. Advokasi terhadap kabupaten yang akan menerima intetrvensi program Kabupaten/Kota Pangan Aman.						
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	Melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditentukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.	Selesai	Target tahunan telah tercapai pada bulan April 2026	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/02	Terdapat beberapa sarana produksi fortifikasi yang tidak beroperasi namun masih memiliki izin edar.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	Pelaksanaan KIE tatap muka	Rencana TW IV 2026	Menjalankan kegiatan KIE sesuai dengan renlak	s.d. TW IV 2026	Y	1. INF/R/02 2. INF/O/01 3. INF/S/03	1. Petugas KIE tidak dapat melayani permintaan KIE tatap muka yang diminta oleh stakeholder/ masyarakat. 2. Produk layanan informasi belum update status UPT dari Loka menjadi Balai. 3. Pelaksanaan KIE belum menyentuh daerah perifer.
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala yang berarti	Melanjutkan koordinasi yang telah disepakati dan untuk terus menjalankan kinerja sesuai dengan yang sudah direncanakan.	1. Advokasi (April) 2. Sosialisasi (April-Juni) 3. Bimtek (Juli-Agustus) 4. Monev (November-Desember)	Selesai	Telah dilaksanakan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, Bimtek.	Advokasi-April Sosialisasi-Juni Bimtek-Juni	Y	1. INF/IT/02 2. INF/O/03 3. INF/K/04	1. Risiko pelaporan tidak tepat waktu. 2. Risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. 3. Risiko pelaksanaan kegiatan KIE

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										yang kurang maksimal yang mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang.
19	Jumlah desa pangan aman	1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program. 2. Hambatan dalam proses penetapan usulan lokus.	Melanjutkan koordinasi yang telah disepakati dan untuk terus menjalankan kinerja sesuai dengan yang sudah direncanakan.	Advokasi Kelembagaan Keterpaduan Pangan disertai dengan penandatanganan komitmen.	Selesai	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan 2. Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kabupaten Cilacap terkait Pengawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan Aman di Desa Langgongsari Kec Cilongok Kab Banyumas. 4. Bimtek	Akan progress s.d. TW IV 2026	Y	1. INF/SDM/03 2. INF/R/03 3. INF/K/03	1. GAP Kompetensi petugas KIE. 2. Kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Desa Pangan Aman. 3. Pelaksanaan kegiatan KIE /Tahapan Desa Pangan Aman kurang maksimal.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						Komunias dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Langgongsari Kec Cilongok Kab Banyumas				
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jadwal fasilitasi yang berubah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan setda Banyumas	Melanjutkan koordinasi yang telah disepakati dan untuk terus menjalankan kinerja sesuai dengan yang sudah direncanakan.	Advokasi kelembagaan disertai dengan penandatanganan komitmen	Selesai	Sosialisasi Komunitas Pasar Banyumas	Akan progress s.d. TW IV 2026	Y	1. INF/IT/02 2. INF/O/03 3. INF/K/04	1. Risiko pelaporan tidak tepat waktu. 2. Risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. 3. Risiko pelaksanaan kegiatan KIE kurang maksimal yang mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat masih kurang.
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Masih menunggu persetujuan / penolakan	Berkoordinasi dengan unit pengampu	Bimbingan teknis untuk UMKM Pangan dan	Selesai	Kegiatan bimbingan teknis untuk UMKM	Pendampingan hingga Desember	Y	SER/S/01	Pelaku usaha yang menjadi target

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	usulan penurunan target	terkait target setiap bulannya. Hal ini juga mengantisipasi pembaharuan target ke depannya agar capaian berjalan secara optimal sesuai perencanaan.	Kosmetik		Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.Audit Sertifikasi CPOBAB Bertahap terhadap peserta pendampingan UMKM OBA	2026			pendampingan UMKM di tahun berjalan tidak bisa menyelesaikan proses sertifikasi CPPOB / CPOTB / CPKB karena keterbatasan sumber daya dalam mempersiapkan sarana produksi maupun dokumen mutu
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak ada kendala yang berarti	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan	Melaksanakan agenda selanjutnya sesuai dengan renlak	Selesai	Kegiatan pendalaman informasi sudahselesai dilaksanakan	s.d. TW IV 2026	Y	P/H/02	Perbedaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lama dengan yang terbaru. KUHAP

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			target yang telah ditetapkan							
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala yang berarti	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.	Melaksanakan pelaporan siber sesuai dengan ketentuan dan perencanakan yang telah ditetapkan	Selesai	Kegiatan penggalangan lintas sektor dan pelaku usaha dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat OOT	s.d. TW IV 2026	Y	P/O/01	Peredaran penyalahgunaan obat- obat tertentu dan obat psikotropika ilegal di area pengawasan Balai POM di Banyumas
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum terdapat kendala yang berarti	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan	Penetapan PIC masing-masing aspek pada pelayanan publik	Selesai	Sudah dilakukan pengisian survei PEKPPP sebagai tools penilaian Indeks Pelayanan Publik, wawancara	s.d. TW IV 2026	Y	SER/S/02	Menurunnya nilai indeks pelayanan publik Balai POM di Banyumas

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan			konfirmasi pengisian survey serta pengisian data dukung tambahan sesuai hasil wawancara.				
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Informasi kendala dari Auditor Internal. Narasi dalam LKE dan data dukung yang disampaikan tidak sesuai.	Pastikan untuk LKE diisi sesuai dengan ketentuan yang ada dan melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi dari auditor internal.	Melakukan review LKE ZI		Pelaksanaan desk ZI dan rapat progress ZI sampai dengan bulan Juni 2026	s.d. TW IV 2026	T	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	1. Penghematan anggaran tidak di sertai dengan penyesuaian target 2. Kertas kerja penghitungan capaian kinerja belum ditetapkan dari pusat sehingga	Mohon untuk selalu berkomunikasi dengan roren untuk kelanjutan capaian kinerja dan output masing-masing IKU dan program	Melaksanakan TL AKIP 2025	Selesai	Pengisian RATL hasil evaluasi di SAPA APIP	s.d. TW IV 2026	Y	TU/O/01	Penilaian Kinerja Organisasi tidak Akurat

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		penghitunagn capaian belum bisa dilakukan sesuai pedoman	kegiatan							
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Pada KRO CBV (Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%, Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV =	Mohon untuk selalu menindaklanjuti dan aktif berkomunikasi dengan pusat terkait anggaran dan penyesuaian RPD yang sedang berjalan	Berkoordinasi dengan PIC Keuangan Balai POM Banyumas di Biro Perencana dan Keuangan	Selesai	1. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran dan pengingat percepatan realiasi anggaran kepada pengelola kegiatan/pemilik anggaran setiap hari senin tiap minggu 2. Peningkatan kompetensi PPK/PBJ administrasi pencairan anggaran belanja di inaproc melaui kegiatan HAITalk tema	s.d. TW IV 2026	Y	TU/KEU/03	Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW I 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		90%. Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).				"Ngulik Alur Pengadaan Katalog Elektronik & Pendaftaran Kontrak pada SAKTI".				
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Dokumen peta resiko masih dalam proses penyusunan	Segera melakukan tindaklanjut dan memenuhi hasil evaluasi maturitas risiko Balai POM di Banyumas	1. Melakukan TL penilaian manrisk Balai POM di Banyumas. Penyusunan peta resiko.	Selesai	Telah dilaksanakan sosialisasi Petunjuk Penerapan Manajemen Risiko	s.d. TW IV 2026	Y	-	-

Tabel 3. 115 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Tiap Indikator Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

Per Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-063.01.2.672844/2026 dengan jumlah revisi lima kali. Revisi DIPA terakhir tertanggal 23 Juni 2026 sebesar Rp 7.763.760.000,- atau tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah. Dari total anggaran tersebut, total dana untuk pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas sebesar Rp 4.173.108.000,- serta total dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana sebesar Rp 3.590.652.000,-.

Pada Triwulan II Tahun 2026 terdapat target serapan anggaran yang ditetapkan oleh Tim Keuangan yakni sebesar Rp 2.755.317.284,- dan terlaksana serapan anggaran tersebut sebesar Rp 2.698.940.268,-. Dengan kata lainnya, terserap sebesar 97,95% dari target Tim Keuangan. Apabila di bandingkan dengan pagu alokasi anggaran, serapan anggaran pada Triwulan II Tahun 2026 ini sebesar 34,76% dan akan terserap optimal di akhir periode tahun 2026.

Pengelolaan anggaran di Balai POM di Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut tabel efisiensi anggaran Balai POM di Banyumas.

a. Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	6	7	116,67	5.000.000	4.714.000	94,28	1,2	0,24	Efisien (95%)
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	27	27	100	5.000.000	4.660.000	93,20	1,1	0,07	Efisien (100%)
3	BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	14.480.000	2.030.000	14,02	0,0	-1,00	Tidak Efisien, akan segera efisien pada akhir tahun sejalan dengan capaian output.

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
4	BDB.002	Desa Pangan Aman	0	0	0	22.431.000	11.405.595	50,85	0,0	-1,00	Tidak Efisien, akan segera efisien pada akhir tahun sejalan dengan capaian output.
5	BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0	0	0	19.569.000	5.200.000	26,57	0,0	-1,00	Tidak Efisien, akan segera efisien pada akhir tahun sejalan dengan capaian output.
6	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	90	120	133,33	13.860.000	3.475.000	25,07	5,3	4,32	Tidak Efisien (75%). Ke depannya penyerapan anggaran akan disesuaikan dengan capaian output. Capaian output sudah sangat melebihi karena sebelumnya masih menggunakan target sbeleum adanya efisiensi anggaran.
7	BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	72	72	100	13.387.000	3.016.100	22,53	4,4	3,44	Tidak Efisien (75%). Produk yang menyerap

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
											anggaran besar akan mulai penyamplingan pada Juli 2026.
8	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	75.843.000	26.398.350	34,81	0,0	-1,00	Tidak Efisien
9	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	5	5	100	7.666.000	2.010.096	26,22	3,8	2,81	Tidak Efisien (75%). Akan segera terserap pada akhir periode.
10	CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0	3.532.955.000	0	0,00	0,0	-1,00	Tidak Efisien, karena capaian dan anggaran belum berjalan
11	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0	83.534.000	38.058.266	45,56	0,0	-1,00	Tidak Efisien, capaian *output* tercapai pada akhir periode.
12	QCD.U06	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM Kab Banyumas	0	0	0	104.479.000	49.466.773	47,35	0.0	-1.00	Tidak Efisien. Capaian output berupa 1 perkara akan tercapai pada akhir periode.
13	QDC.002	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100	4.239.000	4.231.000	99,81	1,0	0,00	Efisien (100%)
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	0	1	100	7.986.000	4.240.000	53,09	1.9	0.88	Efisien (88%)

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
		oleh UPT									
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21	21	100	53.606.000	14.314.030	26,70	3,7	2,75	Tidak Efisien (75%). Akan segera mencapai efisien hingga akhir periode.
16	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	54	61	112,96	30.143.000	15.423.493	51,17	2,2	1,21	Tidak Efisien (84%). Akan segera mencapai efisien hingga akhir periode.
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21	21	100%	45.135.000	21.376.500	47,36	2,1	1,11	Tidak Efisien (86%)
18	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	3	3	100%	3.620.000	2.046.300	56,53	1,8	0,77	Efisien (90%)
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	74	74	100%	130.175.000	40.658.000	31,23	3,2	2,20	Tidak Efisien (75%). Akan segera mencapai efisien hingga akhir periode.
20	EBA.956	Layanan BMN	0	0	0%	2.787.000	1.020.000	36,60	0,0	-1,00	Tidak Efisien. Capaian output berupa 1 layanan yang dicapai pada akhir periode.
21	EBA.994	Layanan Perkantoran	0	0	0%	3.587.865.0	2.445.196.	68,15	0,0	-1,00	Tidak Efisien.

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
		UPT				00	765				Capaian output berupa 1 layanan yang dicapai pada akhir periode.
Efisiensi Berdasarkan Capaian Output					1262,96			951,1	1,33	0,33	**Efisien (95%)**

Tabel 3. 116 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 dengan output berupa capaian setiap kegiatan, Balai POM di Banyumas menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,33 yang termasuk dalam kriteria 'Efisien'. Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dengan menghasilkan output yang sebanding dengan alokasi dana yang tersedia. Capaian efisiensi tersebut juga mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program kerja, di mana sebagian besar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana tanpa menimbulkan pemborosan anggaran. Selain itu, hasil ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran telah berjalan efektif, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Terdapat 1 KRO dengan anggaran yang cukup tinggi namun penyerapan belum ada yaitu KRO CBV “Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia”, komponen anggaran ini berupa belanja Modal untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Banyumas berupa pematangan lahan dan perencanaan pembangunan. Rendahnya penyerapan anggaran Balai POM Banyumas pada belanja modal sebesar 3,5 M, namun karena efisiensi ada kebijakan dari Pusat untuk menahan dulu penggunaan anggaran tersebut sehingga tidak ada penyerapan sampai dengan TW I, untuk TW II telah mengusulkan revisi DIPA untuk penggunaan anggaran tersebut sebesar 970 jt digunakan untuk Renovasi Gedung Pinjam pakai milik Kementerian keuangan, sisanya masih tidak boleh digunakan sebesar 2,5 M. Balai POM di Banyumas telah meyampaikan kendala tersebut yang berdampak pada rendahnya penyerapan angagran dan rendahnya Nilai Kinerja Anggaran melalui Nota Dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.

b. Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target Triwulan II 2026	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41	93,38	106,83	29.487.000	14.767.993	50,08 %	2,1	1,1	Tidak Efisien (86%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	4.239.000	0	0,00 %	0.0	-1.0	Tidak Efisien, belum ada capaian dan serapan anggaran
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	80,26	104,23	36.988.140	9.876.681	26,70 %	3,8	2,8	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	536.060	143.140	26,70 %	3,7	2,7	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
										periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92	105,75	4.288.480	1.145.122	26,70 %	4,0	3,0	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	96,25	100,23	7.921.400	1.810.000	22,85 %	4,4	3,4	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	93,33	101,81	16.275.300	9.916.500	60,93 %	1,7	0,7	Efisien (90%)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	84,13	101,36	20.938.300	9.650.000	46,09 %	2,2	1,2	Tidak Efisien (86%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
										terserap secara optimal.
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	100	104,07	72.485.750	21.654.500	29,87 %	3,5	2,5	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33	80	103,45	49.437.500	16.869.000	34,12 %	3,0	2,0	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	94,42	100,04	1.800.000	0	0,00 %	0,0	-1,00	Tidak Efisien. Serapan anggaran pada iklan ini akan terus berproses dan akan terserap optimal pada akhir periode.
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87,36	94,44	108,10	13.387.000	3.016.100	22,53 %	4,8	3,8	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
										dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	6.451.750	2.134.500	33,08 %	0,0	-1,00	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan terlihat di akhir periode)
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,5	6,65	102,31	83.534.000	38.058.266	45,56 %	2,2	1,2	Tidak Efisien (86%). Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara optimal.
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	11.793.320	3.149.087	26,70 %	0,0	-1,00	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan terlihat di akhir periode)
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37,50	37,50	100	3.620.000	2.046.300	56,53 %	0,0	-1,00	Tidak Efisien. Serapan anggaran akan terus berproses hingga akhir periode dan telah dipastikan untuk terserap secara

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
										optimal.
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	90,33	101,21	21.526.000	4.960.096	23,04 %	4,4	3,4	Tidak Efisien (75%). Serapan anggaran yang besar akan digunakan mulai Triwulan III Tahun 2026.
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70%	70%	100%	14.480.000	2.030.000	14,02 %	7,1	6,1	Tidak Efisien (75%). Capaian berupa output akan tercapai pada akhir periode.
19	Jumlah desa pangan aman	72%	72%	100%	22.431.000	11.405.595	50,85 %	2,0	1,0	Efisien (88%)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70%	70%	100%	19.569.000	5.200.000	26,57 %	3,8	2,8	Tidak Efisien (75%). Capaian berupa output akan tercapai pada akhir periode.
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	53,33	106,66	7.986.000	4.240.000	53,09 %	2,0	1,0	Efisien (88%)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	0	0	104.479.000	49.976.773	47,83 %	0,0	-1,00	Tidak Efisien, karena kendala eksternal geokriminal perkara yang membuat capaian kinerja sebesar 0

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
										dan berakibat serapan anggaran tidak seimbang dengan capaian kinerja.
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	5.000.000	4.714.000	94,28 %	1,1	0,1	Efisien (100%)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	5.000.000	4.660.000	93,20 %	0.0	-1.0	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan terlihat di akhir periode)
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	3.696.757.500	134.576.602	3,64 %	0.0	-1.0	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan terlihat di akhir periode)
26	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	1.154.920.500	810.138.269	70,15 %	0.0	-1.0	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan terlihat di akhir periode)
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	2.312.765.000	1.514.816.069	65,50 %	0.0	-1.0	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
										terlihat di akhir periode)
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	35.007.000	12.679.175	36,22 %	0.0	-1.0	Tidak Efisien, terlihat belum terdapat capaian bulanan (capaian akan terlihat di akhir periode)
Efisiensi Berdasarkan Indikator Kinerja Utama				1.946, 05%			1.086 ,83%	1,79	**0,79**	**Efisien (90%)**

Tabel 3. 117 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 dengan output berupa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Balai POM di Banyumas menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,79. Mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian tersebut dikategorikan sebagai 'Efisien dalam persentase 90%'. Efisiensi belum mencapai 100% karena banyak anggaran yang belum terserap maksimal dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masih terdapat yang bersifat tahunan. Terdapat satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak memenuhi target yakni Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang disebabkan situasi geokriminal atau rawan kasus di wilayah Cilacap belum kondusif untuk dilakukan penindakan karena pelaku usaha jamu BKO untuk sementara ini menghentikan kegiatan produksinya. Ke depannya akan dilakukan evaluasi dan ketercapaian di bulan Juli 2026. Meskipun terdapat tantangan dalam optimalisasi penggunaan anggaran, komitmen dan konsistensi Balai POM di Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tetap terjaga, sehingga tujuan program dapat diwujudkan secara menyeluruh.

Berikut Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis:

No	Sasaran Strategis	%Capaian Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Pagu	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	82,45%	360.219.000	33.313.070	9,25%	8,29	7,29	Tidak Efisien (75%). Untuk SS1 ini belum efisien karena adanya capaian kinerja yang bersifat tahunan, akan segera tercapai hingga akhir periode.
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00%	3.620.000	2.046.300	56,53%	1,77	0,77	Efisien (90%)
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,30%	78.276.000	3,881,400	4.96%	20,22	19,22	Tidak Efisien (75%). IKU sekolah, desa, dan pasar tercapai secara optimal pada akhir periode tahun 2026 ini.
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,66%	7,986,000	4.240.000	53,09%	2,0	1,0	Efisien (88%)
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0.00%	123,773,000	23,981,500	19.38%	0.00	-1.00	Tidak Efisien, karena ketidakcapaian IKU karena adanya hambatan eksternal berupa situasi geokriminal pada tempat perkara. Akan dimaksimalkan pada Triwulan III dan IV.
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang	100.00%	5,000,000	2,635,000	52.70%	1.90	0,90	Efisien (88%)

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif							
7	Layanan Publik UPT yang prima	0.00%	5,000,000	2,874,500	57.49%	0.00	-1.00	Tidak Efisien. Capaian bersifat tahunan sehingga akan efisien pada akhir periode tahun 2026.
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	0.00%	7,499,624,000	1,533,169,863	20.44%	0.00	-1.00	Tidak Efisien. Capaian bersifat tahunan sehingga akan efisien pada akhir periode tahun 2026.
Efisiensi Berdasarkan Sasaran Strategis		**489,41%**			**220,75%**	**2,22**	**1,22**	**Tidak Efisien (75%)**

Tabel 3. 118 Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran yang berdasarkan dengan output berupa sasaran strategis, Balai POM di Banyumas dalam Triwulan II Tahun 2026 masih termasuk dalam kriteria "Tidak Efisien (75%)". Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya menghasilkan output yang sebanding dengan alokasi dana yang tersedia. Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang belum tercapai pada Triwulan II ini yakni "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" serta 2 (dua) sasaran strategis yang sifatnya akan dicapai pada akhir periode Tahun 2026 yakni "Layanan Publik UPT yang prima" dan "Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal". Hal tersebut dianggap menjadi alasan ketidakefisienan anggaran yang digunakan. Meskipun demikian, capaian akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian strategi agar pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal, memperkuat efektivitas program, meningkatkan kualitas output, serta memastikan setiap kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor, Balai POM di Banyumas memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pada triwulan berikutnya dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih baik.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang disusun sebagai arahan langsung dari Kepala Balai POM di Banyumas. Keseluruhan poin yang tercantum merupakan hasil penelaahan atas Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menilai capaian yang telah diraih sekaligus memberikan arah strategis bagi peningkatan pengawasan obat dan makanan di masa mendatang.

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat positif. Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama berada pada kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Ada beberapa output yang akan dihitung akan dievaluasi secara komprehensif pada akhir tahun. Namun perhitungan efisiensi anggaran masih berada pada kategori “Tidak Efisien” karena dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Hal ini menegaskan bahwa Balai POM di Banyumas berkomitmen melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif, dengan kontribusi nyata terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing pelaku usaha di wilayah kerja Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dengan demikian, target kinerja Triwulan II dapat dikatakan tercapai secara optimal, sekaligus menjadi landasan untuk memperkuat konsistensi pencapaian pada triwulan berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas akan terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar sejalan dengan capaian kinerja. Dengan komitmen bersama, diharapkan hasil evaluasi pada triwulan berikutnya dapat menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, sekaligus memperkokoh peran Balai POM dalam melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan nasional.

4.2 Saran

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Setiap fungsi lebih memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta memudahkan akses dan integrasi data lintas fungsi.
3. Masing-masing fungsi harus berperan aktif memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra kerja lainnya guna mendukung keberhasilan program pengawasan obat dan makanan.
4. Melakukan peningkatan inovasi dalam pelayanan publik maupun pendampingan UMKM yang berdampak nyata terhadap masyarakat
5. Menggiatkan peningkatan kompetensi pegawai mengikuti kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang terkini.

LAMPIRAN

Arahan Balai POM di Banyumas Terkait Laporan Kinerja Interim Triwulan II 2026

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.02.28B.07.26.313

Yth.	: Ketua Tim Kerja Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Balai POM di Banyumas
Dari	: Kepala Balai POM di Banyumas
Lampiran	: -
Hal	: Arahan Pimpinan untuk Bab IV Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Tanggal	: 17 Juli 2026

Sehubungan dengan permintaan permintaan Kesimpulan dan Saran Bab IV Laporan Kinerja (Lapkin) Triwulan II Balai POM di Banyumas Tahun 2026 pada surat nota dinas nomor PR.08.02.28B1.07.26.312, berikut disampaikan arahan Pimpinan untuk Kesimpulan dan Saran Pada Bab IV Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Untuk selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Balai POM di Banyumas Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN:
Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sangat positif. Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama berada pada kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Ada beberapa output yang akan dihitung akan dievaluasi secara komprehensif pada akhir tahun. Namun perhitungan efisiensi anggaran masih berada pada kategori “Tidak Efisien” karena dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Hal ini menegaskan bahwa Balai POM di Banyumas berkomitmen melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif, dengan kontribusi nyata terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing pelaku usaha di wilayah kerja Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dengan demikian, target kinerja Triwulan II dapat dikatakan tercapai secara optimal, sekaligus menjadi landasan untuk memperkuat konsistensi pencapaian pada triwulan berikutnya.
Sebagai tindak lanjut, Balai POM di Banyumas akan terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar sejalan dengan capaian kinerja. Dengan komitmen bersama, diharapkan hasil evaluasi pada triwulan berikutnya dapat menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, sekaligus memperkokoh peran Balai POM dalam melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SARAN:

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Setiap fungsi lebih memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta memudahkan akses dan integrasi data lintas fungsi.
3. Masing-masing fungsi harus berperan aktif memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan mitra kerja lainnya guna mendukung keberhasilan program pengawasan obat dan makanan.
4. Melakukan peningkatan inovasi dalam pelayanan publik maupun pendampingan UMKM yang berdampak nyata terhadap masyarakat
5. Menggiatkan peningkatan kompetensi pegawai mengikuti kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang terkini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih.



Gidion, S.Si., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029

diakses secara lengkap pada: https://bit.ly/Renstra2025-2029_BalaiPOMBanyumas.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
JL. Gn. Singgalang No. 14, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, 53121
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300
Email : bpom_banyumas@pom.go.id : bpom.banyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
NOMOR HK.02.02.24B.12.25.68 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Banyumas tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Banyumas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kabupaten Banyumas
Pada tanggal : 5 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
JL. Gn. Singgalang No. 14, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, 53121
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300
Email : bpom_banyumas@pom.go.id : bpom.banyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
NOMOR HK.02.02.24B.09.25.56 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANYUMAS TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

Menimbang :
a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 7 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR : HK.02.02.24B.09.25.56 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 OKTOBER 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,38
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,58
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	37,25
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,85
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,96
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Banyumas Tahun 2026

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIDION

Jabatan : KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GIDION	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
ris.pom.go.id/new/t/2026#/renja/rekapitulasi

piran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS

.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.41 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.03 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
id/new/t/2026#/renja/rekapitulasi

AM Simetris

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Jumlah Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37.25 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
oom.go.id/new/t/2026#/renja/rekapitulasi

AM Simetris

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.22 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.96 %
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Indeks
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 8,083,498,000 (Delapan Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,492,663,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,590,835,000

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GIDION	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
pom.go.id/new/t/2026#/renja/rekapitulasi

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Banyumas Tahun 2026

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	30,143,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	4,239,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	36,988,140
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	536,060
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,288,480
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	7,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,542,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	30,252,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	66,303,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	51,416,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	1,780,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	13,387,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	5,815,250
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			6	6	6	6.5	6.5	6.5	7	7	7	7.5	83,534,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												50	11,793,320
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	12.5	37.5	63	63	63	63	63	63	63	63	3,620,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	21,526,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	20	25	25	25	45	70	70	95	100	2	14,480,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	15	27	52	72	72	74	74	80	100	1	22,701,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	10	25	50	70	75	80	80	80	100	1	19,569,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	37.25	7,986,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				10	25	35	50	60	70	77	87	100	124,648,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	4,125,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.22	5,000,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	4,079,550,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.96	1,115,699,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,281,306,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	23,069,000
														Total	8,083,498,000

BANYUMAS, 26 February 2026

KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi I B04-B11 Balai POM di Banyumas Tahun 2026

(Tanggal Revisi 9 Juni 2026)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	30,143,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	4,239,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	36,988,140
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	536,060
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,288,480
		06 - Persentase	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	7,200,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,542,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	30,252,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	66,303,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	51,416,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	1,780,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	13,387,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	5,815,250
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			6	6	6	6.5	6.5	6.5	7	7	7	7.5	83,534,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												50	11,793,320
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	12.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	63	3,620,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	21,526,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	20	25	25	70	70	70	70	95	100	1	14,480,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	15	27	52	72	72	74	74	80	100	1	22,701,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	10	25	50	70	75	80	80	80	100	1	19,569,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	37.25	7,986,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						10	15	45	55	80	85	100	124,648,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	4,125,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.22	5,000,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	4,079,550,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.96	1,115,699,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,281,306,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	23,069,000
														Total	8,083,498,000

BANYUMAS, 09 June 2026

KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

GIDION

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERTAS KERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI POM DI BANYUMAS TRIWULAN II TAHUN 2026

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum terdapat kendala	Akan mulai kegiatan inspeksi sesuai dengan perencanaan dan ruang lingkup pada bulan berikutnya	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		87.41	95.83	91.67	90.00	90.00	91.88	Tidak ada kendala yang berarti	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		87.41	96.88	95.00	93.33	92.50	94.43	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		87.41	96.88	92.86	95.00	93.85	94.64	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		87.41	96.15	91.67	93.33	93.68	93.71	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		87.41	94.74	90.91	96.67	91.20	93.38	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Link Data Dukung
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum terdapat kendala	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		77.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	#DIV/0!	82.14	Tidak ada kendala yang berarti	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		77.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	#DIV/0!	82.50	Belum terdapat kendala	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		77.00	100.00	100.00	84.62	46.15	38.46	#DIV/0!	81.73	Belum terdapat kendala	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		77.00	100.00	100.00	75.00	56.25	43.75	#DIV/0!	81.25	Belum terdapat kendala	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		77.00	100.00	100.00	65.00	55.00	45.00	#DIV/0!	78.75	Belum terdapat kendala	sampel Panngan olahan.xlsx

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	20.00	Belum terdapat kendala	Akan mulai kegiatan inspeksi sesuai dengan perencanaan dan ruang lingkup pada bulan berikutnya	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	87.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	90.00	Tidak ada kendala yang berarti	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	87.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	95.00	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	87.00	100.00	100.00	100.00	33.33	100.00	100.00	93.33	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	96,03	94.44	100.00	97.22	Tidak ada kendala yang berarti	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	96,03	92.31	100.00	96.15	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	96,03	93.75	100.00	96.88	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	96,03	92.75	100.00	96.38	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	96,03	92.71	100.00	96.35	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	96,03	92.50	100.00	96.25	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	91.67	0	0	0	0	0	Target jumlah sarana berkurang atau terpotong dari 14 sarana menjadi 10 sarana dan tidak memungkinkan untuk setiap bulan terdapat sarana yang diperiksa.	Kendala ini akan coba didiskusikan oleh Roren bagian Perencanaan	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	91.67	0	0	0	100.00	100.00	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	91.67	0	100.00	0	100.00	100.00	Sarana UMOT dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat diperiksa	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	91.67	0	100.00	0	87.50	93.75	Pemeriksaan sarana IKOS bulan April berdasarkan pengaduan masyarakat. Telah dilakukan koordinasi dengan PIC Pusat dan merekomendasikan dilakukan pemeriksaan untuk capaian rutin.	Memasukan IKOS tersebut dalam renlak dengan justifikasi pengaduan masyarakat. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai renlak.	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	91.67	0	100.00	0	87.50	93.75	pemeriksaan IEBA yang akan dilakukan adalah pemeriksaan rutin sekaligus konfirmasi resertifikasi tanpa audit. Sehingga memerlukan koordinasi dengan Dit. Was OTSK	Mengajukan surat permohonan joint inspection dengan Dit. Was OTSK. Pemeriksaan rutin IEBA dilaksanakan dengan joint inspection dengan bagian Ketua Tim Kerja Kemandirian UPT.	JAN - JUN 2026

Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	91.67	0	95.00	0	91.67	93.33	pemeriksaan sarana bulan Juni tidak sesuai renlak yang disampaikan ke Dit. Was OTSK dikarenakan sarana target tutup sehingga dialihkan ke sarana lain. Pemeriksaan sarana selanjutnya merupakan inspeksi rutin sekaligus untuk menindaklanjuti temuan inspeksi sebelumnya yang masih berkaitan.	Konsultasi melalui Whatsapp ke pihak Dit. Was OTSK dan diberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan rutin sesuai kondisi terkini.	JAN - JUN 2026

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	83.00%	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	83.00%	5.00	5.00	100.00	4.00	5.00	80.00	4.00	5.00	80.00	86.67	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	83.00%	7.00	7.00	100.00	6.00	7.00	85.71	5.00	7.00	71.43	85.71	Sarana UMOT dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat diperiksa	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	83.00%	9.00	9.00	100.00	7.00	9.00	77.78	7.00	9.00	77.78	85.19	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	83.00%	11.00	11.00	100.00	9.00	11.00	81.82	8.00	11.00	72.73	84.85	Pedoman TL dan pengisian SIPT belum dipahami dengan optimal	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	83.00%	21.00	21.00	100.00	15.00	21.00	71.43	17.00	21.00	80.95	84.13	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis	Kendala	RTL	Link Data Dukung*
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	77,33	9	9	20,00	7	9	54,44	8	9	8,89	83,33	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 3	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	77,33	13	15	17,33	10	13	53,85	10	13	7,69	78,87	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 4	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	77,33	26	23	20,00	19	26	51,15	19	26	7,31	78,46	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 3	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	77,33	27	24	20,00	20	27	51,85	20	27	7,41	79,26	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

														disetujui oleh roren dan kedeputian 4	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	77,33	28	25	20,00	21	28	52,50	21	28	7,50	80,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 5	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	77,33	28	25	20,00	21	28	52,50	21	28	7,50	80,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 6	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	94,38	92,86	97,50	93,33	100,00	89,00	94,54	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1KD8Na6cscuirYM1B2nMuOWKqkN--bvhu
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	94,38	95,45	96,88	94,44	94,44	93,00	94,84	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1KD8Na6cscuirYM1B2nMuOWKqkN--bvhu
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	94,38	93,33	93,75	97,44	92,59	95,00	94,42	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1KD8Na6cscuirYM1B2nMuOWKqkN--bvhu
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	94,38	93,33	93,75	97,44	92,59	95,00	94,42	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1Axo-8Mf6esQUZbMmtkFOx-X3nUO1Y-5J
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	94,38	93,33	93,75	97,44	92,59	95,00	94,42	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1Axo-8Mf6esQUZbMmtkFOx-X3nUO1Y-5J
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	94,38	93,33	93,75	97,44	92,59	95,00	94,42	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1Axo-8Mf6esQUZbMmtkFOx-X3nUO1Y-5J

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	2%	2%				0.02	0	Tidak ada kendala	Koordinasi kepada lintas sektor untuk pelaksanaan program PJAS Aman	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	5%	5%				0.05	0	Sinkronisasi jadwal petugas dan jadwal dinas terkait untuk dapat melakukan koordinasi	Advokasi kelembagaan (penentuan secara resmi lokus sekolah yang diintervensi) pada Bulan April 2026	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	20%	20%				0.20	0	Tidak ada kendala yang berarti	1. Advokasi (April) 2. Sosialisasi (April-Juni) 3. Bimtek (Juli-Agustus) 4. Monev (November-Desember)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25%	25%				0.25	0	Tidak ada kendala yang berarti	2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Juni)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanaka	Mei	25%	25%				0.25	0	Tidak ada kendala yang	2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Juni)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link

n Pembudayaan Keamanan Pangan									berarti		
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70%	25%	20%	25%		0.70	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pendampingan Kick-off Program PJAS di Sekolah Intervensi, dan Juli-Oktober (Tahap Monev dan Sertifikasi)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link

Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		Kendala : tidak ada Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Januari a. Persiapan dan Penunjukan PIC b. Sosialisasi program Desa, Pasar, Sekolah pada tanggal 22 Januari Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	Koordinasi terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas	Desa Pangan Aman 2026
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0	5.00		Kendala : Sinkronisasi jadwal petugas dan jadwal dinas terkait untuk dapat melakukan koordinasi Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas,	Akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	Desa Pangan Aman 2026

										Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan		
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0	15.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan Melakukan persiapan kegiatan Advokasi : 1. Permohonan fasilitasi ke Setda Banyumas 2. Permohonan dukungan kepada Bupati 3. Permohonan sambutan kepada Bupati dan narasumber kepada Sekda 4. Menyiapkan administrasi kegiatan.	Telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	Desa Pangan Aman 2026

Jumlah Desa Pangan Aman	April	27	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	27.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya	Desa Pangan Aman 2026
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	52	25.00	25.00	0.00	0.00	2	52.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026	Desa Pangan Aman 2026

Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	72	25.00	25.00	20.00	0.00	2	72.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026 4. Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Juni 2026	Desa Pangan Aman 2026

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		Kendala : tidak ada Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Januari a. Persiapan dan Penunjukan PIC b. Sosialisasi program Desa, Pasar, Sekolah pada tanggal 22 Januari 2026 Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar 4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi 5. Pengawalan	Koordinasi terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK, meliputi DinkopUKM dan Dinas Kesehatan Banyumas.	1. JANUARI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		Kendala : Sinkronisasi jadwal petugas dan jadwal dinas terkait untuk dapat melakukan koordinasi Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait	Akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	2. FEBRUARI

									mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK, meliputi DinkopUKM dan Dinas Kesehatan Banyumas. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		Kendala: Jadwal fasilitasi program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas yang berubah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekretariat daerah Kabupaten Banyumas Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Maret melaksanakan fasilitasi program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan Dilakukan persiapan kegiatan Advokasi Kelembagaan.	Telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	3. MARET

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.	Telah dilaksanakan advokasi kelembagaan pada 8 April 2026 dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026.	4. APRIL
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar:	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026, 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026, 3. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026.	5. MEI

									1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026, 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026, 3. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026. 4. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar tanggal 23 Juni 2026	6. JUNI

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)	Link Data Dukung
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	0	0.00	0.00	0.00			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	10.00	10.00	10.00	10.00	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	20	25.00	30.00	10.00	21.67	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	30	35.00	30.00	30.00	31.67	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	40	45.00	45.00	40.00	43.33	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	50	50.00	60.00	50.00	53.33	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	**Nilai Realisasi SPDP**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	**Nilai Realisasi Tahap I**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	**Nilai Realisasi P21**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	**Nilai Realisasi Tahap II**	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
Januari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Belum ada kendala	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
Februari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kendala	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
Maret	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kendala yang berarti	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
April	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kendala yang berarti	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
Mei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Sedang proses revisi anggaran dan target bulanan pada RAPK	Perubahan target capaian perkara per bulan sudah diusulkan ke Roren
Juni	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Pada tanggal 26 februari 2026 sudah dilakukan operasi penertiban terhadap kegiatan produksi obat tradisional yang diduga mengandung bko di desa pagubugan	Perkuat justifikasi pada pelaporan dan pelaksanaan kegiatan operasi penindakan pada bulan Juli 2026

																	kecamatan binangun Cilacap, namun saksi terlapor tidak memenuhi panggilan pemeriksaan 2 kali secara berturut turut tanpa alasan yang sah, sehingga membutuhkan upaya lanjutan untuk pengembangan penanganan kasus dan penelusuran keberadaan saksi atau terlapor	

Link Data Dukung:

- Juni: https://drive.google.com/drive/folders/1_FNgbjwFjEi4HUikF4iiR8WwPQjcnpxS?usp=sharing.

Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar Balai POM di Banyumas TW II 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Januari	87.36%	100,00	83,33	91,67	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Februari	87.36%	100,00	83,33	91,67	Belum ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Maret	87.36%	100,00	83,33	91,67	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	April	87.36%	100,00	87,50	93,75	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Mei	87.36%	100,00	88,33	94,17	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juni	87.36%	100,00	88,89	94,44	Belum ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0%	0%	Pada bulan Januari tidak ada target terkait IKU ini	Perhatikan perencanaan yang telah diitetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup
Februari	0%	0%	Belum ada KLB di BPOM Banyumas	Pertahankan capaian yang telah tercapai, mohon untuk selanjutnya dalam pelaksanaan dapat terus memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran
Maret	0%	0%	Belum ada KLB di BPOM Banyumas	Untuk penanganan KLB KP tetap dari Balai POM harus melakukan pemeriksaan walaupun sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan (tetap dianjurkan untuk turun lapangan).
April	0%	0%	Belum ada KLB di BPOM Banyumas	Tetap koordinasi dengan dinas kesehatan, mohon dipelajari DO terkait KLB dan bersurat ke Roren dan Unit Pengampu terkait meminta penjelasan mengenai IKU ini
Mei	100%	100%	Belum ada kendala	Pastikan bahwa data dukung yang dibutuhkan tersedia dengan jelas dan lengkap sebagai bukti pelaksanaan daripada kasus KLB. Ke depannya, tetap jalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sampel KLB.
Juni	100%	100%	Pada bulan Juni tidak ada KLB di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Capaian 100% merupakan akumulasi dari adanya pencapaian pada bulan Mei 2026 sesuai dengan ketentuan Manual IKU.	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	Standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran pembelian alat pada TA 2026	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	-	-	Standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran pembelian alat pada TA 2026	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	6	6.12	Standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran pembelian alat pada TA 2026	Pastikan untuk SDM yang tersedia siap untuk melakukan pengujian apabila dibutuhkan.
April	6	6.12	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal daerah Banyumas untuk memperluas kegiatan pengujian dan dapat mempertimbangkan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Pusat dengan disesuaikan oleh kemampuan laboratorium BPOM Banyumas.
Mei	6	6.12	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Untuk sementara menyesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas. Pastikan untuk terus saling berkoodinasi mengenai renovasi laboratorium. Terkait kegiatan foodsec pada Lapas dapat dikoordinasikan dan dibahas kemudian.
Juni	6.5	6.65	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Berkoordianasi dengan P3OMN agar mampu memenuhi peralatan yang sesuai dengan standar Balai. Siapkan perlengkapan untuk menjadi dasar justifikasi sehingga apabila ditanyakan sudah ada datanya.

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Kegiatan KIE tatap muka diagendakan di akhir bulan, sehingga hanya dapat realisasi dari KIE melalui media	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	Tidak terdapat kendala pelaksanaan	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	89.25	90.38	Tidak terdapat kendala pelaksanaan	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.
April	89.25	90.44	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	Memaksimalkan KIE kepada masyarakat agar memasifkan edukasi dari BPOM. Diskominfo siap mendampingi apabila dibutuhkan. Ke depannya, dapat ditingkatkan koordinasi dengan pihak eksternal untuk melebarkan media yang biasa digunakan oleh pihak eksternal tersebut.
Mei	89.25	90.41	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	1. Pastikan Balai POM di Banyumas untuk terus update KIE pada media sosial. Tim Media Sosial menyepakati bersama terkait higlight gambar dan skenario. Unggahan tersebut mana yang menjadi poin utamanya, gambar atau skenarionya dan dapat dibuat secara jelas. 2. Untuk dapat memberikan informasi kembali kepada masyarakat terkait MPP Balai POM di Banyumas termasuk MPP keliling yang dimiliki Balai POM di Banyumas sehingga masyarakat menyadari bahwa Balai POM di Banyumas terus hadir di tengah masyarakat dan pelaku usaha.
Juni	89.25	90.33	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	Inovasi pelayanan publik dapat diperhatikan kembali dan tindaklanjutnya dapat dimaksimalkan. Isu-isu nasional dapat ditampilkan pada media sosial yang dimiliki Balai POM di Banyumas, terutama public warning.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	50%	50%	Tidak ada kendala	Pertahankan capaian yang telah tercapai, mohon untuk selanjutnya dalam pelaksanaan dapat terus memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan
Februari	50%	50%	Tidak ada kendala	Pertahankan capaian yang telah tercapai, mohon untuk selanjutnya dalam pelaksanaan dapat terus memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan
Maret	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.
April	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti	Pertahankan capaian sampai akhir tahun pelaksanaan agar target terus tercapai hingga akhir tahun 2026.
Mei	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti	Dijalankan sesuai dengan hasil diskusi, perhatikan serapan anggaran yang mengikat IKU ini, pastikan untuk serapan anggaran dan capaian kinerja berjalan seimbang sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang telah disepakati.
Juni	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Dibuatkan edukasi umum seperti infografis melalui media sosial terkait dengan obat setelan. Sesuaikan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

Indeks Pelayanan Publik UPT Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Pelayanan Publik UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Belum ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Belum ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Maret	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
April	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Memastikan bahwa nilai IPP akan tercapai pada akhir tahun nanti. Maksimalkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
Mei	0	0	Belum ada kendala yang berarti	1. Agar memperhatikan tahun depan jika berpindah gedung, diusahakan untuk memaksimalkan pelayanan yang lebih sesuai dengan ketentuan. Dapat dianggarkan terkait buku braille mengingat harganya cukup mahal. 2. Lakukan refreshment terkait bahasa isyarat, yang mudah saja seperti mempersilahkan masuk, terimakasih, dan semacamnya. 3. Per Juli dapat dilakukan pergeseran jadwal MPP luar kota seperti 1x dalam satu bulan.
Juni	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Pelayanan publik dapat dikoordinasikan oleh fungsi Infokom agar mampu memenuhi nilai yang masih rendah sebelum akhir periode tahun 2026.

Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Maret	0	0	Informasi kendala dari Auditor Internal. Narasi dalam LKE dan data dukung yang disampaikan tidak sesuai.	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
April	0	Penilaian LKE sudah disampaikan ke inspektorat tanggal 10 April 2023. Tanggal 23 April, telah dilakukan desk ZI bersama inspektorat Tanggal 25 April, perbaikan desk ZI telah disampaikan kembali sesuai time line Status saat ini, menunggu penilaian inspektorat	Inovasi masih belum memiliki dampak terukur yang dirasakan langsung masyarakat SOP inovasi belum terintegrasi pada SOP Mikro Beberapa program kegiatan belum dilengkapi dengan data monitoring dan evaluasi	Melakukan pendetailan kegiatan hingga dampak yang dirasakan masyarakat dan melaksanakan tindak lanjut desk yang telah dilaksanakan.
Mei	0	Penilaian LKE sudah disampaikan ke inspektorat tanggal 10 April 2023. Tanggal 23 April, telah dilakukan desk ZI bersama inspektorat Tanggal 25 April,	Inovasi masih belum memiliki dampak terukur yang dirasakan langsung masyarakat SOP inovasi belum terintegrasi pada SOP Mikro Beberapa program kegiatan belum dilengkapi dengan data monitoring dan evaluasi	Periksa kembali SOP yang berlaku pada masing-masing fungsi sehingga setiap individu atau pegawai paham dan mengerti SOP yang berjalan pada Balai POM di Banyumas sehingga proses bisnis sesuai dengan SOP yang telah dibuat.

		perbaikan desk ZI telah disampaikan kembali sesuai timeline Status saat ini, menunggu penilaian inspektorat		
Juni	0	Sesuai Nodin Sestama No. PI.06.06.7.06.26.317 tanggal 19 Juni 2026, Nilai ZI BPOM Banyumas **82,07 (Melebihi target)** Capaian Kinerja kategori C . Detail penilaian tiap pokja belum di sampaikan dengan rinci, namun dalam keterangan disampaikan bahwa nilai area Pelayanan Publik < 60% Integrasi Inovasi ke dalam SOP sedang dalam progress. Saat ini seluruh fungsi sedang melakukan revisi SOP Mikro masing-masing. Progress saat ini (mas Tyo)	Inovasi terkait Pelayanan Publik belum optimal, belum terukur dan dianggap belum berdampak langsung bagi stakeholder. Belum semua pokja melakukan pemantauan program kerja yang ditetapkan dalam renja, sehingga ada program kerja yang tidak terlaksana sesuai schedule Belum semua SOP inovasi terintegrasi pada SOP Mikro. Fungsi yang belum update SOP Mikro dan kelengkapannya (Form perubahan dan evaluasi) yaitu: Fungsi Penindakan	Memperbaiki penilaian yang masih rendah dan mampu dilakukan untuk periode berikutnya.

Nilai AKIP Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai AKIP UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Tidak ada kendala	Mohon untuk selalu berkomunikasi dengan roren untuk kelanjutan capaian kinerja dan output masing-masing IKU dan program kegiatan
Maret	0	0	1. Penghematan anggaran tidak di sertai dengan penyesuaian target 2. Kertas kerja penghitungan capaian kinerja belum ditetapkan dari pusat sehingga penghitunagn capaian belum bisa dilakukan sesuai pedoman	Mohon untuk selalu berkomunikasi dengan roren untuk kelanjutan capaian kinerja dan output masing-masing IKU dan program kegiatan
April	0	0	Hasil review SAKIP 2025 terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan	Pelajari apa saja yang menjadi penilaian SAKIP, apabila perlu diskusi silahkan dibuatkan. Dibuatkan pelaporan monevnya, apa yang menjadi kendala dan perlu dievaluasi. Tiap bulan mohon dilihat ketepatan waktunya untuk pengumpulan dokumen.
Mei	0	0	Tidak ada kendala	Pastikan nilai AKIP akan tercapai pada tahun ini bahkan bisa menyentuh angka 80% sebagai standar Balai. Perhatikan untuk poin-poin yang harus ditingkatkan secara konsisten sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.
Juni	0	0	beberapa target RAPK bulanan sudah tidak relevan dengan ketersediaan anggaran dan target tahunan setelah efisiensi, sehingga perlu dilakukan usulan perubahan target bulamnan	Koordinasi oleh seluruh tim kerja untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Dapat dibuatkan diskusi sebelum adanya desk dari Pusat.

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Pada KRO CBV (Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%, Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV = 90%. Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).	Mohon untuk selalu menindaklanjuti dan aktif berkomunikasi dengan pusat terkait anggaran dan penyesuaian RPD yang sedang berjalan
Maret	0	0	Pada KRO CBV (Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%, Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV = 90%. Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).	Mohon untuk selalu menindaklanjuti dan aktif berkomunikasi dengan pusat terkait anggaran dan penyesuaian RPD yang sedang berjalan
April	0	0	Penyerapan Anggaran tidak sesuai rencana yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Paling besar komponen pada Belanja Modal. Pada KRO CBV (Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%,Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV = 90% Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).	Menyediakan justifikasi pada tiap RO anggaran dan mohon diperkuat dengan data dukung yang tersedia. Monitoring perubahan anggaran agar tidak terjadi tambal sulam secara terus menerus. Masing-masing fungsi jelaskan perpindahan anggarannya untuk apa dan terkontrol.
Mei	0	0	Deviasi penyerapan anggaran bulan Mei lebih dari 5% diakrenakan, antara lain: > Banyaknya waktu libur pada bulan Mei, sehingga penyerapan belanja 52 tidak optimal (deviasi 15.10%). > Realisasi penyerapan pada pengadaan reagen dan glassware melalui e-katalog (inaproc) terdapat kendala administrasi dokumen BAST, adendum, nomor CAN pada kontrak sehingga menyebabkan penolakan oleh KPPN.	Bersurat kembali terkait anggaran laboratorium agar serapan anggaran dapat maksimal sesuai dengan perencanaan.
Juni	0	0	Deviasi penyerapan anggaran lebih dari 5% dibandingkan dengan rencana penyerapan, hal ini disebabkabkan antara lain: 1. beberapa kegiatan terpadu tidak jadi dilaksankan secara Luring; 2. Belum tercapainya target penindakan sehingga kegiatan lanjutan belum bisa dilaksanakan	Perhatikan kembali serapan anggaran yang harus dicapai dan efektifkan kembali seluruh kegiatan hingga akhir periode sehingga mampu terserap secara maksimal.

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Tidak ada kendala	Segera melakukan tindaklanjut dan memenuhi hasil evaluasi maturitas risiko Balai POM di Banyumas
Maret	0	0	Dokumen peta resiko masih dalam proses penyusunan	Segera melakukan tindaklanjut dan memenuhi hasil evaluasi maturitas risiko Balai POM di Banyumas
April	0	0	Dokumen peta resiko masih dalam proses penyusunan	Masing-masing IKU mohon untuk diadakan mitigasi risikonya sehingga tiap IKU memiliki risiko
Mei	0	0	perlu dilakukan update analisis resiko indikator kinerja utama semester II	Setiap pegawai dapat mengusulkan risiko yang dihadapi dan dicantumkan ke dalam sebagai daftar risiko. Pastikan untuk setiap IKU terdapat risiko yang mengingatnya sehingga jika target capaian kinerja tercapai itu juga menandakan bahwa Balai POM di Banyumas mampu mengatasi risiko yang dapat terjadi sehingga capaian kinerja Balai POM di Banyumas lebih maksimal dan memuaskan.
Juni	0	0	update analisis resiko indikator kinerja utama semester II dalam proses penyusunan	Pembuatan risiko agar disesuaikan dengan kapabilitas agar mampu termitigasi.

Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman					
	Target	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	0	0	Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	0	0	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program. 4. Hambatan dalam proses penetapan usulan lokus.	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	0	0	0	0	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program,. 4. Hambatan dalam proses penetapan usulan lokus.	Pastikan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan. Pastikan setiap bulan terdapat progress untuk mencapai target yang telah direncanakan.
April	0	0	0	0	Telah dilaksanakan advokasi di setiap wilayah kerja Balai POM di Banyumas yaitu pada bulan April 2026, dengan rincian sebagai berikut : Kab. Purbalingga (21 April 2026) Kab. Cilacap (22 April 2026) Kab. Banjarnegara (23 April 2026)	Tetap membangun koordinasi dengan dinas terkait dan pihak eksternal terkait. Maksimalkan perencanaan kegiatan yang telah disusun secara optimal.

					Kab. Banyumas (27 April 2026) Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program,.	
Mei	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Memastikan pendampingan KKPA berjalan secara maksimal mengingat tahun lalu mendapatkan penghargaan. Kabupaten Banyumas yang sudah berhasil didampingi pada tahun lalu jangan sampai lupa terkait piagam penghargaannya agar tetap semangat menjalani pada tahun ini. Kemudian, mengingatkan kembali untuk pengisian kertas kerja jauh sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Pusat.
Juni	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Harapannya di tahun ini Kabupaten yang diampu mampu masuk peringkat seperti pendampingannya yang tahun lalu mendapat penghargaan. Perhatikan koordinasi di dalam Kabupaten, keterlibatan Bupati, dan

						kerjasama petugas.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	BIMTEK rencana akan dilakukan pada bulan Mei 2026	0	Tidak terdapat kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	BIMTEK rencana akan dilakukan pada bulan Mei 2026	0	Tidak terdapat kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	0	0	BIMTEK rencana akan dilakukan pada bulan Mei 2026	0	Tidak terdapat kendala	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
April	0	0	0	Rencana Bimtek telah dilakukan pembahasan internal dan dilakukan	Kegiatan belum terlaksana, belum dapat diketahui kendalanya	Melaksanakan perencanaan yang telah disusun secara optimal baik dari kegiatan

				pembagian tugas Bimtek dilakukan secara Hybrid dengan mengundang perwakilan saryanar (RS, klinik dan PKM) dari Banyumas, Cilacap. Purbalingga dan Banjarnegara Undangan Bimtek akan didistribusikan minggu I Mei 2026		maupun anggaran.
Mei	0	Sebanyak 1 Saryankes yang melapor ke e-meso 2.0 sampai akhir Mei 2026 yaitu (PKM Purwokerto Utara II)	45	Bimtek PV sudah terlaksana secara hybrid tanggal 21 Mei dengan mengundang 50 perwakilan Dinas Kesehatan, RS, PKM dan Klinik di area Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. Seluruh undangan confirm hadir. Laporan dan notulen kegiatan sudah disampaikan via Srikandi, kegiatan telah dipublikasi di website BPOM Banyumas setelah kegiatan KIE selesai.	Beberapa Saryanfar telah bersedia melakukan pelaporan, namun perlu dilakukan pendampingan langsung terkait pengisian KTD/ESO karena aplikasi e-meso 2.0 sering error (transisi sistem baru)	Pastikan setiap kegiatan memiliki tindak lanjut yang jelas dan kegiatan yang dilaksanakan baik berupa koordinasi atau hal lainnya, baiknya bisa dilengkapi dengan notulensi sehingga terdapat bukti pelaksanaan kegiatan.---> **Laporan KIE PV dan Notulensi telah disampaikan ke Pimpinan via Srikandi tanggal 4 Juni 2026** **Publikasi kegiatan KIE di website dan**

				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM adalah 8,23%		**medsos BPOM Banyumas telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026**
Juni	0	Jumlah kumulatif Saryankes yang telah melakukan pelaporan aplikasi e-meso sampai akhir bulan Juni adalah 20 Saryankes dengan data sebagai berikut 1. PKM Purwokerto Utara II (1 Laporan) 2. RS JIH Purwokerto (1 Laporan) 3. RS Khusus Mata Purwokerto (1 Laporan) 4. RS Goeteng (6 Laporan) 5. PKM Sumpiuh I (1 Laporan) 6. RS Emanuel Banjarnegara (3 Laporan) 7. Elisabeth Purwokerto (1 Laporan) 8. PKM Banjarnegara 2 (2 Laporan) 9. PKM Baturaden II (1 Laporan) 10. PKM Purwokerto Utara I (1 Laporan) 11. PKM Cilacap Tengah 2 (1 Laporan) 12. Klinik Pratama Tanjung (1 Laporan) 13. PKM Madukara I (2 Laporan)	45	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM per Juli 2026 22/45 * 100% = 48,89 **% saryankes telah lapor (>>> target yang ditetapkan yaitu 27%) atau setara 181% dari target** Telah dilakukan koordinasi PV dengan Lintas sektor yaitu KOMDA PP KIPI Banjarnegara dan Purbalingga. BPOM harus dilibatkan dalam penanganan penanggulangan KIPI yang ada di masing masing Kab/kota. Kegiaatn Koordinasi juga sudah dipublikasikan dalam website dan medsos BPOM Banyumas	Seluruh terkendala terkait aplikasi error sudah dapat diatasi, Saryankes dapat menggunakan aplikasi dengan lancar dengan pendampingan petugas BPOM Banyumas Koordinasi PV dengan lintas sektor seperti KOMDA PP KIPI di masing-masing daerah terkendala dengan biaya, karena anggaran PV tidak punya anggaran perjadin.	Pelaporan tetap dijalankan apa adanya namun bisa diperjelas saja justifikasi kenapa melampaui target tahunannya.

		14. Klinik Masyitoh Cilacap (1 Laporan) 15. PKM Baturaden I (1 Laporan) 16. Klinik P UMP Tambaksari (1 Laporan) 17. PKM Karangkobar (2 Laporan) 18. PKM Kesugihan I (2 Laporan) 19. PKM Wanareja I (1 Laporan) 20. RSU Dadi Keluarga (2 Laporan) 21. Klinik Pratama Rajal Amanda (1 Laporan) 22. RS PKU Sampang (1 Laporan))		Koordinasi dengan KOMDA PP KIPI di Cilacap dan Banyumas, serta Asosiasi tenaga kesehatan lain akan diagendakan dalam kegiatan berikutnya.		

Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	8	0	Tidak ada kegiatan inspeksi pada bulan Januari	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	8	0	Tidak ada kegiatan inspeksi pada bulan Februari	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	12.5	1	8	12.5	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.
April	37.5	3	8	37.5	Sarana tidak melakukan produksi sehingga tidak bisa dilakukan sampling produk di sarana produksi	Tetap pertahankan apa yang telah tercapai. Perhatikan capaian kegiatan dan serapan anggaran agar dapat tercapai secara optimal.
Mei	37.5	3	8	37.5	Sarana tidak melakukan produksi sehingga tidak	Ke depannya sesuaikan target baru yang telah diusulkan apabila sudah disetujui oleh Biro

					bisa dilakukan sampling produk di sarana produksi	Perencanaan dan Keuangan. Tidak lupa untuk follow up terkait hal tersebut.
Juni	37.5	3	8	37.5	Belum ada kendala. Target sudah tercapai di bulan April	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Banyumas TW II 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	Penggunaan Tool pengawasan AMR	Tidak ada kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	Penggunaan Tool pengawasan AMR	Tidak menemukan kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	0	Penggunaan Tool pengawasan AMR Publikasi AMR di Maret 2026	Tidak terdapat kendala	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila sedang turun di lapangan, silahkan untuk menyelipkan materi AMR.
April	0	Hingga 4 April 2026 telah tercapai Seluruh pemeriksaan sarana Apotek telah menggunakan Tool pengawasan AMR Pelaksanaan Publikasi AMR (Maret 2026), KIE AMR di April 2026	Tidak terdapat kendala Koordinasi dan advokasi AMR dengan lintas sektor diagendakan Mei 2026	Laksanakan apa yang telah direncanakan secara optimal baik dari pihak sarana, tempat, waktu kegiatan, dan anggaran.
Mei	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW berikutnya on going) Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali advokais ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai)	Tidak terdapat kendala Sedang menunggu informasi dari Dinkes Banjarnegara da Purbalingga untuk kegiatan Bimtek AMR	Dimaksimalkan kembali rangkaian kegiatan yang belum terlaksana. Pastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan baik dari segi waktu, pelaksanaan, dan serapan anggaran yang telah direncanakan.

		KIE AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai)		
Juni	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW I dan TW II terlaksana), Lanjut TW berikutnya Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali terlaksana yaitu: A dvokasi dan koordinasi ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai) KIE Bimtek AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai) BImtek AMR Apotek dijadwalkan 1 Juli 2026 dalam kegiatan Bimtek Apotek dan Toko Obat oleh Dinkes Cilacap dan Dinkes Purbalingga di W3	Tidak ada kendala terkait penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana, sudah dielaborasi dalam ceklist pemeriksaan rutin di Apotek Publikasi AMR tidak ada terkendala, berjalan setiap triwulan sekali, di bulan Maret dan Juni Advokasi tidak ada kendala, terlaksana 2 kali, melebihi target yang ditetapkan 1 kali dalam setahun KIE AMR ke masyarakat dapat dilakukan dielaborasikan dalam kegiatan infokom pada saat penyuluhan/sosialiasi ke masyarakat BImtek AMR ke Apotek baru terlaksana di tanggal 1 Juli, kolabotrasi dengan Dinkes Cilacap pada acara Bimtek Apotek dan Toko Obat Bimtek AMR di Purbalingga, masih menunggu informasi Dinkes Purbalingga, dijadwalkan dalam W3 Juli 2026	Maksimalkan kegiatan yang telah direncanakan, mungkin bisa dibarengi oleh kegiatan lainnya agar mampu efisien secara anggaran. KIE melalui media sosial bisa dioptimalkan kembali agar jangkauan bisa lebih luas kembali.